INDO-PACIFIC DEFENSE

VOLUME 44, TERBITAN KE-1, 2019

# FORUM

# PERSAINGAN demi Keunggulan Regional

# tajuk utama


**10 Perdagangan Gelap**
Negara-negara di kawasan ini mengeluarkan undang-undang dan program untuk memberantas perdangangan manusia ilegal.

**14 Memahami Korea Utara**
Satu lagi tantangan panjang yang dihadapi kawasan Indo-Pasifik.

**20 Ambisi Rusia**
Moscow mengeksploitasi pergeseran dalam aliansi Indo-Pasifik untuk merebut kekuasaan.

**24 India dan Tiongkok Saling Berhadapan**
Persaingan untuk memperoleh dominasi angkatan laut di kawasan Samudra Hindia.

**28 Saluran Komunikasi Terbuka**
Pelajaran dari bencana: Dialog sipil-militer menyelamatkan jiwa.

**34 Thailand Mengerahkan Pasukan Pemelihara Perdamaian**
Tanya jawab dengan Angkatan Bersenjata Thailand Laksamana Muda Nuttapong Ketsumboon.

**42 Memajukan Pengurangan Risiko Bencana**
Pendekatan multilateral Nepal usai dilanda dua gempa besar.

**46 Bangkitnya Perahu-Perahu Kecil**
Pengalaman Angkatan Laut Sri Lanka memberikan pelajaran bagi negara-negara maritim untuk memperkuat strategi kontraterorisme.

**52 Meningkatnya Kekuatan Tajam**
Rezim otoriter Tiongkok dan Rusia semakin memanipulasi, menggertak, dan mengalihkan perhatian untuk mempromosikan agenda mereka di negara-negara demokratis.

64

# bagian-bagian


**4 Indo-Pasifik Selayang Pandang**

**5 Kontributor**

**6 Seluruh Kawasan**
Berita dari Indo-Pasifik.

**8 Perkembangan Teroris**
Indonesia perketat undang-undang teror usai serangan yang menggunakan anak-anak.

**60 Suara**
Ekspansi strategis India di kawasan pulau Pasifik.

**64 Cakrawala Dunia**
Memelopori penangkapan ikan yang lebih aman di Madagaskar dan baja bebas bahan bakar fosil di Swedia.

**65 Renungan**
Anggota parlemen Eropa menginginkan larangan global terhadap robot mematikan.

**66 Serba-Serbi**
Berita-berita yang menarik, tak lazim, dan menghibur.

**67 Kata Terakhir**
Anggota penjaga kehormatan Pasukan Bela Diri Jepang bersiap menyambut kehadiran komandan Komando Indo-Pasifik A.S. di Tokyo.

**DI SAMPUL MAJALAH:** Ilustrasi ini menggambarkan persaingan berkelanjutan demi keunggulan di antara negara-negara di Indo-Pasifik. *ILUSTRASI* FORUM

Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi kuartal pertama *Indo-Pacific Defense FORUM* tahun 2019, yang menyoroti kesatuan upaya di kalangan militer, pasukan keamanan, serta organisasi pemerintah dan sipil terkait.

Misi kompleks dan perang multidimensi, seperti upaya untuk memerangi ancaman siber, senjata pemusnah massal, dan kejahatan transnasional, tetap menjadi prioritas di Indo-Pasifik. Keterlibatan dan latihan multinasional sangat penting untuk mengatasi tantangan mulai dari berbagi informasi hingga mengelola prioritas yang bertentangan dan perbedaan dalam doktrin dan peralatan, serta perbedaan dalam bahasa dan leksikon militer.

Karena militer tidak selalu memimpin dalam operasi stabilitas atau darurat, komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai kesatuan upaya dan mengurangi duplikasi pekerjaan. Edisi *FORUM* ini mencari tahu lebih jauh tentang kerumitan dalam menjaga saluran komunikasi terbuka di antara operator sipil-militer dan memahami kapabilitas dan keterbatasan masing-masing. Lembaga kemanusiaan, misalnya, sering kali menjadi yang pertama merespons dalam banyak situasi bantuan bencana. Pengetahuan mereka tentang kapabilitas militer yang berbeda menghasilkan penyelamatan jiwa sebanyak mungkin dan mengurangi penderitaan secepat mungkin.

Artikel sampul kami menampilkan eksplorasi Dr. David Brewster dari Australian National University tentang persaingan yang semakin gencar antara India dan Tiongkok demi meraih dominasi angkatan laut di kawasan Samudra Hindia.

Korea Utara terus menghadirkan kesempatan unik seiring Amerika Serikat dan pihak lainnya menekan dan bekerja sama dengan pemimpin Kim Jong Un untuk melakukan denuklirisasi. Untuk edisi *FORUM* ini, pensiunan Angkatan Darat Republik Korea Letjen. In-Bum Chun membahas beberapa tantangan budaya rumit dalam negosiasi yang sedang dilakukan dengan Korea Utara oleh A.S., Korea Selatan, dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan kedamaian di Semenanjung Korea.

Terbitan kali ini mengkaji Asia Tenggara secara lebih mendalam melalui fitur tanya jawab dengan Laksamana Muda Nuttapong Ketsumboon, direktur Pusat Operasi Perdamaian untuk Angkatan Bersenjata Thailand. Ia berbicara dengan *FORUM* tentang komitmen Thailand untuk menjaga perdamaian internasional usai latihan militer multinasional Cobra Gold 2018, yang digelar bersama oleh Thailand dan Amerika Serikat.

Di tempat lain, kehadiran Rusia semakin menambah ketat persaingan yang sudah gencar atas kekuasaan dan persuasi di Indo-Pasifik. Dampak Rusia dapat dirasakan saat Presiden Vladimir Putin memperluas jejaknya di kawasan ini. Terbitan ini menelaah eksploitasi Rusia untuk merebut kekuasaan dan menyoroti upaya yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat yang bisa meredam aspirasi regional Rusia.

Semoga edisi ini menciptakan dialog tambahan dalam pembahasan berkelanjutan tentang kesatuan upaya dan memicu gagasan baru. Seperti biasa, saya menyambut baik komentar Anda dan mengajak Anda menghubungi staf *FORUM* di **ipdf@ipdefenseforum.com** untuk menyampaikan perspektif Anda.

Salam,

P. S. DAVIDSON
Laksamana Angkatan Laut A.S.
Komandan, Komando Indo-Pasifik A.S.

IPD FORUM

**Kesatuan Upaya**
Volume 44, Terbitan ke-1, 2019

**KEPEMIMPINAN USINDOPACOM**

PHILIP S. DAVIDSON
*Laksamana AL A.S.*
*Komandan*

BRYAN P. FENTON
*Letnan Jenderal, A.S.*
*Wakil Komandan*

MICHAEL A. MINIHAN
*Marsekal Muda AU A.S.*
*Kepala Staf*

STEPHEN T. KOEHLER
*Laksamana Muda AL A.S.*
*Direktur Operasi*

**PENANGGUNG JAWAB PROGRAM**

NATHAN T. DIVELBESS
*Letnan Kolonel, A.S.*
*Manajer IPD FORUM*

HUBUNGI KAMI

IPD FORUM

*Indo-Pacific Defense FORUM*
Program Manager,
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861 USA

**ipdefenseforum.com**
email:
**ipdf@ipdefenseforum.com**

***Indo-Pacific Defense FORUM*** adalah sebuah majalah militer profesional yang diterbitkan triwulanan oleh komandan Komando Indo-Pasifik A.S. untuk menyediakan forum internasional bagi personel militer di kawasan Indo-Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan atau sudut pandang komando ini atau lembaga pemerintah A.S. lainnya. Semua artikel ditulis oleh staf *FORUM* kecuali jika disebutkan lain. Menteri pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimanayang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S.

ISSN 2333-1593 (cetak)
ISSN 2333-1607 (online)

**LETNAN JENDERAL CHUN IN-BUM** pensiun pada bulan Juli 2016 dari Angkatan Darat Korea Selatan, di mana ia menjabat sebagai komandan Divisi Infanteri ke-27 dan Komando Perang Khusus Korea Selatan. Ia juga menjabat sebagai wakil kepala staf untuk Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan/A.S. dan sebagai anggota senior Komisi Gencatan Senjata Militer Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia adalah visiting fellow dalam kebijakan luar negeri di Center for East Asia Policy Studies di Brookings Institution. Penghargaan yang pernah diterimanya antara lain Medali Pertempuran Hwa-Rang dan Bronze Star A.S. atas pelayanannya di Irak pada tahun 2005. Risetnya berfokus pada keamanan nasional, Semenanjung Korea, terorisme, dan Asia Timur Laut. Ditampilkan pada Halaman 14

**DR. DAVID BREWSTER** adalah research fellow senior di National Security College, Australian National University. Bidang spesialisasinya adalah keamanan maritim di Samudra Hindia dan Indo-Pasifik. Ia juga ditunjuk sebagai fellow di Royal Australian Navy Sea Power Centre dan distinguished research fellow di Australia India Institute, University of Melbourne. Buku terbarunya, *India and China at Sea: Competition for Naval Dominance in the Indian Ocean*, membahas perspektif India dan Tiongkok tentang peran mereka di Samudra Hindia dan strategi angkatan laut mereka yang terus berkembang terhadap satu sama lain. Ditampilkan pada Halaman 24

**JENDERAL PURMA CHANDRA THAPA** adalah kepala staf Angkatan Darat Nepal. Selama 36 tahun berdinas di militer, ia telah banyak menjabat sebagai komando dan staf, termasuk Master-General of Ordnance di markas besar Angkatan Darat dan komandan Valley Division. Ia juga pernah memegang berbagai posisi di Perhimpunan Bangsa-Bangsa, dari komandan peleton kontingen Nepal di Lebanon pada tahun 1986 hingga kepala misi dan komandan Pasukan Pengamat Gencatan Senjata P.B.B. di Dataran Tinggi Golan dari Januari 2015 sampai Februari 2016. Seorang jenderal yang menyandang banyak penghargaan, ia adalah lulusan Universitas Tribhuvan di Nepal, jurusan humaniora dan ilmu sosial, dan ia juga memperoleh Master of Philosophy dalam studi pertahanan dan strategis dari University of Madras di India. Ditampilkan pada Halaman 42

**LETNAN KOLONEL ALEX CARTER** adalah seorang perwira Angkatan Darat A.S. dan military fellow di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) di Honolulu, Hawaii.

**KOLONEL DAMIAN FERNANDO** adalah seorang perwira Angkatan Laut Sri Lanka dengan pengalaman tempur melawan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) di laut. Kedua penulis adalah lulusan program Comprehensive Security Responses to Terrorism di DKI APCSS tahun 2017. Dalam edisi ini, mereka berbagi strategi dan taktik kontraterorisme dari perang saudara di Sri Lanka. Ditampilkan pada Halaman 46

# Gabung dengan Bahasan Ini

## Kami ingin mendengar dari ANDA!

*Indo-Pacific Defense FORUM* melayani personel militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan produk Komando Indo-Pasifik A.S. ini menyediakan konten berkualitas tinggi dan mendalam mengenai topik-topik yang memengaruhi upaya keamanan di seluruh kawasan — mulai dari kontraterorisme hingga kerja sama internasional dan bencana alam.

*FORUM* membangkitkan bahasan-bahasan yang mendalam dan mendorong pertukaran gagasan yang sehat. Ajukan tulisan, foto-foto, pokok-pokok bahasan atau tanggapan-tanggapan lainnya kepada kami lewat DUNIA MAYA atau ke:

Program Manager
*Indo-Pacific Defense FORUM*
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

*Indo-Pacific Defense FORUM* menawarkan konten online ekstensif, dengan artikel baru yang dipasang setiap hari, di **www.ipdefenseforum.com**

**Para pengunjung dapat:**

- **Membaca tulisan khusus di dunia maya**
- **Menengok kembali terbitan sebelumnya**
- **Mengirim umpan balik kepada kami**
- **Minta berlangganan**
- **Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan**

FORUM

*Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa*

APP/GETTY IMAGES

SELANDIA BARU

# PAJAK WISATAWAN

Pemerintah Selandia Baru yang dipimpin Partai Buruh mengatakan pada Juni 2018 bahwa mereka berencana mengenakan pajak pada sebagian besar pengunjung internasional untuk mendanai infrastruktur dan meringankan tekanan di sektor pariwisata yang tengah berkembang pesat di negara Pasifik Selatan itu.

Pajak baru senilai sampai dengan 341.600 rupiah (24,40 dolar A.S.) per orang akan mulai dikenakan pada pertengahan tahun 2019 — pertengahan Tahun Pariwisata resmi Tiongkok-Selandia Baru — dan diharapkan akan memberikan tambahan 555,8 miliar rupiah (39,7 juta dolar A.S.) hingga 781,2 miliar rupiah (55,8 juta dolar A.S.) setahun untuk mendanai konservasi dan infrastruktur.

"Sudah sewajarnya mereka memberikan kontribusi kecil agar kami dapat membantu menyediakan infrastruktur yang mereka butuhkan dan lebih melindungi tempat alami yang mereka nikmati," kata Menteri Pariwisata Kelvin Davis dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan lewat email.

Tetangganya, Australia, yang merupakan sumber utama pengunjung Selandia Baru, akan dibebaskan dari pajak, tetapi sebagian besar sumber pariwisata lainnya akan tercakup, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris.

Pajak tersebut akan ditagih bersama permohonan visa dan melalui otoritas perjalanan elektronik baru tempat orang yang memenuhi syarat mendapatkan visa saat kedatangan harus mengajukan permohonan dan membayar biaya tersebut.

Rekor lonjakan pariwisata dalam empat tahun terakhir telah memicu pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan di Selandia Baru namun membuat infrastrukturnya tertekan, dan warga lokal mengeluhkan jalan-jalan di alam terbuka yang dulunya tenang kini dipenuhi dengan orang dan sampah.

Negara kecil dengan populasi sekitar 4,5 juta orang ini mengalami lonjakan jumlah pengunjung hampir 30 persen sejak 2015 menjadi 3,8 juta dalam tahun berjalan hingga April 2018, menurut data dari Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan. Reuters

JEPANG/KAMBOJA

# KESEPAKATAN BANTUAN

Jepang telah menandatangani kesepakatan hibah dan pinjaman dengan Kamboja yang berjumlah lebih dari 1,26 triliun rupiah (90 juta dolar A.S.), kendati ada kekhawatiran dari komunitas internasional atas tindakan keras Perdana Menteri Hun Sen terhadap kritikus pemerintah.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menandatangani hibah 64,4 miliar rupiah (4,6 juta dolar A.S.) dan pinjaman 1,2 triliun rupiah (86 juta dolar A.S.), untuk proyek transmisi listrik dan ekonomi, di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, pada April 2018.

Oposisi utama Partai Penyelamatan Nasional Kamboja dibubarkan pada November 2017 atas permintaan pemerintah, yang membuat beberapa negara Barat mengutuk pembungkaman tersebut, memangkas bantuan, dan memberlakukan larangan visa pada beberapa anggota partai yang berkuasa.

Kelompok HAM dan anggota oposisi mendesak Tokyo untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Hun Sen, tetapi Jepang mengatakan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan pemilu dan tidak akan mencampuri apa yang mereka sebut sebagai urusan internal Kamboja.

AFP/GETTY IMAGES

Hun Sen memuji Jepang atas bantuan keuangannya tetapi menyerang para kritikus.

"Sementara Jepang, seorang teman, memberikan bantuan kepada Kamboja, beberapa orang jahat dapat meracuni berita seburuk yang mereka lakukan," kata Hun Sen di halaman Facebook-nya.

Selama pertemuan dengan Hun Sen, Kono mengatakan Jepang akan membantu Kamboja untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2030, kata juru bicara Hun Sen Eang Sophalleth.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kentaro Sonoura, penasihat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mendesak pesaing politik Kamboja untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri krisis politik. Reuters

INDIA

## AVIASI
# PRIBUMI

India ingin mendorong produsen pesawat untuk memproduksi di dalam negeri, dimulai dengan komponen dan akhirnya beralih menuju pesawat utuh, kata Menteri Penerbangan Suresh Prabhu pada Juni 2018.

Dalam serangkaian pesan di Twitter, Prabhu meminta Airbus dan Boeing Co. untuk berpartisipasi dalam dorongan tersebut sebagai bagian dari kampanye utama pemerintah "Make In India", yang menyoroti potensi pertumbuhan pasar yang berkembang dengan pesat, yang telah menambah penumpang dan memangkas tarif.

Perekonomian dan pasar penerbangan India yang berkembang pesat membutuhkan lebih dari 1.000 pesawat penumpang dan "lebih banyak lagi" pesawat kargo, tulis Prabhu dalam posting di Twitter.

Airbus mengatakan mereka memperkirakan maskapai penerbangan India memesan 1.750 pesawat selama 20 tahun. Boeing memprediksi hingga 2.100 pesawat akan dijual dalam periode yang sama. Reuters

INDONESIA

## MEMERANGI
# SUAP

Pemerintah Indonesia telah mengusulkan rancangan undang-undang ke DPR untuk membatasi transaksi tunai guna memberantas suap dan pencucian uang di perekonomian terbesar Asia Tenggara ini, kata kepala pengawas anti-pencucian uang negara ini.

RUU yang membatasi pembayaran tunai maksimum 100 juta rupiah (7.260 dolar A.S.), ditetapkan sebagai prioritas legislatif untuk tahun 2018, kata Ki Agus Badaruddin, kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pada dasarnya, asumsinya adalah bahwa pembatasan ini akan mengurangi ruang bagi seseorang untuk melakukan tindakan pencucian uang dan pembiayaan terorisme," kata Badaruddin.

Tidak ada perincian yang diberikan tentang bagaimana undang-undang tersebut dapat ditegakkan.

Sekitar 85 persen transaksi di Indonesia dilakukan secara tunai dan lebih sulit dilacak dibandingkan dengan yang dilakukan melalui bank atau saluran elektronik lainnya, sehingga menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk memerangi pencucian uang, korupsi, dan pembiayaan terorisme.

PPATK mendeteksi peningkatan suap dengan sebagian besar transaksi tunai, kata Badaruddin kepada jurnalis.

PPATK telah menemukan lebih dari seribu transaksi tunai mencurigakan yang mungkin terkait dengan pemilu regional mendatang di seluruh Indonesia, dibandingkan dengan 53 transaksi mencurigakan yang dilakukan secara elektronik, demikian laporan Tempo.co.

Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunan dari Transparency International pada tahun 2017, setara dengan Kolombia dan Thailand.

Menurut bank sentral Indonesia, yang terlibat dalam penyusunan RUU tersebut, batas yang diusulkan dapat meningkatkan penegakan hukum, kata Gubernur Bank Indonesia saat itu, Agus Martowardojo.

Bagi orang yang bertanggung jawab atas sistem pembayaran, "transaksi tunai boleh-boleh saja, tetapi nontunai lebih efisien," kata Martowardojo, sambil menambahkan bahwa rencana tersebut juga mendukung kampanye Bank Indonesia agar lebih banyak orang bertransaksi secara elektronik. Reuters

# INDONESIA PERKETAT UNDANG-UNDANG TEROR

## USAI SERANGAN YANG MENGGUNAKAN ANAK-ANAK

KISAH DAN FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS

DPR dengan suara bulat menyetujui undang-undang antiterorisme yang lebih ketat pada akhir Mei 2018, yang memperpanjang masa penahanan dan melibatkan militer dalam operasi kontraterorisme. Legislator didesak untuk mengambil tindakan oleh pengeboman yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku.

Kelompok HAM telah mengkritik sejumlah revisi karena dianggap terlalu luas atau samar dan memperingatkan untuk tidak terburu-buru mengesahkannya menjadi undang-undang. Lingkup keterlibatan militer dalam operasi kontraterorisme menjadi perdebatan sebab merupakan langkah mundur dari dua dasawarsa tanpa keterlibatan tentara di bidang yang dikuasai otoritas sipil.

Presiden Joko Widodo mengancam akan memberlakukan perubahan tersebut melalui peraturan presiden jika DPR tidak segera menyetujuinya. Perubahan pertama kali diusulkan setelah bom bunuh diri dan serangan senjata pada Januari 2016 di Jakarta namun berlarut-larut di DPR.

Pada akhir Mei 2018, polisi membunuh 14 terduga militan Islam dan menangkap 60 orang sejak bom bunuh diri yang terjadi pada awal bulan itu di kota terbesar kedua Indonesia, Surabaya. Keluarga yang telah diradikalisasi, ditemani oleh anak-anak mulai usia 7 tahun, melakukan serangan tersebut.

Bom bunuh diri itu, yang mengguncang Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menewaskan 26 orang, termasuk 13 anggota keluarga pelaku. Pelaku utama adalah pemimpin sel Surabaya dari jaringan militan Indonesia yang menyatakan kesetiaan pada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Undang-undang baru tersebut menambah tiga kali lipat masa penahanan maksimum tanpa tuntutan untuk terduga militan menjadi 21 hari dan kira-kira dua kali lipat keseluruhan masa penahanan yang diperbolehkan dari penangkapan hingga pengadilan menjadi lebih dari dua tahun.

Beberapa pasal mengatasi kesenjangan dalam undang-undang awal yang dikeluarkan pada tahun 2003, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut individu seperti ulama radikal yang menginspirasi serangan atau warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS.

Definisi ancaman dan tindakan teroris diperluas mencakup motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Sebagian perumus undang-undang mengatakan bahwa hal itu akan mencegah penyalahgunaan undang-undang tersebut.

Keterlibatan militer dalam operasi kontraterorisme akan didefinisikan kemudian melalui peraturan presiden.

Muhammad Syafi'i, ketua komite DPR yang meninjau undang-undang baru tersebut, mengatakan bahwa penyertaan militer bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas kepolisian dalam memberantas jaringan radikal dan ekstremisme di Indonesia.

Indonesia menjadi negara demokrasi setelah lengsernya diktator Suharto pada tahun 1998 dan peran militer, yang telah menikmati kekuasaan yang sangat besar, dikurangi menjadi pertahanan nasional.

Operasi kontraterorisme Indonesia kini dipimpin oleh pasukan elit kepolisian, Densus 88, yang dibentuk menyusul pengeboman klub malam Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, sebagian besarnya orang asing. Dalam dua tahun terakhir, Densus 88 mengatakan mereka telah menggagalkan sebanyak 23 rencana teror dan menangkap lebih dari 360 terduga militan.

**KIRI: Aparat unit kontraterorisme Kepolisian Nasional Indonesia Detasemen Khusus 88, yang dikenal sebagai Densus 88, mengamankan tempat persembunyian terduga militan setelah penyerbuan di Surabaya, Jawa Timur.**

**Regu penjinak bom kepolisian memeriksa bangkai sepeda motor di lokasi ledakan di luar sebuah gereja di Surabaya.**

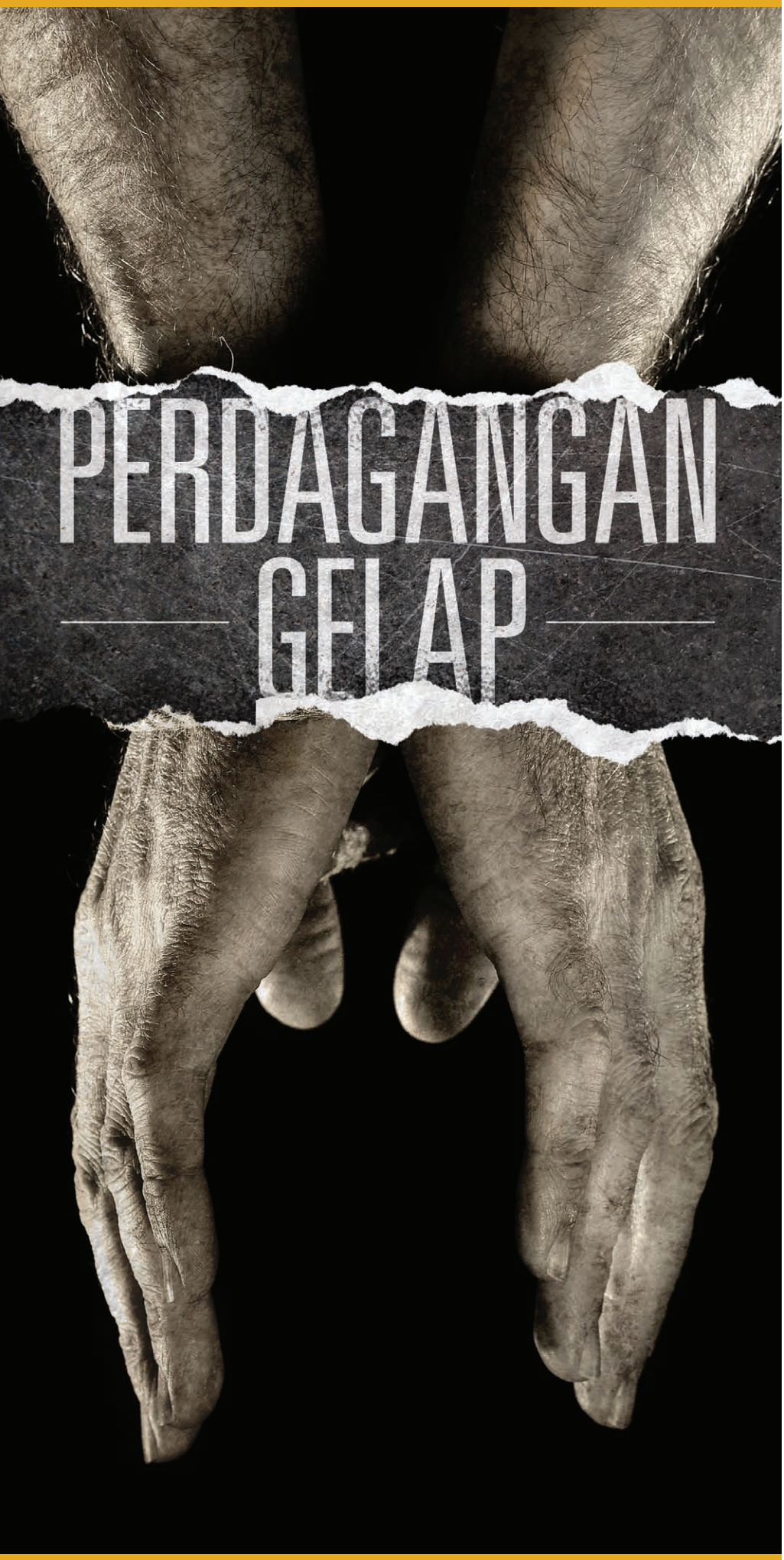


# *NEGARA-NEGARA DI KAWASAN MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG DAN PROGRAM UNTUK MEMBERANTAS PERDAGANGAN MANUSIA ILEGAL*

STAF *FORUM*

Catatan perdagangan manusia di Indo-Pasifik berisi keberhasilan dan juga kegagalan. Kendati sebagai rumah bagi beberapa pelaku pelanggaran terburuk — termasuk Korea Utara dan Myanmar — kawasan ini juga memiliki kisah sukses ketika beberapa negara menerapkan undang-undang dan program baru-baru ini untuk memerangi kejahatan mengerikan ini.

"Perdagangan manusia adalah fenomena global dan tak ada negara yang kebal," demikian menurut Laporan Perdagangan Manusia Departemen Luar Negeri A.S. 2018. "Korban perbudakan modern dieksploitasi di setiap kawasan dunia, dipaksa menjadi buruh atau pekerja seks komersial di dunia nyata industri dan di halaman internet. Besarnya masalah ini membutuhkan pengembangan tanggapan terpadu yang komprehensif dari para pemimpin dunia untuk secara kolektif menangani kejahatan yang tak mengenal batas ini."

Data berfluktuasi dari tahun ke tahun akibat sifat kejahatan perdagangan manusia yang tersembunyi, pergeseran dalam upaya pemerintah dan kurangnya keseragaman dalam struktur pelaporan. Akan tetapi, sebagian besar angka menunjukkan bahwa 36 juta orang di seluruh dunia

menjadi korban perdagangan manusia. Hampir dua pertiga dari mereka memiliki hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik.

"Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah hak asasi manusia paling tragis di masa kita," kata Rex Tillerson, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri A.S., dalam surat yang menandai penerbitan Laporan Perdagangan Manusia 2017. "Perdagangan manusia membuat keluarga terpecah belah, mendistorsi pasar global, melecehkan aturan hukum, dan memicu aktivitas kriminal transnasional lainnya. Perdagangan manusia mengancam keselamatan masyarakat dan keamanan nasional. Namun yang terburuk, kejahatan ini merampas kebebasan dan martabat manusia. Itulah sebabnya kita harus mengakhiri momok perdagangan manusia."

Organisasi multilateral dan regional telah bekerja memajukan konsensus untuk menciptakan tujuan, komitmen dan norma bersama guna memerangi perdagangan manusia. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), misalnya, telah berkolaborasi untuk menstandardisasi metode penelitian dan pengumpulan data di tingkat regional dan subregional, dengan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak mulai diberlakukan secara sah pada Maret 2017.

Konvensi ASEAN tersebut menetapkan tindakan spesifik dalam undang-undang dan kebijakan domestik negara-negara anggota, serta kewajiban internasional yang relevan, untuk mengatasi tantangan regional dalam pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban; penegakan hukum dan penuntutan kejahatan perdagangan manusia; serta kerja sama dan koordinasi regional dan internasional.

Secara khusus, rencana ini menyerukan kampanye kesadaran untuk memberikan edukasi kepada semua lapisan masyarakat tentang perdagangan manusia; membangun kapasitas penegak hukum dan pejabat terkait lainnya yang diperlukan untuk mencegah perdagangan manusia; dan meningkatkan kerja sama lintas batas serta berbagi informasi intelijen dan pertukaran informasi untuk memberantas operasi perdagangan manusia, di antara hal lainnya.

"Beberapa negara anggota ASEAN dianggap sebagai negara tujuan, sementara yang lainnya dianggap sebagai negara asal dan transit," demikian menurut Rencana Tindakan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-Anak. "Tantangan, prioritas nasional, dan strategi negara anggota ASEAN berbeda-beda, tergantung pada apakah negara tersebut merupakan negara asal, transit atau tujuan. Meski demikian, mereka memiliki kepentingan dan komitmen bersama dalam mencegah dan memerangi perdagangan manusia."

## BE MY PROTECTOR

Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malaysia meluncurkan aplikasi seluler pertama semacam ini pada bulan April 2018 yang dirancang untuk melaporkan dugaan kasus perdagangan manusia.

Disebut "Be My Protector" (Jadilah Pelindung Saya), aplikasi ini memungkinkan korban atau siapa pun yang telah mengidentifikasi korban perdagangan manusia potensial untuk mengunggah foto, menjelaskan situasinya, dan menentukan tingkat keparahannya. Tenaganita dan Change Your World, dua LSM di balik aplikasi ini, melakukan investigasi awal, kemudian meneruskan informasinya kepada polisi dan otoritas lainnya bila perlu. Penyelidikan LSM akan dimulai dalam waktu 24 jam sejak menerima keluhan. Pengembang aplikasi tersebut mengharapkan 100.000 unduhan per akhir tahun 2018 dan 1 juta unduhan per tahun 2023.

Sementara itu, pejabat pemerintah Malaysia telah meningkatkan penuntutan atas terduga perdagangan manusia selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, pihak berwenang memperkarakan 282 kasus perdagangan manusia, dibandingkan 131 kasus pada tahun 2016 dan 26 kasus pada tahun 2015, demikian menurut Benar News.

Pada tahun 2017, Malaysia dinaikkan ke Tingkat 2 dikarenakan pemerintah Malaysia memperlihatkan peningkatan upaya untuk memberantas perdagangan manusia, dibandingkan periode pelaporan tahun sebelumnya. Akan tetapi, dalam laporan 2018, Malaysia sedikit diturunkan ke Daftar Pantau Tingkat 2. Kedua laporan mendesak pihak berwenang melakukan lebih untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia dan melindungi mereka.

"Ini adalah masalah yang sangat besar karena kami memiliki banyak pekerja migran di sini, dan Malaysia akan diukur secara global melalui cara kami memperlakukan korban perdagangan manusia," kata Hannah Yeoh, mantan ketua Parlemen Negara Bagian Selangor, demikian menurut laporan Benar.

Pejabat pemerintah telah menggunakan sorotan itu untuk terus berusaha lebih baik. Pihak berwenang Malaysia mengatakan bahwa mereka mengharapkan kepatuhan penuh terhadap standar minimal perdagangan manusia Amerika Serikat pada tahun 2020.

## MEMERANGI WISATA PANTI ASUHAN

Anak-anak di Asia Tenggara sering kali terusir dari rumah dan ditempatkan di panti asuhan sebagai bagian dari skema untuk menghasilkan sumbangan keuangan. Penipuan tersebut dikenal sebagai "wisata panti asuhan", dan negara-negara seperti Australia mengatakan cukup sudah.

"Kita telah menciptakan masalah untuk kawasan tersebut, jadi sekarang kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memperbaikinya," ujar Senator Australia Linda Reynolds. "Kita harus menjadi bagian dari solusi, dan kita tidak menunggu untuk bertindak."

Korban anak-anak ini sering diabaikan oleh keluarga mereka dan menjadi daya tarik wisatawan bagi panti asuhan yang memanfaatkan mereka dalam penipuan untuk meminta uang dan dukungan lainnya. Australia

# PERDAGANGAN MANUSIA di KAWASAN INDO-PASIFIK

sejak dulu telah menjadi salah satu donor utama panti asuhan semacam ini di kawasan tersebut, demikian menurut Reuters.

"Para sukarelawan kami — banyak kawula muda dan pelajar — secara tidak sadar mengambil bagian dalam perdagangan manusia ... membayar sampai 20 juta rupiah (2.000 dolar Australia) untuk melakukannya," kata Menteri Luar Negeri Australia saat itu Julie Bishop. "Kita tidak ingin menambah penderitaan anak-anak di kawasan ini. Kita harus menangani momok ini."

Australia meluncurkan kampanye "Sukarelawan Cerdas" untuk mencegah warga berpartisipasi dalam proyek sukarela jangka pendek tanpa keterampilan di panti asuhan luar negeri.

Kamboja memiliki semakin banyak panti asuhan, demikian menurut laporan Reuters. Peningkatan itu telah dipicu oleh ketertarikan warga Australia dan lainnya yang menganggap mereka melakukan perbuatan baik, padahal sebenarnya mereka telah ditipu.

Sekitar tiga dari empat anak yang tinggal di panti asuhan di Kamboja memiliki setidaknya satu orang tua, menurut data P.B.B.

"Panti asuhan terburuk mempertahankan dan mengeksploitasi anak-anak dengan tujuan menghasilkan uang. Panti asuhan seharusnya menjadi pilihan terakhir bagi anak-anak," kata Bishop, demikian menurut Reuters.

Warga Australia tidaklah kebal dari masalah ini, sebab pejabat Kementerian Dalam Negeri memperkirakan sebanyak 4.000 orang Australia menjadi korban perbudakan modern di seluruh dunia, bekerja di pertambangan, pabrik, rumah bordil, lokasi konstruksi, dan peternakan.

"Eksploitasi mereka melibatkan kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia berat serta mencemari barang dan jasa yang kita gunakan setiap hari," ujar Asisten Menteri Dalam Negeri Alex Hawke, menurut 9 News Australia.

RUU Perbudakan Modern 2018 diajukan ke Parlemen Australia pada 28 Juni 2018. Jika disahkan, RUU ini akan meningkatkan pelaporan tentang praktik perbudakan modern yang dipidanakan menurut hukum Commonwealth namun tidak menetapkan sanksi keuangan bila tidak melaporkan.

**TINGKAT 1:**
Negara-negara yang pemerintahnya sepenuhnya memenuhi standar minimum UU Perlindungan Korban Perdagangan Manusia.

**TINGKAT 2:**
Negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum tetapi sedang melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi standar tersebut.

**DAFTAR PANTAU TINGKAT 2:**
Pemerintah tidak sepenuhnya mematuhi perlindungan minimum. Jumlah korban pelecehan parah sangat besar atau meningkat secara signifikan.

**TINGKAT 3:**
Pemerintah tidak mematuhi perlindungan minimum dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhinya. Negara-negara yang tetap berada dalam Daftar Pantau Tingkat 2 selama dua tahun secara otomatis diturunkan ke Tingkat 3.

Sumber: Laporan Perdagangan Manusia, Departemen Luar Negeri A.S., Juni 2018

*ILUSTRASI FORUM*

## BERKOLABORASI UNTUK MEMBERANTAS

Pihak berwenang menganggap kota Angeles di Filipina sebagai sentra perdagangan manusia di Asia Tenggara. Polisi, jaksa penuntut, lembaga pemerintah lainnya, dan LSM telah bergabung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak diperdagangkan dan membantu mengidentifikasi orang yang dicurigai menjadi korban.

"Kita perlu bersikap proaktif dan fokus pada pencegahan untuk memecah siklus perdagangan manusia," kata Cecilia Flores-Oebanda, pendiri dan kepala Visayan Forum Foundation, sebuah badan amal yang bergerak di bidang anti-perdagangan manusia yang berbasis di Manila, demikian menurut Reuters. "Kita banyak melihat penggerebekan dan penyelamatan ... tetapi budayanya belum berubah, dan orang-orang perlu tahu tentang kejahatan ini."

Filipina adalah satu-satunya negara Indo-Pasifik yang menerima peringkat atas dalam Laporan Perdagangan Manusia pemerintah Amerika Serikat selama dua tahun berturut-turut untuk upaya memerangi perdagangan manusia. Namun, hampir 400.000 orang — atau 1 dari 250 orang penduduk Filipina — merupakan korban perbudakan modern, demikian menurut Indeks Perbudakan Global 2016 yang dikeluarkan oleh Walk Free Foundation.

Satu bagian dari percakapan perdagangan manusia yang menawarkan bantuan adalah korban sendiri.

Beberapa penyintas yang bekerja sama dengan kampanye anti-perdagangan manusia Bala Keselamatan mengatakan bahwa mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan dapat membantu mereka membangun kembali kehidupan dan menjadi teladan bagi orang lain.

"Pemimpin penyintas dapat memberikan harapan kepada mereka yang memulai perjalanan menuju kebebasan, menawarkan contoh apa yang mungkin terjadi di masa depan," kata Dang, seorang penyintas yang kini menjadi aktivis yang sewaktu kanak-kanak dijual untuk seks, kepada Reuters.

India telah menyediakan pekerjaan menjahit pakaian dan membuat perabot bagi para penyintas. Amerika Serikat menawarkan pekerjaan di bidang katering dan coding. Di seluruh dunia, negara-negara semakin giat mencari cara untuk mempekerjakan para penyintas perbudakan saat mereka memulai hidup baru.

Hubungan antara korban, pemerintah, LSM, dan masyarakat sendirilah yang harus terus dibina untuk memecah siklus tersebut.

"Di era pasar yang saling terhubung, tenaga kerja bergerak, dan komunikasi digital ini, pelaku perdagangan manusia mengembangkan cara yang lebih baru dan lebih canggih untuk mengeksploitasi korban mereka. Pelaku perdagangan manusia terutama sangat ahli dalam mengidentifikasi dan menumbuhkan kerentanan pada orang yang mereka eksploitasi, memanfaatkan situasi sulit dan ketidakstabilan, serta mengeksploitasi kebijakan dan kegiatan pemerintah dengan cara yang tidak terduga," demikian kesimpulan Laporan Perdagangan Manusia 2018. "Tidak peduli seberapa efektif kebijakan nasional dalam mencapai sasaran yang diinginkan, pemerintah harus terus mengkaji dan menguji kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak memberdayakan pelaku perdagangan manusia atau malah berkontribusi pada perdagangan manusia."

Tanpa langkah-langkah tersebut, perdagangan manusia akan terus berkembang, kata laporan itu. "Beberapa upaya pemerintah dalam mencapai keamanan nasional dan stabilitas regional juga secara tidak langsung memungkinkan perdagangan manusia. Terkadang, dukungan pemerintah untuk dan koordinasi operasional dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata dapat secara tidak sengaja memberdayakan mereka untuk mengeksploitasi orang melalui perekrutan paksa ke dalam kelompok bersenjata, perekrutan dan penggunaan anak-anak, atau eksploitasi seksual," demikian menurut laporan Departemen Luar Negeri A.S.

"Pemerintah yang mendukung militer dan kelompok bersenjata harus memastikan mereka memahami seluruh lingkup kegiatan organisasi tersebut dan cara mereka memanfaatkan sumber daya pemerintah. Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan, membangun proses yang transparan untuk meninjau tuduhan, dan mengambil tindakan yang tepat termasuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan akhirnya menghentikan dukungan dan koordinasi dengan kelompok tersebut." □

# Memahami KOREA UTARA

Ilustrasi *FORUM*

# Satu lagi tantangan panjang yang dihadapi kawasan Indo-Pasifik

**LETJEN. (PURN.) CHUN IN-BUM**/ANGKATAN DARAT KOREA SELATAN

Proses negosiasi yang panjang dan menantang menanti Amerika Serikat dan Korea Utara. Fokusnya adalah kapabilitas senjata nuklir terlarang Korea Utara serta senjata penghancur massal lainnya dan cara pengirimannya. Untuk memahami skala penuh dari tantangan yang dihadapi setiap negara yang harus bekerja dengan Korea Utara, kita harus memahami Korea Utara dan kemampuan militernya.

Meski pasukan konvensional Korea Utara mengoperasikan pesawat dan tank usang dengan kemampuan terbatas, Angkatan Darat Korea Utara masih berinvestasi di bidang yang bisa menjadikannya sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Pertama, selain mempertahankan negara garnisun dan kekuatan aktif angkatan darat yang berjumlah lebih dari 1 juta tentara, Korea Utara mempertahankan kekuatan darat yang lebih fit dan bersenjata lebih lengkap yang dipandangnya sebagai pasukan khusus. Pasukan khusus Korea Utara kalah dalam hal peralatan dan pelatihan dibandingkan sebagian besar militer modern, namun mereka termotivasi dan memiliki fisik yang fit. Korea Utara juga telah mempersenjatai diri dengan lebih dari 10.000 sistem pertahanan udara portabel manusia (MANPADS), yang merupakan rudal darat ke udara yang diluncurkan dari bahu yang biasanya merupakan senjata terpandu dan ancaman bagi pesawat yang terbang rendah, terutama helikopter. Banyak MANPADS dipasang pada pengangkut personel lapis baja, tank, dan artileri swagerak. Besarnya jumlah kendaraan yang dilengkapi MANPADS, digabung dengan berbagai macam artileri anti-pesawat konvensional Korea Utara, akan membuat operasi pesawat putar sulit dan berbahaya, terutama pada siang hari.

Kedua, Korea Utara telah berinvestasi dalam kapabilitas jamming GPS dan penggunaan drone murah sekali pakai. Konsekuensi potensialnya berupa gangguan terhadap munisi presisi dari platform udara, laut dan darat dan kemungkinan ancaman pengintaian drone, jamming dan pengiriman senjata termasuk agen biologis dan kimia. Sampai saat ini, Korea Selatan mengalami kesulitan mendeteksi drone tersebut, apalagi menembaknya. Ini menjadi bentuk lain dari kapabilitas Korea Utara yang sulit dihadapi bukan hanya karena kurangnya kapabilitas tandingan tetapi juga karena potensi kesalahpahaman dan eskalasi.

Ancaman ketiga yang mengkhawatirkan adalah kapabilitas siber Korea Utara. Korea Utara adalah kekuatan siber super. Kapabilitas siber Korea Utara berasal dari kemampuannya merekrut dari seluruh penduduknya. Orang-orang berbakat dapat diarahkan untuk bekerja sebagai prajurit siber tanpa pertimbangan pribadi apa pun. Karena pemerintah Korea Utara beroperasi tanpa hambatan moral atau hukum apa pun, mereka dapat bereksperimen dan melaksanakan operasi yang memberikan lebih banyak pengalaman dan keahlian kepada para operator sibernya. Program perekrutan dan pelatihan siber Korea Utara telah berlangsung selama setidaknya 20 tahun. Analis keamanan telah memverifikasi bahwa Korea Utara terlibat dalam kegiatan pencurian siber internasional dan mampu melakukan intimidasi siber, sabotase, dan serangan langsung pada infrastruktur.

**Perwira militer Korea Utara bertepuk tangan dalam peringatan 100 tahun kelahiran pemimpin pendiri negeri Kim Il Sung pada 15 Agustus 2012, di bawah potretnya, kiri, dan penerusnya Kim Jong Il di alun-alun Kim Il Sung di Pyongyang.** THE ASSOCIATED PRESS

**Bayi-bayi Korea Utara yang menderita malnutrisi beristirahat di rumah sakit Haeju di provinsi Hwaghae Selatan pada Oktober 2011. Sistem distribusi makanan Korea Utara, yang terkait dengan sistem kelasnya, sering berkontribusi pada kekurangan makanan, terutama di kalangan kasta bawah.** REUTERS

## Tunduk sedari lahir

Yang terakhir, ada aspek Korea Utara yang menggelisahkan: Jauh tertanam dalam budayanya adalah praktik diskriminasi terhadap orang atas dasar asal kelahiran mereka. Ini lebih dari sekadar masalah sosial. Masyarakat Korea Utara menggunakan Songbun, sebuah sistem kasta, untuk mempertahankan kendali atas rakyatnya. Sistem penindasan terbukti efektif untuk rezim itu, mampu bertahan dari bencana kelaparan pada tahun 1990-an.

Kepemimpinan Korea Utara pada dasarnya membagi penduduknya sejak lahir menjadi tiga kategori besar dan sekarang memiliki 45 subkategori penduduk. Di bagian teratas adalah "inti" dari masyarakat Korea Utara. Kelompok ini terdiri dari keturunan pejuang revolusi, mereka yang lahir dari orang tua yang berperang melawan Jepang dan Amerika, anggota Partai Komunis, kalangan elit militer dan sebagainya. Keanggotaan dalam kelompok inti merupakan hak lahir, bukan sesuatu yang dicapai seseorang melalui pekerjaan dan usaha. Sekitar 28 persen penduduk Korea Utara berada dalam kategori ini, atau sekitar 6 sampai 7 juta orang. Hampir separuh dari angka ini diberi hak istimewa untuk tinggal di Pyongyang, ibu kota Korea Utara.

Kategori kedua adalah kelas "dasar" atau "lemah". Mereka sebagian besarnya adalah keturunan pedagang, wiraniaga, orang Tiongkok-Korea dan orang Jepang-Korea, pengelak wajib militer dan praktisi takhayul. Sekitar 45 persen penduduk Korea Utara berada dalam kategori ini. Kelompok ini terdiri dari sekitar 14 hingga 15 juta orang Korea Utara. Mereka adalah buruh dan pekerja yang menjaga sistem bagi kelompok inti agar tetap ada dan berfungsi.

Kategori ketiga adalah kategori "kompleks" atau "musuh". Kategori ini terdiri dari keturunan tuan tanah, pendeta, pasukan anti-partai, anggota keluarga pembelot, dan seterusnya. Sekitar 27 persen penduduk berada dalam

# KESEIMBANGAN MILITER DI SEMENANJUNG KOREA

## Perbandingan Perangkat Keras Utama

Korea Utara | Korea Selatan

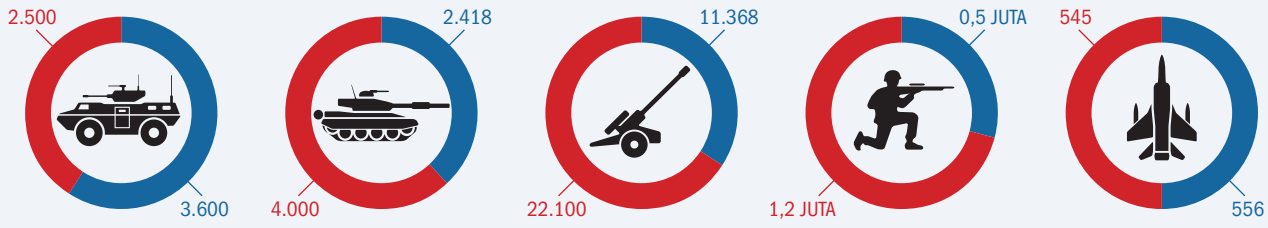

### Kemampuan nuklir

Melakukan 6 uji coba nuklir, terakhir pada September 2017

### Senjata kimia

2.500-5.000 ton persediaan

### Hwasong 15

Rudal balistik antarbenua yang diuji, November 2017

### Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Sistem antirudal yang dikerahkan pada Maret 2017

## Dukungan A.S. kepada Korea Selatan

### Perangkat keras

**Jet tempur F-22**

**Pengebom siluman B-2** (Berkemampuan nuklir)

**Pengebom B-52** (Berkemampuan nuklir)

### Personnel

28.500 pasukan ditempatkan di Korea Selatan

Sumber: *Military Balance 2017*, International Institute For Strategic Studies; Stockholm International Peace Research Institute; *The Changing Military Balance In The Koreas And Northeast Asia*, Center For Security And International Studies; Agence France-Presse

Ilustrasi *FORUM*

# SATU DASAWARSA KEJAHATAN SIBER KOREA UTARA

Penyidik kriminal telah mengaitkan serangkaian serangan siber di seluruh dunia dengan peretas Korea Utara, yang disponsori oleh rezim itu. Terkadang peretas mencuri uang dan informasi; serangan lainnya bertujuan melumpuhkan infrastruktur seperti sistem utilitas. Sedangkan yang lainnya menargetkan orang yang dianggap memfitnah Kim Jong Un.

**2010-2014**
75.472 serangan siber terhadap pemerintah dan lembaga negara Korea Selatan.

**2017**
- Aktor rezim menyebarkan ransomware WannaCry termasuk EternalBlue oleh Shadow Broker yang melumpuhkan perusahaan di seluruh dunia.
- Perusahaan listrik A.S. diserang, menurut laporan perusahaan FireEye.
- Peretas Covellite, yang terkait dengan Korea Utara, menyerang organisasi energi konsumen di A.S., Eropa, dan Asia Timur.

**2017-18**
Jutaan dolar dicuri dari tempat penukaran mata uang kripto.

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

**2009**
Situs web kepresidenan, pertahanan, dan bank di Korea Selatan diretas. Situs web Pentagon dan Gedung Putih A.S. juga diretas.

**2011**
Koperasi pertanian Korea Selatan Nonghyup menjadi target, melumpuhkan bank, menjadikan pelanggan tidak dapat mengakses dana mereka selama lebih dari seminggu.

**2013**
Bank-bank besar dan stasiun penyiaran di Korea Selatan berhenti beroperasi saat kantor berita Korea Utara KNCA menyiarkan pesan rezim itu yang berjanji untuk menghancurkan pemerintah Korea Selatan.

**2014**
Menyusupi jaringan Sony Picture Entertainment, membocorkan informasi secara online untuk menandingi rilis "The Interview", sebuah film satire tentang jurnalis yang membunuh Kim Jong Un.

**2016**
- Informasi rahasia dicuri dari komando militer Korea Selatan menggunakan server intranet yang terkontaminasi malware.
- 1,13 triliun rupiah (81 juta dolar A.S.) dicuri dari rekening Federal Reserve Bank Sentral Bangladesh melalui malware. Juga menyerang bank-bank di Filipina, Vietnam.

**2018**
- Malware cryptojacking dilepas untuk menambang mata uang kripto di seluruh dunia. Hasil ilegal disalurkan ke Universitas Kim Il Sung.
- Aplikasi Android sarat malware disisipkan di Google Play yang ditujukan pada pembelot Korea Utara dan jurnalis yang meliput rezim itu.
- Upaya untuk mengacaukan sistem TI di Metrolink, Ontario, lembaga transportasi Kanada.

Sumber: ZDNet; Laporan International Institute for Strategic Studies, "The conventional military balance on the Korean Peninsula", 2018

**Pemandangan ibu kota Korea Utara, Pyongyang, tempat tinggal hampir separuh dari "kelompok inti" Korea Utara, atau kelas teristimewa.**

AFP/GETTY IMAGES

**Park Sang-hak, seorang pembelot Korea Utara dan pemimpin kelompok sipil anti-Korea Utara, berbicara saat ia bersiap-siap melepaskan balon berisi selebaran yang mengecam pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di dekat Zona Demiliterisasi di Paju, Korea Selatan, pada Mei 2018.** REUTERS

**Kepemimpinan Korea Utara mungkin lebih khawatir dengan ancaman operasi informasi bersenjatakan kebenaran tentang kebebasan dan demokrasi dibandingkan bom kiloton apa pun atau bahkan ancaman serangan nuklir.**

kategori ini, atau sekitar 6 juta orang. Mereka adalah orang buangan yang dipaksa bekerja di tambang kuno dan bidang kerja keras dan berbahaya lainnya. Sekitar 150.000 sampai 200.000 orang dari kategori ini tinggal di kamp konsentrasi, demikian menurut perkiraan analis.

Sistem pemerintah pada dasarnya mengategorikan setiap penduduk berdasarkan garis keluarga untuk menentukan seberapa jauh risiko politik mereka. Hampir setiap aspek kehidupan orang Korea Utara dari profesi dan pendidikan sampai berapa banyak makanan yang mereka terima ditentukan oleh klasifikasi mereka. Misalnya, selama bencana kelaparan tahun 1990-an dan kekurangan makanan kronis lainnya, rezim ini memangkas jatah makanan bagi penduduk yang tidak diinginkan secara politik, seperti penduduk yang berada di timur laut. Sebanyak 30 persen orang di provinsi Hamgyong Utara meninggal selama bencana kelaparan terburuk pada tahun 1990-an, demikian menurut analis. Mayoritas, atau sekitar 60 persen, pengungsi Korea Utara berasal dari provinsi ini.

Sistem sosial ini diperkuat dengan indoktrinasi berat. Anak Korea Utara bersekolah di taman kanak-kanak, dan hal pertama yang ia pelajari adalah bahwa pemimpin "besar" Kim Il Sung sendirian mengalahkan Jepang dan membawa kebebasan bagi rakyat Korea. Tema populer lainnya adalah bahwa semua masalah berasal dari Amerika Serikat dan bonekanya di Korea Selatan. Selain itu, *Juche*, atau kemandirian, adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti oleh orang Korea di bawah kepemimpinan keluarga Kim.

Metode ini didukung oleh sistem pengawasan dan jaringan mata-mata serta informan yang menjadikan mustahil bagi siapa pun untuk mengungkapkan segala keraguan dalam sistem politik Korea Utara. Eksekusi publik oleh regu penembak, hukuman gantung dan bahkan hukuman bakar di tiang pancang merupakan hal lumrah.

## Kerentanan sosial

Korea Utara sangat sulit ditangani, namun batasan sosialnya yang kaku mungkin merupakan mata rantai terlemah — dan yang paling mudah diserang — di Korea Utara. Kepemimpinan Korea Utara mungkin lebih khawatir dengan ancaman operasi informasi yang bersenjatakan kebenaran tentang kebebasan dan demokrasi dibandingkan bom kiloton apa pun atau bahkan ancaman serangan nuklir.

Dalam negosiasi dengan Korea Utara, mencermati beberapa aspek kebijaksanaan konvensional yang berlaku mungkin berguna. Ratusan tahun perang di Asia Timur Laut telah mengajarkan orang bahwa tidak ada moral atau kehormatan dalam perang. Menipu, berbohong, membodohi, dan mengelabui musuh hanyalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan.

Ketika Tokugawa Ieyasu (1543-1616) bertempur memperebutkan kendali atas Jepang, Toyotomi Hideyori, putra Toyotomi Hideyoshi yang pertama kali mempersatukan Jepang, menjaga kastel Osaka, yang dianggap sebagai benteng yang tak bisa ditembus. Ieyasu mengirim utusan ke Hideyori dan menawarkan perdamaian. Hideyori, yang lelah dengan perang, menerima tawaran tersebut, dan anak buah Ieyasu pun diizinkan mengisi parit. Anak buah Ieyasu menyerang. Hideyori dan ibunya bunuh diri.

Kemudian, Ieyasu membalas kritik atas dirinya yang mengingkari janji ikhtikad baiknya. Ieyasu berkata: "Jenderal mana pun yang cukup bodoh untuk memercayai janji musuhnya layak mati." Ieyasu adalah shogun pertama Jepang, dan keluarganya memerintah selama 260 tahun. □

# AMBISI RUSIA

## Moskow mengeksploitasi pergeseran dalam aliansi Indo-Pasifik untuk merebut kekuasaan

STAF *FORUM*

Fluktuasi dalam hubungan geopolitik dan kemitraan strategis bukan hal baru bagi Indo-Pasifik, dan pada tahun 2018, Rusia bermanuver untuk mengeksploitasi aliansi yang melemah tersebut untuk menunjukkan pengaruh regional.

Beberapa negara menyambut baik hasrat Rusia akan pengaruh yang lebih besar, sementara yang lain memperingatkan bertambahnya persaingan bisa merongrong stabilitas ekonomi dan militer.

"Persaingan demi kekuasaan yang lebih besar — bukan terorisme — kini menjadi fokus utama strategi nasional A.S.," kata Jim Mattis, Menteri Pertahanan A.S. saat itu pada Januari 2018, pernyataannya langsung ditujukan pada meningkatnya keagresifan Rusia di Indo-Pasifik, demikian menurut laporan The Associated Press.

Strategi "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" (FOIP) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dapat mempersulit upaya Rusia untuk membentuk kawasan ini dengan memastikan dipatuhinya norma-norma internasional dan tatanan berbasis aturan.

**Infanteri angkatan laut Rusia, atau Morskoy Pekhoty, menunjukkan keahlian tempur individual mereka selama demonstrasi publik di Taman Nasional Luneta di Manila, Filipina.** REUTERS

Aliansi dan kemitraan yang kuat menciptakan landasan bagi strategi keamanan A.S. Aliansi menyokong stabilitas regional yang telah memungkinkan kawasan Indo-Pasifik berkembang dari segi ekonomi dan politik. Amerika Serikat memiliki kepentingan tersendiri dalam membina hubungan yang memelihara perdamaian dan mendorong pertumbuhan. Demi tujuannya, Amerika Serikat terus membentuk jaringan kemitraan, termasuk mekanisme trilateral dan kuadrilateral berdasarkan kepentingan bersama, untuk memajukan tujuan bersama dalam perekonomian, keamanan dan tata kelola di kawasan tersebut. Namun, ini adalah nilai-nilai yang sering kali tidak sejalan dengan modus operandi Moskow dan Beijing.

"Tiongkok dan Rusia menantang kekuatan, pengaruh dan kepentingan Amerika, mencoba mengikis keamanan dan kemakmuran Amerika," demikian menurut Strategi Keamanan Nasional A.S. "Mereka bertekad membuat perekonomian kurang bebas dan kurang adil, menumbuhkan kekuatan militer mereka, dan mengontrol informasi dan data untuk menekan masyarakat dan memperluas pengaruh mereka."

### MENGAMBIL KESEMPATAN

Presiden Filipina Rodrigo Duterte terus memperluas hubungan negaranya dengan negara lain. Sambil melakukannya, Duterte mendekati Rusia, mengundangnya menjadi pelindung dan sekutu baru Filipina. Duta Besar Rusia untuk Filipina, Igor Anatolyevish Chovaev, mengatakan pada Januari 2018 bahwa Moskow siap memasok senjata canggih untuk Filipina seiring upaya mereka untuk menjadi teman dekat.

"Kami menyambut baik teman-teman dari Rusia. Kapan pun Anda ingin berlabuh di sini untuk hal apa pun, bermain, mengisi ulang persediaan atau mungkin [sebagai] sekutu untuk melindungi kami," kata Duterte kepada Laksamana Muda Eduard Mikhailov, kepala flotilla Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia, pada

**Laksamana Muda Rusia Eduard Mikhailov, kanan, memandu Presiden Filipina Rodrigo Duterte, kedua dari kiri, di atas kapal angkatan laut anti-kapal selam Rusia Admiral Tributs di Manila, Filipina, pada Januari 2017.** AFP/GETTY IMAGES

Januari 2018, demikian menurut situs web Philippines Lifestyle News.

Selain Filipina, Rusia juga menjual senjata ke negara-negara Asia Tenggara - Indonesia dan Burma, demikian laporan surat kabar *Dhaka Tribune* pada April 2018.

Vladimir Putin tanpa mengherankan terpilih kembali dalam pemilu pada Maret 2018, yang memberinya masa jabatan keempat sebagai presiden Rusia sampai tahun 2024. Konfirmasi keberlanjutan kepemimpinannya bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada semakin agresifnya Rusia menjangkau Indo-Pasifik.

"Tindakan Presiden Vladimir Putin di masa lalu jelas menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki hasrat yang semakin besar akan kekuasaan di luar perbatasan Rusia, tetapi juga merasa bahwa Rusia dapat mengisi kekosongan di belahan dunia tempat Amerika Serikat dulu memiliki pengaruh unipolar," tulis *Dhaka Tribune*.

Negara Asia Tenggara lain yang menginginkan lebih banyak partisipasi Rusia adalah Vietnam — yang juga terus memupuk hubungannya dengan A.S. dan Tiongkok.

"Partai, negara, majelis nasional, pemerintah, dan rakyat Vietnam sangat menghargai persahabatan tradisional dan kerja sama yang efisien dengan Rusia dan selalu menganggap penting untuk mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif dengan negara itu — menganggapnya sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri mereka," ujar Sekretaris Umum Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong pada Januari 2018, demikian menurut Viet Nam News.

Hubungan pertahanan antara Rusia dan Vietnam sudah terjalin sejak awal Perang Dingin, sebelum Perang Vietnam. Perjanjian pertahanan yang baru-baru ini diperbarui antara kedua negara ini menjabarkan kegiatan hingga tahun 2020 yang mencakup upaya kerja sama, pertemuan, dan latihan (meski hanya sedikit detail yang telah dirilis). Komando Angkatan Laut Rusia telah menyarankan peluncuran kembali pangkalan logistik marinir untuk kapal perang Rusia, dan mengatakan bahwa titik utama pangkalan akan memberikan dukungan bagi kapal Rusia yang memerangi bajak laut di Samudra Hindia dan Pasifik.

"Rusia dan Vietnam memiliki pandangan yang sama tentang masalah ketertiban dunia dan seruan untuk menghormati hukum internasional, peran sentral PBB, pendekatan kolektif untuk memecahkan masalah dan hanya menggunakan metode damai untuk menyelesaikan segala sengketa," kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Maret 2018 usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, demikian menurut Kantor Berita Rusia.

Rusia dan Vietnam berusaha membentuk "arsitektur kerja sama yang akan memastikan pembangunan berkelanjutan dan memenuhi kepentingan keamanan" dari semua negara Indo-Pasifik, kata Lavrov. "Kerja sama militer dan militer-teknis antara Rusia dan Vietnam sepenuhnya memenuhi kriteria ini."

## KONFLIK YANG BELUM TERSELESAIKAN

Kendati demikian, sengketa yang sedang berlangsung dan kegiatan agresif Rusia sendiri dapat menghambat ambisi Moskow untuk menegaskan pengaruhnya di kawasan yang lebih luas.

Rusia dan Jepang, misalnya, terus berseteru perihal sebuah kepulauan vulkanis yang membentang 1.300 kilometer dari Hokkaido, Jepang, ke Kamchatka, Rusia. Kedua negara mengklaim massa darat di dalam Kepulauan Kuril, di mana Rusia ingin mengontrol landasan udara di pulau Iturup, yang dikenal sebagai Etorofu oleh Jepang.

Lebih dari 2.500 pasukan Rusia menegaskan dominasi selama latihan di Kepulauan Kuril pada April 2018, yang membuat Jepang mengajukan keluhan diplomatik resmi.

"Meningkatkan kehadiran militer di keempat pulau

bertentangan dengan posisi Jepang," kata juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga, demikian menurut news.com.au.

Tentara Soviet merebut kawasan pulau itu pada tahun 1945 setelah Jepang menyetujui ketentuan Deklarasi Potsdam, yang mendikte Jepang untuk menyerah dalam Perang Dunia II. Sengketa wilayah itu telah membuat Jepang dan Rusia tidak dapat mencapai perjanjian damai pasca-Perang Dunia II.

Tank, unit artileri, dan kapal dari Armada Pasifik Rusia berpartisipasi dalam latihan, yang mencakup latihan baku tembak dengan amunisi aktif, demikian menurut stasiun penyiaran Jepang NHK World.

Rusia mengumumkan pada Januari 2018 bahwa mereka bermaksud menempatkan pangkalan pesawat militer di Kepulauan Kuril. Pengumuman itu muncul di tengah pembicaraan diplomatik dengan Jepang untuk meratifikasi perjanjian damai resmi yang mengakhiri Perang Dunia II. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menuduh Rusia bernegosiasi dengan iktikad buruk dan mengancam akan menarik diri dari pembicaraan tersebut.

**Kapal Penjaga Pantai Jepang PS08 Kariba berlayar di lepas pantai Cape Nosappu, Pulau Hokkaido — titik paling timur Jepang. Di latar belakang adalah pulau-pulau yang kepemilikannya dipersengketakan; Jepang mengklaim sebagiannya sebagai Wilayah Utaranya, dan Rusia mengklaim sebagiannya sebagai bagian dari Kepulauan Kuril.** REUTERS

"Membina hubungan yang saling percaya dan saling mengerti antara rakyat kedua negara merupakan langkah penting menuju penyelesaian perjanjian damai," kata Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono pada Maret 2018 menyusul pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, demikian menurut surat kabar *The Japan Times*.

Lebih dalam di Pasifik, Rusia telah mengusik Australia dengan mengirim pesawat pengebom strategis untuk melakukan latihan di perairan netral di lepas pantai Indonesia.

"Ini adalah pengingat bahwa Rusia ada di sini dan ingin menjadi pemain dalam keamanan Pasifik dan akan menggunakan kekuatan militer untuk menunjukkannya," kata Peter Jennings dari Australian Strategic Policy Institute, demikian menurut surat kabar *The Guardian*.

Departemen Pertahanan Australia mengatakan "ada periode singkat peningkatan kesiagaan" pada Desember 2017 ketika pesawat pengebom Rusia melakukan patroli setelah lepas landas dari landasan udara Biak Indonesia, demikian menurut laporan *The Guardian*.

Jennings mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Australia mungkin memiliki kekhawatiran terhadap Rusia yang melakukan operasi pengumpulan intelijen "karena mereka tidak akan datang sejauh ini ke selatan tanpa ingin melihat satu kehadiran sekutu yang signifikan di belahan dunia ini," ujarnya, tulis *The Guardian*.

Surat kabar itu juga mencantumkan serangkaian demonstrasi oleh Rusia untuk memajukan pengaruh di kawasan tersebut. Pada tahun 2016, Rusia melakukan pengiriman rahasia 20 kontainer senjata dan perangkat keras militer ke Fiji, diikuti oleh personel Rusia untuk memberikan pelatihan senjata; pada tahun 2014, Rusia memicu kegelisahan dengan memobilisasi kapal angkatan lautnya ke utara Australia beberapa hari sebelum KTT G20 di Brisbane seiring meningginya ketegangan antara Moskow dan Canberra, menurut *The Guardian*.

Ketegangan antara Rusia dan Australia mendorong pemerintah Australia pada Maret 2018 untuk memperingatkan warga tentang sentimen anti-Barat dan pelecehan yang dapat mereka hadapi jika bepergian ke Rusia.

"Meski pemerintah Australia tidak mengetahui adanya peningkatan kesulitan bagi warga Australia yang bepergian di Rusia pada saat ini, Anda hendaknya mengikuti perkembangan situasi keamanan dan politik secara cermat dan mengikuti kabar terkini saran perjalanan ini," kata Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam sebuah pernyataan. "Tetap waspada, hindari segala protes atau demonstrasi dan hindari berkomentar di depan umum tentang perkembangan politik."

Bulan berikutnya pada bulan April, sebanyak 400 bisnis Australia menjadi korban serangan siber. Australia, Inggris, dan Amerika Serikat menuduh peretas yang didukung pemerintah Rusia menginfeksi router komputer di seluruh dunia dalam kampanye spionase siber yang menargetkan lembaga pemerintah, bisnis, dan operator infrastruktur kritis.

"Kami tahu bahwa mereka berada di balik serangan ini dan itu adalah eskalasi yang sangat penting," ungkap Menteri Keamanan Siber Australia Angus Taylor kepada Australian Broadcasting Corp. "Hal terpenting pada saat ini adalah mengaitkannya. Mengatakan kita tahu dari mana ini berasal, kita bekerja sama dengan para mitra... dan itu perilaku yang tidak dapat diterima." □

# INDIA DAN TIONGKOK
# SALING BERHADAPAN

**Komando Angkatan Laut India berpartisipasi dalam simulasi operasi penyelamatan sandera selama perayaan Hari Angkatan Laut 2017 di Mumbai.**

AFP/GETTY IMAGES

# *Persaingan untuk memperoleh dominasi angkatan laut di kawasan Samudra Hindia*

**DR. DAVID BREWSTER**/AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

India dan Tiongkok dengan cepat muncul sebagai kekuatan utama di Indo-Pasifik. Ketika kekayaan, kekuatan, dan kepentingan mereka meluas, mereka semakin bersentuhan satu sama lain, termasuk di ranah maritim. Bagaimana kedua negara ini hidup rukun bisa menjadi salah satu tantangan strategis utama bagi Indo-Pasifik pada abad ke-21.

Hubungan keamanan antara India dan Tiongkok sangat kompleks. Terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan di antara mereka. Yang tidak kalah penting adalah berkembangnya kehadiran Tiongkok yang di Asia Selatan dan di tempat lain di kawasan Samudra Hindia (Indian Ocean Region - IOR). Di sisi lain, New Delhi menganggap Tiongkok membentuk lingkungan strategis dan menyusun penyelarasan yang dapat digunakan untuk melawan India. Ini menunjukkan beberapa perbedaan besar dalam cara India dan Tiongkok memahami status dan peran mereka di kawasan tersebut.

## PEDOMAN STRATEGIS TIONGKOK

Berkembangnya kepentingan Tiongkok di IOR kemungkinan akan mendorong kehadiran militer yang semakin besar dalam beberapa tahun mendatang. Kepentingan Tiongkok yang paling penting adalah perlindungan rute perdagangannya yang digunakan untuk mengangkut energi dari Timur Tengah dan Afrika. Beijing sangat menyadari bahwa jalur laut ini rentan terhadap ancaman dari musuh negara dan non-negara, terutama di titik keluar masuk rawan yang sempit di Selat Hormuz dan Selat Malaka.

Akan tetapi, Tiongkok memiliki banyak kepentingan lain di IOR, yang mungkin pada akhirnya menjadi pendorong yang lebih penting dari berkembangnya kehadiran militer Tiongkok. Ini termasuk kebutuhan untuk memberikan keamanan bagi warga dan investasi Tiongkok di negara-negara yang tidak stabil dan memiliki kemampuan untuk mengevakuasi warga negara Tiongkok dalam menanggapi krisis lokal. Kepentingan lain termasuk kebutuhan untuk mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, melakukan operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana/pencarian dan penyelamatan dan, secara potensial, keinginan untuk melakukan intervensi terhadap ekstremis kekerasan atau untuk mendukung mitra setempat. Selain itu, pemerintah Tiongkok semakin rentan terhadap tekanan politik domestik yang mungkin memaksanya untuk menanggapi suatu peristiwa ketika hal itu mungkin tidak dilakukan jika tidak terpaksa.

Semua faktor ini mengarahkan Tiongkok untuk mengembangkan kehadiran militer di IOR. Ini dimulai dengan kehadiran angkatan laut semi-permanen di Laut Arab pada tahun 2008, dilanjutkan baru-baru ini dengan pendirian pangkalan militer luar negeri pertama Tiongkok di Jibuti. Yang pasti, kemampuan Tiongkok di kawasan itu terutama difokuskan pada operasi militer masa damai, tetapi ini kemungkinan akan berkembang seiring berjalannya waktu ke arah kemampuan penangkalan di laut dan bahkan pengendalian laut yang lebih besar.

Sebagian besar fokus publik adalah pada angkatan laut Tiongkok, yang bergerak ke strategi dua samudra dengan menyertakan Samudra Hindia sebagai bagian normal dari jangkauan militer Tiongkok. Selain itu, kehadiran pasukan darat Tiongkok di kawasan itu kemungkinan akan tumbuh, termasuk Korps Marinir Tentara Pembebasan Rakyat, yang sekarang sedang dimekarkan menjadi 100.000 prajurit. Seperti yang terjadi di Afrika, Beijing mungkin juga sangat bergantung pada kontraktor keamanan swasta Tiongkok untuk tugas-tugas keamanan lokal.

Berkembangnya kehadiran militer Tiongkok akan membutuhkan perluasan pangkalan di kawasan tersebut, yang kemungkinan mencakup pangkalan angkatan laut dan udara di Pakistan dan mungkin di tempat lain di IOR, seperti Afrika Timur dan Samudra Hindia bagian timur.

Sifat dari banyak hubungan Tiongkok di IOR berubah, termasuk mengembangkan aliansi semi-militer, membangun fasilitas pelabuhan penggunaan ganda untuk kemungkinan digunakan oleh angkatan laut Tiongkok, dan meningkatkan transfer persenjataan Tiongkok ke dalam kawasan tersebut.

## RESPONS INDIA TERHADAP TIONGKOK

Berkembangnya kehadiran Tiongkok di IOR memprovokasi reaksi tajam dari India. India telah lama menyimpan ambisi untuk diakui sebagai kekuatan utama dengan tanggung jawab keamanan khusus di kawasan itu. Banyak orang di New Delhi menganggap India sebagai pemimpin alami Samudra Hindia, setidaknya dalam jangka panjang.

Sejarah kolonial India telah menyebabkan keengganan yang kuat terhadap kehadiran kekuatan besar lainnya di IOR. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, kekhawatiran ini diarahkan pada Angkatan Laut A.S., tetapi sekarang sangat banyak diarahkan ke Tiongkok.

Ambisi India di Samudra Hindia bukan hanya defensif. Ambisi itu juga mencerminkan aspirasi yang lebih luas untuk diakui sebagai kekuatan regional utama, dan secara potensial sebagai kekuatan adikuasa yang berada pada tataran teratas di dunia.

Dinamika Tiongkok-India di Samudra Hindia hanyalah salah satu bagian dari hubungan beragam segi yang menggabungkan unsur-unsur kerja sama, koeksistensi, dan persaingan. Kehadiran Tiongkok di Asia

# INDIA & TIONGKOK

## BERSAING UNTUK MENGONTROL KAWASAN SAMUDRA HINDIA

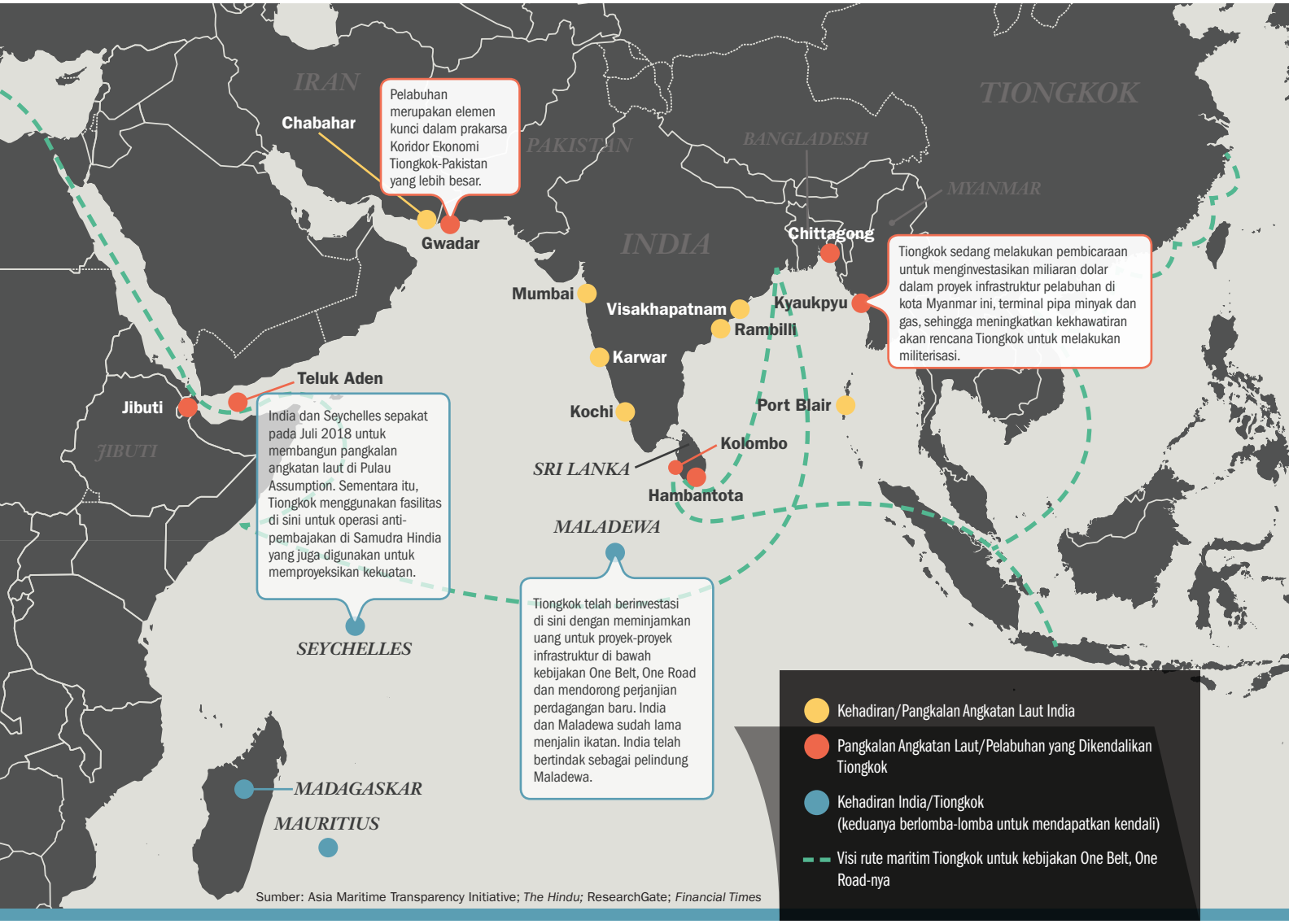


Sumber: Asia Maritime Transparency Initiative; *The Hindu;* ResearchGate; *Financial Times*

*ILUSTRASI* FORUM

Selatan dan IOR yang lebih luas dipandang dengan kecurigaan dan kecemasan. Berkembangnya hubungan Tiongkok dengan berbagai negara di kawasan itu pada umumnya tidak dianggap di New Delhi sebagai refleksi sah dari kepentingan Tiongkok, tetapi sebagai hal yang diarahkan untuk melawan India, untuk mengepung atau menggoyahkannya.

Klaim India atas peran keamanan regional khusus dan pandangannya tentang legitimasi kehadiran Tiongkok menciptakan kondisi subur bagi persaingan antara kedua negara. Ini diperburuk oleh faktor lain: Keinginan India untuk memelihara kerentanan strategis Tiongkok di Samudra Hindia.

Dalam sebagian besar dimensi hubungan strategis antara kedua negara — termasuk persenjataan nuklir, keseimbangan militer konvensional di Himalaya, atau kekuatan ekonomi — India berada dalam posisi tertinggal. Akan tetapi, geografi Samudra Hindia merupakan satu-satunya bidang tempat India memiliki keunggulan militer yang jelas atas Tiongkok.

Strategi India untuk membangun kemampuan angkatan lautnya di dekat titik keluar masuk rawan di Samudra Hindia melibatkan ancaman tersembunyi untuk memblokir rute perdagangan Tiongkok. Beijing khawatir bahwa, jika terjadi konflik antara kedua negara di perbatasan bersama mereka, India dapat

meningkatkan konflik itu ke Samudra Hindia.

Untuk alasan ini, proyeksi kekuatan angkatan laut Tiongkok ke Samudra Hindia telah menjadi sumber kekhawatiran jangka panjang utama Angkatan Laut India dan sekarang menjadi pendorong penting dari meningkatnya hubungan keamanan India dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. India melihat perlunya bekerja sama dengan Washington dan negara-negara lain, seperti Jepang, Australia, dan Prancis, untuk menyeimbangkan atau menunda pertumbuhan kehadiran Tiongkok di Samudra Hindia. India secara aktif membangun jaringan hubungan keamanan regionalnya sendiri dan mendirikan fasilitas di Samudra Hindia, termasuk dengan berbagai mitra, seperti Oman dan Indonesia.

## PERSPEKTIF TIONGKOK MENGENAI PERAN INDIA

Beijing memiliki pandangan yang sangat berbeda dari New Delhi tentang keabsahan kehadiran Tiongkok di IOR. Alasan pertama adalah banyak ahli strategi Tiongkok percaya bahwa India tidak memiliki kekuatan nasional yang komprehensif dan cenderung memberikannya status di bawah kekuatan lain seperti Rusia atau Jepang. Ini kadang-kadang membuat Tiongkok kurang menghormati India dibandingkan dengan kekuatan lain. Ada juga asimetri yang menonjol dalam persepsi ancaman: India cenderung menganggap Tiongkok sebagai ancaman yang signifikan, sedangkan Tiongkok jauh lebih berfokus pada Amerika Serikat.

Beijing juga sangat menolak saran bahwa India memiliki hak untuk membatasi hubungan Tiongkok di IOR atau bahwa India harus diakui memiliki lingkup pengaruh di kawasan tersebut. Tiongkok berpandangan bahwa pihaknya bebas untuk memilih menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga India, seperti Pakistan, Sri Lanka, dan Nepal.

Perbedaan persepsi ini berarti bahwa Beijing kurang memperhatikan kepekaan India tentang hubungan Tiongkok di kawasan tersebut. Misalnya, berkembangnya hubungan militer dan ekonomi Tiongkok dengan Pakistan dianggap tidak penting karena hubungan itu "tidak diarahkan ke India." Tidak satu pun dari hal ini yang menenteramkan hati India.

Beberapa pihak berpendapat bahwa Tiongkok memiliki "kelemahan" strategis dalam memahami perspektif negara-negara tetangganya, terutama dengan India. Keyakinan kuat Tiongkok tentang sejarah negara mereka mungkin menyulitkan Tiongkok untuk memahami posisi negara-negara tetangganya dan meyakinkan mereka tentang berkembangnya kekuatan Tiongkok. Keyakinan ini juga cenderung membuat Tiongkok mengabaikan ketakutan India.

Dinamika negatif ini diperburuk oleh pendekatan Tiongkok terhadap kebijakan Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR) tempat Tiongkok membangun serangkaian proyek infrastruktur di seluruh IOR, banyak di antaranya berada di lingkungan terdekat India. Beijing mengklaim prakarsa ini murni bersifat ekonomi dan mengambil posisi bahwa pihaknya tidak memerlukan India sebagai mitra di kawasan itu. Beijing percaya bahwa mereka tidak perlu menjelaskan prakarsa regionalnya kepada India atau meminta kerja sama India.

Pendekatan ini semakin memicu kecurigaan India terhadap OBOR. Saat ini hanya ada sedikit indikasi bahwa India tertarik untuk bergabung dengan prakarsa OBOR dengan cara apa pun yang signifikan. Secara keseluruhan, tampaknya hanya ada sedikit peluang bahwa India akan menjadi mitra sukarela Tiongkok di IOR dan jauh lebih besar kemungkinannya India akan menentang banyak prakarsa Tiongkok.

## APA ARTINYA BAGI KAWASAN ITU?

Persaingan antara India dan Tiongkok menjadi faktor yang semakin meningkat dalam dinamika politik regional di negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh serta beberapa negara kepulauan di Samudra Hindia, seperti Maladewa.

Beberapa negara berusaha memanfaatkan persaingan itu untuk memperoleh manfaat ekonomi, politik, dan militer dari satu atau kedua belah pihak dengan mengadu domba kedua negara itu satu sama lain untuk menarik lebih banyak investasi dalam proyek infrastruktur besar. Meskipun hal ini dapat membawa keuntungan, bagi negara-negara kecil hal itu juga berpotensi membahayakan.

Persaingan antara Tiongkok dan India dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Selama beberapa tahun terakhir, kontroversi proyek-proyek infrastruktur besar Tiongkok telah berkontribusi pada perubahan pemerintahan di Myanmar dan Sri Lanka. Besar kemungkinan akan ada lebih banyak persaingan keras untuk mendapatkan pengaruh di seluruh kawasan itu dalam beberapa tahun mendatang. Krisis politik yang terjadi di Maladewa pada awal tahun 2018, ketika Presiden Maladewa Abdulla Yameen menentang keputusan Mahkamah Agung untuk mengembalikan kedudukan polisi militer yang menentangnya dan membebaskan tahanan politik, diperburuk oleh persaingan Tiongkok-India, dan masalah ini terus berlangsung.

Secara keseluruhan, nampaknya persaingan strategis akan mengarah pada militerisasi IOR yang lebih besar, karena India merasa perlu untuk menanggapi langkah Tiongkok. Meskipun Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan yang tidak tertandingi di IOR selama beberapa dekade, keadaan ini sedang berubah. Kita melihat munculnya kekuatan-kekuatan besar seperti India dan Tiongkok, serta sejumlah kekuatan menengah baru. Ini akan membuat Samudra Hindia menjadi lingkungan strategis yang lebih multipolar dan kompleks. Hal ini mengharuskan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan mitra baru dan dengan cara baru. □

# SALURAN KOMUNIKASI TERBUKA

## PELAJARAN DARI BENCANA: DIALOG SIPIL-MILITER MENYELAMATKAN JIWA

STAF *FORUM*

Di Indo-Pasifik — kawasan yang paling rawan bencana di dunia — komunikasi yang jelas antara militer, pemerintah sipil, dan lembaga kemanusiaan dapat menyelamatkan ribuan jiwa. Jalan-jalan dibangun kembali. Pasokan bantuan dikirimkan, dan para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal ditampung ketika aset militer melengkapi pekerjaan lembaga kemanusiaan dan pemerintah.

Komitmen untuk dialog sipil-militer "meningkat pesat dalam agenda," ungkap Ken Hume, koordinator hubungan sipil-militer untuk Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah setelah memberikan pidato pada latihan militer Cobra Gold 2018 di Thailand. "Komitmen itu sangat, sangat penting bagi kami. Kami menempatkan lebih banyak sumber daya di dalamnya."

Dialog itu sangat penting di Indo-Pasifik, yang mengalami gempa bumi, tsunami, badai tropis, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi yang memengaruhi jutaan orang setiap tahun, demikian menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan P.B.B. (U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UNOCHA).

Lebih dari 2 juta orang — rata-rata 43.000 per tahun — tewas akibat bencana alam di Indo-Pasifik dari tahun 1970 hingga 2016, demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2016 saja, bencana menyebabkan 5.000 kematian dan kerugian ekonomi sebesar 1,08 kuadriliun rupiah (77 miliar dolar A.S.) di kawasan tersebut. Indo-Pasifik menyumbang 57 persen dari jumlah kematian global akibat bencana alam antara tahun 1970 dan 2016, dan penduduk di kawasan itu lima kali lebih mungkin terkena bencana alam daripada penduduk kawasan lain di dunia ini.

Untuk mengurangi kematian ini dan menanggapi bencana dengan lebih baik, lembaga pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan militer telah membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan koordinasi. Kelompok Konsultatif Regional (Regional Consultative Group - RCG) untuk Koordinasi Kemanusiaan Sipil-Militer bagi Asia dan Pasifik didirikan pada tahun 2014 sebagai forum regional yang menyatukan berbagai elemen ini. Pekerja kemanusiaan juga mengambil peran yang semakin aktif dalam latihan militer.

Cobra Gold merupakan latihan multinasional dan multidinas tahunan yang disponsori secara bersama-sama oleh Angkatan Bersenjata Thailand dan Komando Indo-Pasifik A.S. Cobra Gold 2018 mencakup latihan bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana (humanitarian assistance and disaster response exercise - HADR-X), yang menggabungkan latihan simulasi HADR dan seminar pemimpin senior.

RCG di Indo-Pasifik memfokuskan banyak perencanaan operasionalnya pada lima negara paling rentan, yang juga dikenal sebagai negara-negara prioritas UNOCHA. Kelima negara itu adalah Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Nepal, dan Filipina. Salah satu rekomendasi pertamanya adalah mengembangkan pemahaman bersama tentang praktik tanggap bencana untuk "meningkatkan kemampuan prediksi mekanisme koordinasi sipil-militer, dan fungsi mereka masing-masing, selama tanggap bencana."

Pemahaman bersama ini dapat mempercepat waktu tanggap bencana, menghindari duplikasi upaya, dan menyelamatkan jiwa. "Untuk tanggap bencana di masa damai, kesiapsiagaan adalah kuncinya," ungkap Hume. Melakukan dialog melalui acara-acara seperti latihan Cobra Gold menciptakan pengetahuan bersama, jadi ketika banjir atau gempa bumi terjadi, "kami tahu siapa yang membawa apa ke pihak itu, dan kami saling memahami metodologi satu sama lain — dan hal itu berjalan dengan baik."

Selain mengetahui kemampuan penanggap, para ahli mengatakan bahwa penting untuk menyusun perjanjian kerja sama regional dan internasional sebelum bencana

**Para korban Topan Sidr di Gabtala, Bangladesh, menerima persediaan darurat.**

THE ASSOCIATED PRESS

**Prajurit Nepal menurunkan persediaan bantuan darurat setelah gempa bumi pada Mei 2015.** REUTERS

melanda untuk menghindari penundaan akibat birokrasi. Masalah-masalah termasuk visa, izin bea cukai, dan penerbangan melintasi suatu negara dapat menghambat kemampuan militer asing untuk membawa peralatan penyelamat jiwa atau bahkan sekadar untuk tiba.

Masing-masing dari lima negara yang rentan itu telah mengembangkan rencananya sendiri untuk dialog sipil-militer selama bencana, demikian tulis Viviana De Annuntiis dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan P.B.B. untuk Kawasan Asia dan Pasifik dalam sebuah laporan pada tahun 2018. Rencana itu bertujuan untuk meningkatkan "kecepatan, volume, dan kualitas bantuan penyelamatan jiwa yang diberikan pada tahap awal tanggap bencana dan dengan melengkapi upaya yang dipimpin oleh negara yang terkena dampak."

Tinjauan terhadap sejarah bencana di kelima negara itu menunjukkan perlunya sinkronisasi tanggap bencana.

## TOPAN BANGLADESH

Bangladesh bersiap menghadapi kondisi terburuk pada November 2007 ketika Topan Tropis Sidr melanda negara itu, menewaskan 4.200 orang, dan memaksa evakuasi terhadap 600.000 penduduk. Jumlah korban tewas, meskipun sangat tinggi, menggambarkan "pengurangan signifikan dalam jumlah korban tewas yang dialami di Bangladesh selama empat dekade badai tropis parah," demikian menurut laporan studi kasus yang diterbitkan oleh RCG pada tahun 2017, yang didanai oleh Australian Civil-Military Centre.

Ketika Topan Sidr menghantam Bangladesh pada 15 November 2007, dengan kecepatan angin 260 kilometer per jam, badai itu meluluhlantakkan gubuk, rumah, dan sekolah serta membuat pepohonan berserakan di berbagai penjuru negara itu. Meskipun pejabat setempat menggambarkan kerusakan itu lebih buruk daripada kerusakan yang disebabkan oleh Topan Gorky 1991, korban tewasnya jauh lebih rendah. The Associated Press melaporkan bahwa Topan Gorky menewaskan sekitar 140.000 orang di dekat kota Chittagong, dan Topan Bhola pada 12 November 1970, mengakibatkan korban tewas hingga 500.000 orang.

Jejak yang ditinggalkan Topan Sidr sama seperti jejak para pendahulunya, tetapi kesiapsiagaan telah meningkat. Para pengungsi ditempatkan di 1.800 tempat penampungan pada tahun 2007 dan diberi peralatan darurat yang berisi pakaian, selimut, dan makanan. Militer mendirikan kamp medis untuk melengkapi perawatan kesehatan sipil. Untuk mendukung upaya kemanusiaan, Angkatan Udara Bangladesh mengerahkan 18 helikopter dan mengangkut barang-barang bantuan. Militer juga membersihkan jalan dan memulihkan komunikasi.

Hume mengatakan bahwa dalam tanggap bencana sipil-militer yang terkoordinasi dengan baik, militer datang untuk membantu perbaikan infrastruktur kritis dan kemudian mengurangi tanggap bencananya dengan cepat ketika lembaga-lembaga kemanusiaan dan pemerintah terus menangani masalah perawatan medis, makanan, dan pembangunan kembali. "Militer dapat memberikan dukungan infrastruktur, membuka jalan, membangun jembatan, transportasi," ungkapnya. "Militer dapat memberikan kemampuan kritis."

Setelah terjadinya Topan Sidr, Bangladesh bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membangun 88 sekolah baru

**Seorang pria yang tinggal di daerah pantai Kota Tacloban, Filipina, memperbaiki pintu kayu di tengah tumpukan puing yang ditinggalkan oleh Topan Haiyan.** AFP/ GETTY IMAGES

yang juga berfungsi sebagai tempat perlindungan selama keadaan darurat. Sekolah-sekolah yang didanai oleh A.S. dan dikelola oleh Korps Zeni Angkatan Darat A.S. itu menampung 200 pelajar setiap hari dan mengakomodasi 1.800 orang selama keadaan darurat.

A.S. juga mendanai pembangunan beberapa Pusat Manajemen Krisis Pantai di seluruh Bangladesh. Bangunan-bangunan itu dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi berkekuatan 8,0 skala Richter dan kecepatan angin hingga 260 kilometer per jam.

## INDONESIA: SITUASI GUNUNG BERAPI

Terletak di tiga lempeng tektonik, Indonesia memiliki gunung berapi terbanyak di dunia — 500 — dengan 128 masih aktif, demikian ungkap laporan RCG. Topan, gelombang badai, tanah longsor, banjir, dan kekeringan juga mengganggu negara itu karena lokasinya di sepanjang sabuk topan Pasifik.

Indonesia rata-rata mengalami 20 gempa bumi kecil per hari dan telah mengalami kebakaran hutan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Antara tahun 1975 dan 2015, bencana menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan sekitar 256,93 triliun rupiah (18,3 miliar dolar A.S.). Pada tahun 2016 saja, bencana menewaskan 522 orang dan menyebabkan 3 juta orang mengungsi. Pada tahun 2006, gempa bumi Yogyakarta menewaskan 5.778 orang dan menyebabkan kerugian finansial senilai 43,52 triliun rupiah (3,1 miliar dolar A.S.).

Apa yang diyakini sebagai tsunami paling mematikan dalam sejarah terjadi di lepas pantai Indonesia. Bencana yang disebut tsunami Boxing Day — tsunami yang namanya diambil dari liburan yang dirayakan di beberapa negara pada satu hari setelah Natal — dipicu oleh gempa besar pada 26 Desember 2004, di ujung utara Sumatera. Tsunami itu menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara. Indonesia mengalami dampak terparah dengan lebih dari 130.000 korban tewas, diikuti oleh Sri Lanka, India, dan Thailand.

Oleh karena banyaknya peristiwa bencana, Indonesia telah bekerja keras untuk mengembangkan mekanisme dialog sipil-militer dan mengadopsi mekanisme "khususnya untuk kemampuan militer asing yang masuk semisal terjadi bencana berskala besar," ungkap laporan RCG. Meskipun militer sering kali memainkan peran pendukung pada saat bencana, militer Indonesia beroperasi sebagai penanggap utama. Frekuensi dan skala bencana serta kemampuan militer untuk mengerahkan sumber daya dengan cepat berperan dalam diambilnya keputusan ini.

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menyelesaikan Kerangka Kerja Tanggap Bencana Nasionalnya, yang merupakan dokumen panduan utama negara itu untuk semua pemangku kepentingan dalam tanggap bencana.

## MYANMAR MENYAMBUT BANTUAN

Myanmar sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, gempa bumi, dan topan. Bencana terburuk yang tercatat terjadi pada 2 Mei 2008, ketika Topan Nargis menewaskan sedikitnya 138.000 orang dan menyebabkan kerusakan properti senilai 56,14 triliun rupiah (4 miliar dolar A.S.).

**Pemerintah Bangladesh dan A.S. bekerja bersama-sama untuk membangun tempat perlindungan topan multiguna guna melindungi warga sipil dari badai yang menghancurkan.**
DEPARTEMEN PEMBANGUNAN INTERNASIONAL INGGRIS

**Kantor Komisi Tinggi P.B.B. untuk Pengungsi menyediakan perumahan sementara bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat Topan Haiyan dan juga memasok benih darurat kepada para petani setelah topan itu menghancurkan tanaman mereka.**
AFP/GETTY IMAGES

Meskipun Myanmar telah dikenal dengan sejarah pemerintahan militer dan terbatasnya keterlibatan asing, selama dekade terakhir ini Myanmar telah membuat "transformasi penting dalam koordinasi sipil-militer" dan telah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat kemampuan manajemen bencana, demikian ungkap laporan RCG.

Myanmar sekarang berpartisipasi dalam latihan HADR regional dan mengadakan lokakarya dengan para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan komunikasi sipil-militer.

Myanmar di masa lalu sangat membatasi jumlah aset militer asing yang diizinkan untuk dikerahkan selama bencana, demikian ungkap laporan RCG. Akan tetapi, Myanmar telah membuat pengaturan untuk menerima bantuan dari perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lainnya.

## TANTANGAN BAGI NEPAL

Dengan musim hujan tahunan dan medan pegunungannya, Nepal sering kali mengalami tanah longsor dan banjir. Akan tetapi, bahaya terbesarnya berasal dari lokasinya di perbatasan lempeng tektonik Eurasia dan India, sumber aktivitas seismik yang hebat.

Pelajaran yang dipetik dari tanggap bencana terhadap gempa bumi Gorkha pada 25 April 2015 memberikan masukan bagi rencana tanggap bencana di seluruh kawasan itu. Gempa itu menewaskan hampir 9.000 orang dan melukai sekitar 22.000 orang. Gempa itu memicu tanah longsor di Gunung Everest yang menewaskan 21 orang, menjadikannya hari paling mematikan dalam sejarah gunung itu.

Gempa bumi itu menarik tanggapan internasional yang sangat besar, termasuk aset dari 18 militer asing dan ribuan pekerja kemanusiaan. Hume mengatakan bahwa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah saja mengerahkan 8.000 penanggap di lapangan.

Dalam ulasan mereka mengenai tanggap bencana tersebut, perwakilan Angkatan Darat Nepal dan Komando Indo-Pasifik A.S., yang mengirim personel dan peralatan ke Nepal, membahas keberhasilan pusat koordinasi operasi kemanusiaan-militer (humanitarian-military operations coordination center - HuMOCC), yang merupakan bagian dari strategi koordinasi baru P.B.B.

"HuMOCC merupakan praktik yang muncul dalam koordinasi sipil-militer di P.B.B. secara global serta di Asia dan Pasifik," ungkap laporan RCG. "HuMOCC memfasilitasi pertukaran informasi, pembagian tugas, dan koordinasi perencanaan operasional antara pelaku kemanusiaan dan militer dalam tanggap bencana alam."

Pusat operasi yang dipimpin sipil itu memberikan penilaian untuk perencanaan operasional, termasuk penggunaan militer asing; menawarkan saran tentang tingkat dukungan militer asing yang tepat dan di mana mereka harus dikerahkan; mengidentifikasi tolok ukur kapan harus beralih dari aset militer ke sipil dan kapan harus menarik dan mengerahkan kembali pasukan militer.

**Palang Merah Jerman mempersiapkan kargo untuk dikirim ke Nepal sebagai bagian dari total 60 metrik ton pasokan menyusul gempa bumi pada April 2015.**
THE ASSOCIATED PRESS

## FILIPINA DI TENGAH SITUASI YANG SULIT

Pada 8 November 2013, Topan Super Haiyan (disebut Yolanda di Filipina), badai kategori 5 dan badai tropis terkuat yang pernah melanda daratan, melewati bagian tengah Filipina sehingga mengakibatkan kerusakan parah. Badai itu menewaskan lebih dari 7.300 orang, memengaruhi 12,9 juta orang, dan menyebabkan kerugian sebesar 140,37 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.). Bantuan bencana diberikan oleh 57 negara, termasuk 22 negara yang mengerahkan personel militer.

Dari posisinya yang menguntungkan di Pasifik barat, Filipina dihadapkan pada berbagai bencana alam mulai dari topan hingga tanah longsor dan musim hujan muson. Negara itu rata-rata mengalami sembilan badai tropis setiap tahun.

Dalam sebuah laporan yang disiapkan oleh Pusat Keunggulan Manajemen Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance - CFE-DM) yang berbasis di Hawaii, para ahli yang meninjau tanggap bencana terhadap Haiyan mengembangkan tiga praktik terbaik untuk menyelamatkan jiwa.

1. Sistem peringatan "menyeluruh" yang dipahami secara umum mempersiapkan suatu negara untuk menghadapi krisis. Sistem menyeluruh meliputi pemodelan ilmiah, data, teknologi, dan keahlian peramal.
2. Komitmen bilateral yang dilaksanakan melalui pusat koordinasi multinasional mempromosikan penggunaan sipil terbaik atas aset militer asing.
3. Ketika dikoordinasikan secara erat dengan pemerintah, sektor swasta melipatgandakan lonjakan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelamatan jiwa masyarakat.

Laporan berikutnya yang diterbitkan oleh CFE-DM mengamati bagaimana pelajaran yang dipetik dari Haiyan ini diberlakukan setahun kemudian dengan Topan Hagupit. Studi itu, "Advances in Civil-Military Coordination in Catastrophes: How the Philippines turned lessons learned from super Typhoon Haiyan (Yolanda) into Best Practices for Disaster Preparedness and Response (2015)" (Kemajuan dalam Koordinasi Sipil-Militer dalam Bencana: Bagaimana Filipina mengubah pelajaran yang dipetik dari Topan Super Haiyan (Yolanda) menjadi Praktik Terbaik untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana (2015)) tersedia di https://www.cfe-dmha.org/.

Paul Baker, delegasi Komite Palang Merah Internasional untuk kelompok militer dan bersenjata di Asia Tenggara, mengatakan bahwa sangat penting bagi kerja sama sipil-militer untuk disimulasikan dalam latihan seperti Cobra Gold. Latihan itu merupakan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan bersama ketika peluru tidak terbang di zona konflik. Latihan menyatukan komunitas tanggap bencana guna "membentuk pola pikir masyarakat untuk membantu masyarakat memahami bagaimana kami akan beroperasi ketika semuanya kacau-balau," ungkapnya. □

# THAILAND

## *mengerahkan pasukan pemelihara perdamaian*

STAF *FORUM*

# TANYA JAWAB

## DENGAN LAKSAMANA MUDA NUTTAPONG KETSUMBOON DARI ANGKATAN BERSENJATA THAILAND

Dia menjabat sebagai direktur Pusat Operasi Perdamaian (Peace Operations Center - POC) untuk Angkatan Bersenjata Thailand (Royal Thai Armed Forces - RTARF). Dia berbicara dengan *FORUM* tentang komitmen Thailand terhadap pemeliharaan perdamaian internasional menyusul latihan militer multinasional, Cobra Gold 2018, yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Thailand dan Amerika Serikat.

***Thailand telah menyumbangkan pasukan untuk upaya pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di berbagai tempat seperti Darfur, Haiti, dan Timor-Leste. Bisakah Anda menggambarkan peran POC dalam mempersiapkan pasukan untuk pengerahan ini?***

Pusat Operasi Perdamaian yang didirikan secara unik itu merupakan satu-satunya organisasi di dalam Angkatan Bersenjata Thailand (RTARF) yang diberi mandat untuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasi perdamaian secara holistis. Perannya mencakup berbagai tingkat kerja, mulai dari mewakili Angkatan Bersenjata dalam proses pengambilan keputusan Kabinet untuk kontribusi pasukan pemeliharaan perdamaian Thailand di tingkat antarkementerian hingga merumuskan strategi dan kebijakan pemeliharaan perdamaian di tingkat Kementerian Pertahanan. Pusat operasi mengimplementasikan rencana peningkatan kemampuan pemeliharaan perdamaian, mengoordinasi dan mengelola pengerahan kontingen pemeliharaan perdamaian Thailand, serta mengembangkan dan melaksanakan kursus pelatihan prapengerahan.

Saat mempersiapkan pengerahan pasukan, pusat operasi itu memastikan bahwa pasukan yang dikerahkan ke operasi pemeliharaan perdamaian P.B.B. dipilih, dibuat, dilengkapi, dan dilatih sesuai dengan standar P.B.B.

Untuk pengerahan individu, peran pusat operasi adalah untuk mengimplementasikan sistem persiapan yang disebut "Daftar Panggilan." Proses itu dirancang untuk mengelola pemilihan dan persiapan petugas RTARF untuk menjadi pemelihara perdamaian profesional dan mempekerjakan mereka untuk operasi pemeliharaan perdamaian P.B.B. sesuai dengan bidang spesialisasi mereka.

Untuk pengerahan kolektif atau kontingen, pusat operasi mematuhi Sistem Kesiapan Kemampuan Pemeliharaan Perdamaian (Peacekeeping Capability Readiness System - PCRS) P.B.B. Menurut komitmen Thailand yang dibuat oleh Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-o-cha di KTT pemeliharaan perdamaian P.B.B. pada tahun 2015, tiga unit militer RTARF — kompi insinyur militer horizontal, rumah sakit tingkat II, dan unit pengeboran sumur — sekarang terdaftar di PCRS tingkat II dengan sasaran mencapai pengerahan ke misi P.B.B.

Di bawah sistem PCRS, pusat operasi telah memainkan peran kunci dalam dua tahap. Pada tahap praotorisasi ketika pengerahan kontingen belum dikonfirmasi, pusat operasi memastikan bahwa unit yang terdaftar dalam sistem PCRS dibuat dan dipertahankan untuk kesiapan operasi dan pengerahan tepat waktu. Untuk operasi di luar negeri, pusat operasi bersama dengan markas besar militer diberi wewenang untuk meminta Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk memasok personel bagi pembentukan satuan tugas pemeliharaan perdamaian. Kesinambungan kesiapan unit itu melibatkan pelatihan prapengerahan dan latihan ulang berkala. Saat ini, ada dua unit — rumah sakit tingkat II dan unit pengeboran sumur — yang sedang dipersiapkan.

Pada tahap pengerahan, pusat operasi bekerja sama dengan P.B.B. dan organisasi lain untuk pengaturan yang mencakup memimpin tim pengintaian Thailand ke daerah-daerah misi, membuat dan menyerahkan daftar muatan kargo dan penumpang serta manifes untuk pengaturan perizinan dan transportasi, mengoordinasikan angkutan udara dan laut strategis serta membangun lini dukungan logistik nasional dalam meneruskan pasokan ke unit-unit yang beroperasi di bidang tanggung jawabnya.

# SEKILAS
## PELATIHAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

- **TAHAP 1: Pelatihan untuk memperkuat keterampilan individu.** Ini mencakup pertolongan pertama dasar, komunikasi dalam bahasa misi, keterampilan senjata api, negosiasi, membaca peta dan navigasi.
- **TAHAP 2: Pelatihan pemeliharaan perdamaian P.B.B.** Ini melibatkan pelajaran didaktik yang diadaptasi dari Bahan Pelatihan Prapengerahan Inti (Core Predeployment Training Materials - CPTM) P.B.B. yang mencakup dasar-dasar dan prinsip-prinsip operasi pemeliharaan perdamaian P.B.B., serta nilai-nilai, perilaku, dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi.
- **TAHAP 3: Pelatihan keterampilan teknis dan latihan lapangan.** Tahap ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan keterampilan untuk melakukan tugas khusus mereka. Untuk perwira staf, pelatihan mencakup fungsi elemen-elemen staf di dalam kantor pusat lapangan P.B.B., praktik analisis lingkungan operasional, dan praktik perencanaan komponen dan pengambilan keputusan militer. Pelatihan itu mencapai puncaknya dengan kegiatan table top exercise yang berfokus pada tanggapan staf terhadap berbagai isu seperti perlindungan warga sipil. Untuk para ahli militer yang menjalankan misi, pelatihan itu mencakup keterampilan seperti patroli, pemantauan, dan pengawasan perjanjian, negosiasi, dan pengerahan anggota di pos pengamatan.

### PENERAPAN PELATIHAN PRAPENGERAHAN UNTUK UNIT-UNIT KONTINGEN BIASANYA MELIBATKAN:

- **TAHAP 1 dimulai dengan pelatihan pemeliharaan perdamaian P.B.B.** Kursus ini untuk unit kontingen dan terdiri dari CPTM, materi pelatihan khusus, dan kursus pelatihan penguatan. CPTM merupakan kursus dasar untuk melatih semua pemelihara perdamaian, sementara itu materi pelatihan khusus akan diberikan secara khusus untuk peran yang dimainkan oleh setiap kontingen. Kontingen infanteri, misalnya, membutuhkan pelatihan khusus untuk melindungi warga sipil dan menangani kekerasan seksual terkait konflik. Pelatihan penguatan menekankan aspek-aspek tertentu yang penting untuk kesuksesan.
- **PELATIHAN TAHAP 2 melibatkan pelatihan teknis dan profesional.** Pelatihan itu terkait dengan tugas-tugas khusus yang diharapkan dari sebuah kontingen. Tugas itu bisa berupa patroli atau perlindungan konvoi untuk kontingen infanteri atau konstruksi jalan untuk kontingen teknik dan konstruksi.
- **TAHAP 3 menargetkan pelatihan khusus misi.** Pelatihan itu biasanya dimulai setelah kontingen mengetahui tentang misi dan sektor tempat besar kemungkinan kontingen itu akan dikerahkan. Pelatihan itu didasarkan pada penilaian lingkungan operasional dari pengintaian. Pelatihan dapat mencakup studi negara, latar belakang misi, kepemimpinan misi, dan mandat misi.
- **TAHAP 4 merupakan pelatihan kolektif dan terpadu.** Langkah ini merupakan puncak dari semua jenis pelatihan yang dilakukan sebelumnya dan melibatkan perpaduan latihan pos komando dan latihan lapangan untuk semua personel yang dikerahkan. Latihan itu menyimulasikan unit yang beroperasi di dalam lokasi pengerahan.
- **TAHAP 5 dapat berupa jenis pelatihan apa pun yang akan meningkatkan kemampuan kontingen yang dikerahkan.** Pelatihan itu dapat berupa pelatihan ulang untuk mempertahankan kesiapan operasional unit jika pengerahan ditunda atau ditangguhkan.

***Harap jelaskan tanggung jawab Anda sebagai direktur RTARF POC.***

Tanggung jawab komandan atau direktur terutama ditentukan oleh mandat organisasi yang dipimpinnya. Demikian pula, penting untuk memahami terlebih dahulu misi/mandat pusat operasi. RTARF POC diberikan mandat untuk melakukan empat peran berbeda:

- Sebagai elemen staf pemeliharaan perdamaian, pusat operasi merumuskan strategi dan arahan pemeliharaan perdamaian. Pusat operasi juga membuat rekomendasi untuk kontribusi yang tepat dari pasukan pemeliharaan perdamaian Thailand untuk misi-misi P.B.B. POC merencanakan, mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan pekerjaan pasukan pemeliharaan perdamaian dalam hal menghasilkan satuan tugas, melengkapi unit yang dikerahkan, memastikan mereka dilatih sesuai dengan standar P.B.B., melakukan pengintaian prapengerahan, melaksanakan inspeksi prapengerahan, dan mengoordinasikan pengaturan angkutan strategis yang disediakan P.B.B. POC juga merencanakan dan melaksanakan operasi dukungan logistik nasional dan mempertahankan kesiapan operasional pemelihara perdamaian individu dan kontingen yang terdaftar di PCRS.
- Sebagai pusat pelatihan pemeliharaan perdamaian nasional, POC merumuskan arahan pelatihan pemeliharaan perdamaian untuk kegiatan pelatihan prapengerahan bagi unit dan pemelihara perdamaian individu. Pusat operasi juga mengembangkan dan memberikan kurikulum pelatihan prapengerahan nasional. POC juga menyelenggarakan kursus pelatihan untuk pengerahan individu dan menyelenggarakan simposium pemeliharaan perdamaian.

**Pasukan pemelihara perdamaian dari Thailand membagikan pil vitamin C kepada anak-anak di Darfur barat selama misi P.B.B.**

**Letnan Dr. Vittaya Jiraanankul dari Angkatan Bersenjata Thailand memeriksa seorang anak yang sakit di Darfur barat selama misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.**

- Sebagai elemen komando nasional, pusat operasi memantau kontingen pemeliharaan perdamaian Thailand yang beroperasi di area misi. POC juga melatih komando dan kontrol atas kontingen yang beroperasi di lapangan.
- Sebagai pusat unggulan, POC terlibat dengan komunitas pemeliharaan perdamaian regional dan global untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik. Pusat operasi mengembangkan dan menerbitkan doktrin dan materi pelatihan pemeliharaan perdamaian nasional, dan juga melakukan penelitian akademis.

Karena itu, tanggung jawab saya terutama untuk mengarahkan pusat operasi dalam melakukan tugas-tugas ini dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif.

Yang paling penting, melalui dua wakil direktur, saya harus menjalankan wewenang disiplin dan komando atas empat unit bawahan — divisi rencana dan kebijakan, divisi operasi, divisi pelatihan dan pendidikan, dan bagian administrasi dan dukungan.

***Berikan gambaran luas tentang apa saja yang ada dalam pelatihan operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Peacekeeping Operations - UNPKO).***

RTARF POC menyadari bahwa sebelum terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian, Prajurit dan unit harus melalui persiapan yang tepat untuk misi pemeliharaan perdamaian modern. Mengingat hal itu, pelatihan prapengerahan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa Prajurit dan unit kontingen dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memenuhi tantangan operasi pemeliharaan perdamaian yang terus berkembang dan untuk melakukan fungsi spesialis mereka secara efektif. RTARF POC, bertindak sebagai lembaga pemeliharaan perdamaian nasional,

**Seorang petugas pemelihara perdamaian Thailand melewati sebuah pasar di Buru, Darfur, tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa membuka klinik kesehatan.** AFP/GETTY IMAGES

memiliki tanggung jawab utama untuk mengadopsi kurikulum pelatihan prapengerahan pemeliharaan perdamaian nasional dan menyampaikannya ke Prajurit yang melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian.

Pelatihan pemeliharaan perdamaian RTARF dirancang untuk jenis unit pengerahan dan kontingen tertentu. Kurikulumnya dikembangkan sesuai dengan standar pelatihan P.B.B. sembari mempertimbangkan doktrin dan praktik militer nasional. (Lihat diagram untuk mendapatkan rincian pelatihan di halaman 41.)

### *Siapa yang menerima pelatihan di pusat operasi? Apakah pelatihan itu tersedia untuk pasukan asing dan pasukan Thailand?*

Pelatihan pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh RTARF POC menargetkan pasar yang berbeda. Saya mengelompokkannya dalam empat kelompok utama:

- **Pemelihara perdamaian yang dikerahkan secara individu:** Pusat operasi memberikan dua kursus pelatihan, yaitu Kursus Petugas Staf P.B.B. (U.N. Staff Officer Course - UNSOC) dan Ahli Militer di Misi P.B.B. setiap tahun. Kursus itu menargetkan 40 hingga 45 perwira dari pangkat kapten hingga letnan kolonel yang memenuhi syarat dan dipilih untuk didaftarkan sebelumnya untuk pengerahan dalam satu tahun.
- **Unit kontingen:** Pusat operasi melakukan pelatihan prapengerahan pemeliharaan perdamaian untuk kursus kontingen setiap tahun. Kursus itu dihadiri oleh 40 petugas utama, dan pusat operasi menghasilkan pelatih untuk menyebarkan informasi kursus ke ketiga unit dalam PCRS.
- **Instruktur nasional:** Pusat operasi menghasilkan kader 40 instruktur militer untuk mengajar kursus prapengerahan pemeliharaan perdamaian kepada semua pasukan target. Para pelatih dicalonkan oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, unit di PCRS, dan instruktur POC.
- **Peserta pelatihan internasional:** Melalui kemitraan dengan pusat pelatihan pemeliharaan perdamaian di negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), RTARF mensponsori sembilan perwira dari sembilan negara anggota ASEAN untuk mengikuti UNSOC setiap tahun. Pusat operasi sedang mempertimbangkan mencalonkan kursus itu untuk mendapatkan akreditasi P.B.B. paling lambat tahun 2020. Setelah tercapai, tentu saja kursus itu akan dibuka untuk negara-negara di luar ASEAN. Selain UNSOC, pusat operasi, bersama-sama dengan Pusat Pelatihan Pemeliharaan Perdamaian Angkatan

Bersenjata Australia, ikut menyelenggarakan latihan pemeliharaan perdamaian regional PIRAP-JABIRU dua tahun sekali. Latihan itu menawarkan kesempatan partisipasi bagi 50 perwira asing dari lebih dari 22 negara di kawasan Indo-Pasifik.

***Harap jelaskan pentingnya pelatihan budaya yang mengajarkan pasukan untuk menghormati adat istiadat dan nilai-nilai budaya setempat dalam operasi pemeliharaan perdamaian.***

RTARF POC sangat mementingkan penghormatan terhadap keberagaman. Pusat operasi mengakui bahwa operasi pemeliharaan perdamaian melibatkan pemelihara perdamaian dari berbagai latar belakang yang bekerja di lembaga campuran, baik secara budaya maupun kelembagaan. Keberhasilannya membutuhkan penghormatan terhadap penduduk setempat, yang memiliki norma dan tradisi budayanya sendiri. Keberhasilan misi tergantung pada kemampuan masing-masing pemelihara perdamaian untuk menjaga hubungan yang saling menghormati, yang akan membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap misi pemeliharaan perdamaian dan berkontribusi pada keselamatan dan stabilitas di dalam area operasi. Menghormati keragaman dan budaya setempat ditanamkan pada semua personel pemeliharaan perdamaian yang dikerahkan oleh pusat operasi. Menghormati keragaman merupakan salah satu dari tiga nilai inti P.B.B. Dua nilai inti lainnya adalah integritas dan profesionalisme. Gagal mempertahankan nilai-nilai ini akan membahayakan misi. Saya sangat bangga mengatakan bahwa, selama 60 tahun kontribusinya terhadap UNPKO, tidak ada satu pun laporan mengenai pemelihara perdamaian Thailand yang melakukan perbuatan tidak patut atau menganiaya penduduk setempat. Saya yakin bahwa pelatihan keragaman telah memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemelihara perdamaian Thailand. Beberapa bukti keberhasilan ditunjukkan melalui ungkapan penghargaan dari Sekretaris Jenderal P.B.B. saat itu Ban Ki-moon, yang mengatakan dalam sebuah surat resmi kepada Thailand pada tahun 2012, "Batalion Thailand patut mendapatkan pujian dalam menjalankan tugas dan telah membuat dampak yang sangat positif di Darfur Barat. Selain kinerja militer mereka yang kuat, anggota Angkatan Bersenjata Thailand telah bekerja dengan tekad bulat untuk membina hubungan positif dengan rakyat Darfur. Prakarsa batalion itu untuk mendukung masyarakat setempat, khususnya dengan proyek pertanian, sangat dihargai oleh masyarakat."

Menghormati budaya setempat bahkan lebih penting bagi kontingen Thailand yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik. Thailand percaya bahwa ada hubungan yang saling terkait antara perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Perdamaian tidak bisa dicapai begitu saja tanpa keamanan. Selain itu, keamanan dan stabilitas tidak akan ada jika masyarakat tetap kurang berkembang. Perdamaian, keamanan, dan pembangunan harus ditangani dengan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, Thailand, ketika menyumbangkan pasukan ke UNPKO, selalu membawa prakarsa pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan Raja Rama IX untuk membantu penduduk setempat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan memungkinkan masyarakat yang mandiri. Keberhasilan kontingen Thailand telah terlihat jelas dalam banyak misi pemeliharaan perdamaian, Timor-Leste dan Darfur, misalnya, tempat proyek-proyek pertanian yang diperkenalkan kepada masyarakat oleh kontingen Thailand telah meletakkan fondasi bagi masyarakat setempat agar kompeten dalam mencari nafkah, mengembangkan ekonomi mereka, dan menjadi mandiri. Keberhasilan ini tidak mungkin terjadi tanpa pelatihan budaya.

> ***"Menghormati keragaman merupakan salah satu dari tiga nilai inti P.B.B. Dua nilai inti lainnya adalah integritas dan profesionalisme. Gagal mempertahankan nilai-nilai ini akan membahayakan misi."***

***Berbicara mengenai budaya, seberapa pentingkah melatih laki-laki dan perempuan untuk operasi pemeliharaan perdamaian?***

Jujur saja, Thailand telah lama memiliki budaya masyarakat yang dipimpin pria. Dari zaman kuno hingga saat ini, laki-laki memainkan peran utama di hampir setiap masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam komunitas pemeliharaan perdamaian ketika mayoritas pemelihara perdamaian di seluruh dunia adalah laki-laki. Akan tetapi, Thailand menyadari bahwa konflik memengaruhi perempuan secara berbeda dari laki-laki. Perempuan sering kali memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk melindungi diri mereka sendiri dan, dengan anak-anak, sering kali menjadi bagian besar dari masyarakat pengungsi dan terusir. Taktik perang seperti kekerasan seksual secara khusus menargetkan mereka. Perempuan dan anak perempuan sering kali diculik dan diperkosa serta digunakan sebagai budak seks. Perempuan dan anak perempuan yang diculik mungkin ditolak oleh keluarga mereka dan mungkin merasa sulit untuk menemukan pasangan hidup setelah konflik berakhir. Dalam situasi ini, kebutuhan untuk membangun hubungan baik dengan penduduk setempat

sangat penting — tidak hanya untuk pengumpulan intelijen tetapi juga untuk menerapkan sistem peringatan dini, melakukan pengembangan kemampuan, dan membangun kepercayaan. Akan tetapi, karena perempuan dan anak-anak merupakan korban utama kekerasan dalam konflik semacam itu, khususnya kekerasan seksual, sering kali Prajurit laki-laki mengalami kesulitan untuk melintasi batas sosial dan budaya untuk membangun kepercayaan ini. Di sinilah pemelihara perdamaian perempuan dapat mengisi kesenjangan dengan memberikan rasa aman yang lebih besar kepada kaum perempuan dan anak-anak dan mampu menumbuhkan kepercayaan mereka serta mengumpulkan informasi berharga untuk misi itu. Dalam mempersiapkan kontribusi untuk UNPKO, RTARF POC mengakui peran penting pemelihara perdamaian perempuan dan menyertakan perspektif gender dalam setiap upaya. Dalam rangka mendukung Resolusi Dewan Keamanan P.B.B. 1325 (2000), RTARF menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemelihara perdamaian perempuan yang dikerahkan secara individu untuk mencapai hingga 15 persen dari pasukan pemeliharaan perdamaian yang dikerahkan. Angkatan Bersenjata juga terlibat secara aktif dengan komunitas internasional untuk menyuarakan dukungan bagi upaya global dalam agenda ini. Pada November 2017, wakil kepala staf RTARF yang mewakili menteri pertahanan memimpin delegasi Thailand untuk menghadiri pertemuan pemeliharaan perdamaian P.B.B. di Vancouver, British Columbia. Di sana, dia membahas agenda Angkatan Bersenjata untuk meningkatkan partisipasi perwira perempuan Thailand di UNPKO. Pada Januari 2018, dia mengadakan dialog dengan Senator Kanada Marilou McPhedran di Bangkok guna menegaskan kembali strategi RTARF yang memberdayakan pemelihara perdamaian perempuan. Selain pemberdayaan pemelihara perdamaian perempuan, POC berkomitmen untuk memastikan bahwa pelatihan prapengerahan yang diberikan kepada pasukan laki-laki dan perempuan membahas perspektif gender dan kekerasan seksual terkait konflik, eksploitasi seksual, dan penganiayaan. Pelatihan itu membahas secara lebih lanjut peran penting dari

**Komandan Pasukan Internasional di Timor Timur Mayjen Peter Cosgrove, kanan, memberi hormat pada Prajurit Thailand ketika dia tiba di kota Baucau dalam misi pemeliharaan perdamaian P.B.B. pada Februari 2000.** REUTERS

## KONTRIBUSI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN THAILAND*

**1991**
**Zona demiliterisasi Kuwait/Irak:** tujuh perwira
**Irak:** 50 Prajurit

**1992**
**Kamboja:** 705 insinyur militer

**1998**
**Sierra Leone:** lima Prajurit

**1999 / 2000-2002**
**Timor-Leste:** 1.581 Prajurit (1999)
**Timor-Leste:** 925 Prajurit (2000-2002)

**2010**
**Darfur, Sudan:** 800 Prajurit

*Thailand mempertahankan keberadaan dalam jumlah kecil di misi-misi P.B.B. lainnya.
Sumber: www.providingforpeacekeeping.org

**Pemelihara perdamaian Thailand yang berpartisipasi dalam misi P.B.B. di Burundi pada Desember 2005 bersiap untuk meledakkan amunisi di pinggiran Bujumbura.** THE ASSOCIATED PRESS

pemelihara perdamaian perempuan seperti yang disebutkan sebelumnya.

***Bagaimana berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian memengaruhi efektivitas operasional dan kemampuan militer Thailand secara keseluruhan?***

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin, pada awalnya, mengklarifikasi bahwa Thailand merupakan negara cinta damai berukuran sedang. Agenda tertinggi Angkatan Bersenjatanya adalah untuk mempertahankan negara dan menjaga kedaulatan, wilayah, integritas, dan kepentingan nasionalnya dari ancaman internal dan eksternal, sehingga persiapan dan dukungan pasukan militer yang kredibel dalam pertempuran sangat penting. Tetapi ketika menyangkut masalah konflik, kami percaya akan penyelesaian sengketa secara damai ketika penyelesaian politik harus memimpin upaya tersebut sementara itu solusi militer harus menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks perdamaian global, Angkatan Bersenjata percaya pada pendekatan kolektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian dan untuk mewujudkan perdamaian dengan cara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian, atau penyelesaian sengketa internasional . Pendekatan itu harus diambil oleh organisasi yang wewenangnya secara umum dihormati, khususnya P.B.B. Thailand sadar bahwa konflik yang timbul di satu kawasan tidak lagi mudah dibendung. Dampak buruknya secara tidak terhindarkan akan menyebar ke kawasan atau benua lain. Contohnya bisa dilihat pada konflik di Suriah dan Libia. Thailand secara lebih lanjut percaya bahwa membuat dunia ini damai merupakan solusi terbaik dalam mempertahankan kerajaan ini.

Selain itu, Thailand, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertekad untuk mendukung P.B.B. dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Dengan demikian, RTARF menganggap kontribusi dinas militernya pada UNPKO sebagai agenda intrinsik dari strategi militernya dalam mencegah ancaman terhadap kerajaan. Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata membangun, melatih, dan mempertahankan kemampuan pemeliharaan perdamaiannya sesuai dengan strategi militernya. Kontribusinya dibuat sesuai dengan kemampuan militernya. Ini berarti partisipasi Thailand dalam UNPKO tidak akan memiliki dampak buruk pada kemampuan militer secara keseluruhan. Apabila terjadi krisis yang membutuhkan tingkat pasukan yang lebih tinggi, RTARF juga memiliki sistem yang efektif untuk memobilisasi dan melatih pasukan cadangan.

RTARF tetap berkomitmen secara aktif untuk mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Dari dulu sampai sekarang, RTARF, dalam pelayanan perdamaian, telah menyumbangkan kontingen militer, sumber daya, dan pelayanannya untuk lebih dari 20 misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia dengan empat dari 20 misi ini masih aktif. Misi yang masih aktif ini adalah Misi Hibrida Uni Afrika-Perserikatan Bangsa-Bangsa di Darfur, Misi P.B.B. di Sudan Selatan, dan Grup Pengamat Militer P.B.B. di India dan Pakistan. Selain itu, Angkatan Bersenjata sedang dalam proses menyumbangkan kompi insinyur militer horizontal dengan kekuatan 273 prajurit ke Sudan Selatan, dengan pengerahan yang dijadwalkan pada Juli 2018.

RTARF bertekad mengintensifkan upayanya guna mendukung P.B.B. dalam pemeliharaan perdamaian internasional untuk membuat dunia lebih aman dan lebih damai. □

# MEMAJUKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

## PENDEKATAN MULTILATERAL NEPAL USAI DILANDA DUA GEMPA BESAR

**JENDERAL PURNA CHANDRA THAPA**/ANGKATAN DARAT NEPAL
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

**Dua gempa bumi besar di Nepal menghancurkan lebih dari 600.000 rumah pada April dan Mei 2015, termasuk rumah-rumah di desa Kerauja yang terpencil di distrik Gorkha.**

Di dunia dewasa ini, dengan inovasi teknologi yang berkembang dengan cepat dan perubahan iklim, infrastruktur kritis dan struktur sosial lebih terancam oleh bencana alam dan ulah manusia. Bencana selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Dunia menyaksikan lebih banyak bencana alam daripada sebelumnya dalam segi frekuensi dan intensitasnya. Penduduk kawasan Indo-Pasifik lima kali lebih rentan terkena bencana alam daripada penduduk di kawasan lain. Indo-Pasifik, tempat tinggal bagi lebih dari 61 persen penduduk dunia, telah menyumbangkan 57 persen kematian secara global akibat bencana alam sejak tahun 1970.

Akan tetapi, tidak ada satu entitas, sektor, atau pasukan yang dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan besar yang dapat berdampak pada kehidupan manusia dan menimbulkan penderitaan yang parah. Kolaborasi dan kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan yang terstruktur dalam pendekatan multilateral merupakan pilihan utama untuk meminimalkan risiko dalam peristiwa bencana yang kompleks.

### RISIKO NEPAL

Nepal merupakan negara yang paling rentan bencana ke-20 di dunia, dan dalam hal kerentanan seismik, Nepal menempati peringkat ke-11 sebagai negara paling berisiko di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Nepal menghadapi setidaknya tiga jenis bencana: gempa bumi Gorkha besar pada tahun 2015, banjir di dataran Selatan pada tahun 2017, dan kecelakaan pesawat U.S.-Bangla Airlines pada tahun 2018. Segera setelah terjadinya gempa berkekuatan 7,8 dan 7,5 skala Richter yang melanda kawasan Gorkha pada April dan Mei 2015, pendekatan dan keterlibatan multilateral dengan mitra internasional merupakan faktor kunci untuk memulihkan keadaan normal. Dalam bencana banjir tahun 2017 dan kecelakaan pesawat U.S.-Bangla Airlines tahun 2018, warga dan pasukan pemerintah Nepal — khususnya, Angkatan Darat Nepal — merupakan penanggap utama dalam mengatasi krisis setelah banjir menewaskan lebih dari 140 orang dan membuat 460.000 orang mengungsi, dan kecelakaan di bandara Kathmandu menewaskan 51 penumpang.

Akan tetapi, pendekatan unilateral untuk mengatasi bencana besar mungkin tidak selalu mencukupi. Alih-alih, situasinya mungkin mengharuskan suatu negara memilih kerangka kerja multilateral untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana seperti yang dilakukan Nepal menyusul gempa besar Gorkha yang menewaskan hampir 9.000 orang, melukai lebih dari 20.000 orang, dan menghancurkan 600.000 rumah, membuat lebih dari 650.000 keluarga mengungsi.

Nepal merupakan pihak dari berbagai kerangka kerja multilateral seperti Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (2015-2030) dan Kerangka Kerja Aksi Hyogo (2005-2015). Konsorsium Pengurangan Risiko Nasional dan lima Program Unggulannya, meskipun bukan pendekatan multilateral, merupakan platform untuk pengurangan risiko bencana yang didukung oleh para pemangku kepentingan internasional seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan lembaga donor. Undang-Undang Pengelolaan dan Penanggulangan Risiko Bencana yang baru saja disahkan serta Kerangka Kerja Tanggap Bencana Nasional menawarkan cara untuk meminta bantuan asing ketika suatu negara dilanda bencana. Kerangka kerja tersebut menyediakan Pusat Koordinasi Militer

Multi-Nasional (Multi-National Military Coordination Center - MNMCC) sebagai platform koordinasi dalam Angkatan Darat Nepal tempat aset militer dan pertahanan sipil (military and civil defense asset - MCDA) asing dapat melapor untuk memberikan bantuan.

Nepal juga merupakan negara anggota Tim Augmentasi Perencanaan Multinasional (Multinational Planning Augmentation Team - MPAT), sebuah upaya kerja sama di antara 31 negara yang memiliki kepentingan Indo-Pasifik, yang bertujuan untuk meningkatkan respons militer multinasional selama krisis. Dengan menggunakan platform ini sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana kami, Angkatan Darat Nepal menyelenggarakan beberapa latihan melalui kolaborasi dengan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Fitur penting adalah kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ternyata bermanfaat saat bencana benar-benar terjadi. Ini terbukti selama gempa bumi besar ketika tingkat kerja sama yang tinggi antarlembaga multinasional dan pembentukan MNMCC dengan segera dipastikan karena kebijakan yang efektif dan berbagai seminar yang diselenggarakan di masa lalu.

## KISAH SUKSES MULTILATERAL

MNMCC merupakan salah satu platform luar biasa yang membantu mengintegrasikan dukungan multilateral. Dalam beberapa jam setelah bencana dan permohonan pemerintah untuk mendapatkan bantuan asing, Angkatan Darat Nepal membentuk MNMCC. Secara total, 34 negara yang bertindak melalui 18 entitas militer dan 16 entitas nonmiliter terlibat dalam MNMCC usai gempa bumi Gorkha 2015. Meskipun ini adalah pertama kalinya Angkatan Darat Nepal mendapatkan dukungan multilateral terintegrasi, pengalaman sebelumnya dari latihan simulasi MPAT membantu untuk membentuk MNMCC dengan cepat serta memobilisasi dan mengoordinasikan secara sistematis MCDA yang tiba di Nepal. Model Pusat Koordinasi Multinasional dari Prosedur Operasi Kerja Pasukan Multinasional digunakan sebagai referensi untuk membentuk MNMCC.

Manajemen bandara dan penerbangan yang masuk merupakan tugas yang sangat besar karena terbatasnya kemampuan fasilitas dan masuknya bantuan dan bahan bantuan berskala besar dari mitra internasional Nepal. Agar manajemen bandara dapat dilaksanakan secara memadai dan aliran bahan bantuan mengalir dengan lancar, dibentuk tim manajemen bandara dan pusat penerimaan dan keberangkatan khusus yang terpisah sebagai bagian dari MNMCC di bandara.

Setiap tim yang melapor ke pusat itu diberi pangkalan sementara dan dihubungkan dengan MNMCC tempat mereka dimobilisasi berdasarkan kemampuan

**Prajurit dan penduduk desa India dan Nepal menurunkan pasokan bantuan dari helikopter Angkatan Udara India di desa Barpak di bagian utara Nepal tengah pada April 2015, sembilan hari setelah gempa bumi besar pertama melanda.**

dan spesialisasi mereka, sumber daya yang tersedia, permintaan personel dan situasional. Seorang petugas penghubung Nepal ditugaskan pada setiap tim asing, dan seorang petugas penghubung dari masing-masing tim asing diwakili dalam MNMCC untuk perencanaan dan pembagian informasi bersama. Sinkronisasi dan interoperabilitas merupakan tantangan utama untuk menghindari duplikasi upaya dan meningkatkan efektivitas upaya bantuan.

Pusat operasi penerbangan bersama di Bandara Internasional Tribhuwan dan pusat komando medis ditempatkan di lokasi yang sama dan dihubungkan ke MNMCC melalui sel penghubung udara dan sel operasi medis. Koordinasi dan kolaborasi sipil militer dengan aktor kemanusiaan dan mitra sipil yang lebih besar merupakan aspek penting lain dari MNMCC untuk membantu memperlancar dukungan multilateral. MNMCC memikul beban respons itu secara kolektif. Pencarian dan penyelamatan, dukungan medis, transportasi udara, pembersihan puing-puing, dan pengendalian epidemi merupakan bidang utama tempat aktor multinasional menawarkan dukungan. Bantuan dari MCDA dihentikan karena permintaan penyelamatan dan bantuan dapat ditangani oleh sumber daya yang dimiliki Nepal.

Secara keseluruhan, kerangka kerja multilateral untuk gempa bumi Gorkha merupakan faktor penting dalam menanggapi bencana. Meskipun warga dan lembaga keamanan Nepal bertindak sebagai penanggap pertama, upaya unilateral tidak cukup untuk menanggapi tingkat kehancuran tersebut, yang membutuhkan sumber daya dan bahan bantuan berskala besar. Pembentukan MNMCC merupakan aspek utama dalam menerapkan pendekatan multilateral selama gempa bumi Gorkha pada 25 April 2015.

## PERSIAPAN DI MASA DEPAN

Meskipun demikian, tingkat kesiapsiagaan, penyusunan program kesadaran masyarakat, dan perencanaan yang tinggi diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di masa depan.

Dalam setiap krisis atau bencana, masyarakat menjadi penanggap pertama. Oleh karena itu, program kesadaran warga harus menjadi bagian dari setiap program kesiapsiagaan. Program ini juga membantu membangun kemampuan nasional. Selama banjir di dataran selatan Nepal, masyarakat dan pihak berwenang setempat menanggapi dan mengerahkan upaya penyelamatan dan bantuan. Setelah kecelakaan pesawat U.S.-Bangla Airlines pada Maret 2018 di Bandara Internasional Tribhuwan, pasukan siaga dari berbagai lembaga pemerintah segera memberikan tanggapan sehingga meminimalkan kerugian. Pelatihan bersama yang berkesinambungan antara pemerintah dan lembaga keamanan diperlukan untuk memberikan tanggapan dalam insiden semacam itu, dan pelatihan harus diperkuat untuk memastikan interoperabilitas. Oleh karena itu, mekanisme kesiapsiagaan harus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan nasional dan mengurangi ketergantungan pada mitra asing.

Untuk berkoordinasi dengan negara-negara sahabat dan pemangku kepentingan nasional dan internasional, banyak latihan simulasi telah diselenggarakan. Beberapa contohnya adalah Latihan dan Pertukaran Tanggap Bencana, MPAT Tempest Express, dan kegiatan Table Top Exercise. Keterlibatan ini membantu menguji prinsip-prinsip koordinasi sipil-militer, menciptakan sinergi, memahami modalitas, dan menyinkronkan upaya untuk mendukung manajemen bencana dan rencana tanggap darurat. Hasilnya dapat dibingkai dalam bentuk prosedur atau pedoman operasi kerja untuk koordinasi dan komunikasi.

Pedoman Oslo, yang telah berkembang sejak tahun 1992, membahas penggunaan MCDA setelah keadaan darurat alami, teknologi, atau lingkungan selama masa damai. Pedoman itu menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas lembaga multinasional dan MCDA dalam operasi bantuan bencana besar. Ketaatan terhadap pedoman ini juga memudahkan proses mengintegrasikan dukungan multilateral. Selain itu, diperlukan strategi yang lebih luas untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah untuk mendirikan pusat koordinasi operasi militer kemanusiaan atau pusat koordinasi bersama dan memformalkan serta mengimplementasikan prosedur untuk memobilisasi para ahli, tenaga kerja terampil, dan bahan bantuan. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman harus dilakukan.

Negara tersebut harus menetapkan infrastruktur untuk menyimpan bahan-bahan bantuan sebelum atau selama keadaan darurat. Penyimpanan sumber daya penting dapat mengurangi tekanan segera setelah terjadinya bencana. Untuk kelancaran aliran bahan-bahan bantuan dari lembaga multinasional, pelatihan bersama dapat mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk komunikasi dan pengendalian lalu lintas udara dan darat.

Skala bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerentanan kawasan terhadap bencana mengharuskan negara seperti Nepal untuk waspada dan siap menghadapi keadaan darurat. Pendekatan multilateral untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut memastikan pembagian upaya, peningkatan tenaga kerja terampil, peningkatan sinergi, dan memberikan upaya penyelamatan dan bantuan segera ke daerah yang terkena dampak. Pendekatan multilateral mengoptimalkan sumber daya, mencegah duplikasi, memperkuat hubungan, dan mempromosikan koordinasi. Berbagai diskusi, latihan, dan simposium multinasional perlu dilakukan untuk mempersiapkan pendekatan multilateral yang efektif.

Respons multinasional terhadap gempa bumi Gorkha merupakan kesaksian akan efektivitas pendekatan multilateral. Ada banyak pelajaran yang dipetik dari bencana itu, tetapi pelajaran yang menonjol adalah bahwa semua pemangku kepentingan perlu mengatasi berbagai tantangan itu secara multilateral untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan darurat di masa depan. □

# BANGKITNYA

# Perahu-Perahu Kecil

Pengalaman Angkatan Laut Sri Lanka memberikan pelajaran bagi negara-negara maritim untuk memperkuat strategi kontraterorisme

**LETKOL ALEX CARTER**/ANGKATAN DARAT A.S.
DAN KOLONEL DAMIAN FERNANDO/ANGKATAN LAUT SRI LANKA

**Anggota tim penyelamat Angkatan Laut Sri Lanka mencari korban di jalan yang tergenang banjir di sebuah desa di Kalutara pada Mei 2017.** REUTERS

Negara mana pun yang memiliki perbatasan maritim harus memiliki rencana untuk melawan ancaman teroris di dan dari laut sebagai bagian dari strategi kontraterorisme nasional. Strategi apa pun yang tidak memiliki rencana semacam itu untuk melindungi perbatasan maritim pada dasarnya bersifat cacat dan rentan akan bahaya.

Terlalu banyak strategi kontraterorisme yang telah mengabaikan nuansa dan ancaman ranah maritim demi ranah darat yang lebih mudah dan lebih dapat didefinisikan karena kenyamanan, ketidaktahuan, atau keduanya.

Teroris merencanakan dan mengeksekusi serangan terhadap target maritim, sering kali dengan efek yang menghancurkan. Pengalaman Angkatan Laut Sri Lanka dalam memerangi teroris di laut menawarkan wawasan tentang bagaimana angkatan laut, besar dan kecil, dapat meningkatkan keampuhan strategi kontraterorisme mereka dengan menggunakan perahu kecil untuk memerangi ancaman teroris di perairan.

## Penggunaan laut dan taktik pengerumunan

Motivasi dan kemungkinan aksi teroris di laut dapat diukur melalui beberapa faktor. Faktor-faktor ini mencakup tingkat sponsor negara yang dimiliki oleh organisasi teroris, seberapa baik hubungan organisasi itu dengan kelompok-kelompok teroris lainnya, tingkat keterlibatan dalam perdagangan narkoba, dan apakah organisasi teroris itu dapat melakukan operasi di tempat pelindungan yang aman bagi mereka, seperti yang dijelaskan oleh Victor Asal dan Justin Hastings dalam jurnal *Terrorism and Political Violence* edisi tahun 2015. Salah satu atau beberapa faktor ini dapat memotivasi organisasi teroris untuk memulai atau mematangkan strategi maritim mereka guna mencapai sasaran politik melalui kekerasan.

Serangan teroris semacam itu di laut telah terjadi dalam banyak bentuk. Tim berbasis darat dapat menggunakan penyelam terlatih untuk menempatkan bom rakitan di atas kapal, kapal serbu, kapal bunuh diri, dan bahkan ranjau laut. Teknologi pendukung telah berkisar dari perahu cepat, scuba, skuter laut — semuanya biasanya dibantu oleh GPS, demikian menurut laporan pada tahun 2001 yang ditulis oleh analis keamanan Rohan Gunaratna di *Jane's Navy International*. Asal dan Hastings menulis bahwa dalam satu penelitian, 15 kelompok teroris, termasuk Hamas, Al-Qaeda, Kelompok Abu Sayyaf, dan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), melakukan setidaknya satu serangan maritim antara tahun 1998 dan 2005.

Bagi banyak teroris, laut tidak diragukan lagi merupakan tempat yang menarik untuk melakukan kegiatan dan operasi yang mendukung tujuan mereka. Laut dapat berfungsi sebagai arena untuk melakukan serangan terhadap sasaran maritim bernilai tinggi seperti kapal perang, anjungan minyak, atau pelabuhan, demikian menurut Dr. Norman Cigar, yang sekarang bekerja sebagai peneliti di Marine Corps University, Quantico, Virginia. Laut juga dapat berfungsi sebagai jalan pendekatan, lini komunikasi, dan aset ekonomi, seperti yang dijelaskan Cigar dalam monografi pada Mei 2017 berjudul The *Jihadist Maritime Strategy: Waging a Guerrilla War at Sea* (Strategi Maritim Pejuang Jihad: Melancarkan Perang Gerilya di Laut).

Teroris dapat menggunakan laut untuk memindahkan peralatan dan personel secara rutin dari satu lokasi ke lokasi lain. Laut juga dapat digunakan sebagai rute pelarian, memberikan jalan bagi para teroris untuk segera meninggalkan sebuah daerah begitu operasi telah dilakukan di darat. Cigar menjelaskan bahwa secara ekonomi, laut juga dapat dipandang sebagai aset oleh teroris yang dapat mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal seperti operasi penyelundupan berbasis laut, seperti perdagangan manusia, pengiriman minyak ilegal, dan perdagangan terkait minyak lainnya.

Karena kombinasi alasan dan motivasi yang disebutkan tersebut, organisasi teroris, selama bertahun-tahun,

telah melakukan banyak serangan sukses terhadap target maritim bernilai tinggi. Serangan yang paling signifikan adalah serangan Al-Qaeda terhadap kapal USS Cole pada tahun 2000, yang menewaskan 17 Pelaut A.S. Serangan lainnya adalah pada tahun 2002, ketika Al-Qaeda melakukan serangan pertama yang sukses terhadap kapal tangki super komersial milik Prancis, Limburg, menggunakan perahu kecil yang diisi penuh dengan bahan peledak. Serangan itu diluncurkan ketika Limburg berada pada jarak 12 mil laut di lepas pantai Yaman, menewaskan seorang anak buah kapal, melukai 12 orang lainnya, dan menyebabkan tumpahan 90.000 barel minyak mentah di sepanjang lebih dari 72 kilometer garis pantai. Teroris juga menyerang fasilitas angkatan laut Pakistan pada tahun 2009 dan 2011. Sebuah organisasi yang terhubung dengan Al-Qaeda atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) melakukan serangan terhadap kapal angkatan laut Mesir pada tahun 2015.

Akan tetapi, perjuangan pemerintah Sri Lanka melawan LTTE yang menawarkan sumber dokumentasi dan sejarah terkaya mengenai serangan maritim teroris. Pada puncak efektivitas militer LTTE, kelompok itu menghancurkan sekitar sepertiga kapal patroli pantai, kapal patroli samudra, kapal serbu cepat, dan kapal perang Angkatan Laut Sri Lanka, demikian yang dilaporkan *Jane's Navy International*.

Sejak awal, LTTE besar kemungkinan perlu melakukan operasi teroris yang menghancurkan itu di laut karena LTTE "memerlukan jalur komunikasi laut yang aman untuk memasok pasukan mereka dengan peralatan perang modern dan menggunakan ruang manuver terbuka di laut untuk menyerang angkatan bersenjata, pemerintah, dan ekonomi Sri Lanka," tulis Paul Povlock di Small Wars Journal pada September 2011. Operasi terorisme maritim pertama di perairan Sri Lanka terjadi pada tahun 1990 ketika LTTE meluncurkan misi bunuh diri pertamanya terhadap kapal komando pengintaian Angkatan Laut Sri Lanka, Abeetha dan Editharain. Pada tahun 1994, serangan bunuh diri diluncurkan terhadap kapal patroli Angkatan Laut Sri Lanka, demikian yang dilaporkan *Jane's Navy International* pada tahun 2006. Kapal ini, Sagarawardena, merupakan kapal perang kelas sub-pemburu terbesar di Sri Lanka. Pada tahun 1998, LTTE merusak dua kapal Angkatan Laut Sri Lanka, menewaskan lebih dari 50 Prajurit Sri Lanka. Pada tahun 2000, perahu serangan bunuh diri LTTE melakukan tujuh serangan terpisah terhadap kapal Angkatan Laut Sri Lanka, menghancurkan empat kapal serbu cepat dan membunuh atau melukai 13 Pelaut. Pada tahun 2006, perahu serangan bunuh diri LTTE melakukan sembilan serangan, menghancurkan enam perahu patroli pesisir dan pantai dan membunuh atau melukai 58 Pelaut, demikian menurut Kementerian Pertahanan Sri Lanka. Taktik medan perang utama dalam kasus ini adalah penggunaan "pengerumunan," peperangan asimetris yang dirancang untuk membuat target kewalahan. Justin Smith menulis di *Small Wars & Insurgencies* edisi tahun 2011 bahwa perahu bunuh diri LTTE, "sering kali tidak dapat dikenali dan tersembunyi di antara perahu serbu, digunakan dalam serangan perahu bunuh diri dan pengerumunan." Pemahaman tentang taktik pengerumunan memiliki relevansi tertentu dengan angkatan laut lain yang berjuang untuk menghadapi ancaman teroris di laut.

Pengerumunan, menurut sebuah studi dari Rand Corp. pada tahun 2000 berjudul "Swarming and the Future of Conflict" (Pengerumunan dan Masa Depan Konflik), merupakan bentuk pertempuran kuno yang semakin populer di era modern. Organisasi kerumunan biasanya menunjukkan perilaku otonom atau semiotonom, cara terkoordinasi untuk menyerang dari segala arah dengan aliran pasukan atau tembakan berkelanjutan, kemampuan menjaga jarak dan berada di dekat target, dan kemampuan untuk mengganggu kohesi musuh, demikian ungkap studi itu. Kerumunan militer dapat menyerang target dari berbagai arah yang berbeda, dengan sejumlah besar unit kecil yang terhubung dengan baik dari perspektif komunikasi atau jaringan serta dari perspektif geografis atau fisik, demikian menurut studi itu. Studi itu mengungkapkan bahwa seperti kawanan serigala di dunia hewan atau kapal selam U-boat Jerman dan pilot kamikaze Jepang selama Perang Dunia II, kelompok teroris dapat berkerumun di perairan terbuka dan laut lepas dengan datang bersama-sama pada saat dan lokasi yang tepat untuk menimbulkan kerusakan dan kemudian membubarkan diri dengan cepat.

Implikasinya adalah bahwa "militer mungkin perlu mengkaji kembali kemampuan dan doktrin pertempuran jarak dekat mereka," ungkap studi dari Rand Corp. itu. Misalnya, kelompok teroris seperti Hezbollah telah menggunakan taktik pengerumunan untuk menghadapi serangan komando Israel di Libanon selatan. Hal ini mungkin menjelaskan penarikan taktis Israel dari Libanon selatan — ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan praktik pengerumunan musuh-musuhnya.

Pengerumunan merupakan taktik nonkonvensional untuk militer konvensional. Hal ini terutama benar adanya dengan tantangan yang dihadapi angkatan laut di seluruh dunia dalam memerangi ancaman teroris dari laut. Dalam kasus Angkatan Laut Sri Lanka yang menghadapi banyak serangan teroris dari LTTE di laut, Angkatan Laut Sri Lanka berjuang untuk mempelajari cara mengembangkan doktrin dan taktik untuk melawan taktik pengerumunan LTTE. Pengalaman Angkatan Laut Sri Lanka dengan perahu-perahu kecil LTTE dapat memberikan inspirasi kepada angkatan laut lain yang berjuang untuk mengatasi jenis peperangan ini.

## Pengalaman Sri Lanka

Tantangan maritim Sri Lanka sangat besar. Kawasan Asia Selatan "berada pada jalur komunikasi laut yang vital

**Pelaut Sri Lanka menyaksikan kapal perang Samudura memasuki pangkalan angkatan laut Trimcomalee pada September 2007 ketika perang saudara sedang berlangsung.** THE ASSOCIATED PRESS

**Pelaut Sri Lanka melakukan latihan anti-teror sesuai dengan konsep perahu kecil Angkatan Laut Sri Lanka, bagian dari strateginya untuk menghadapi ancaman teroris.**

ANGKATAN LAUT SRI LANKA

tempat sejumlah besar perdagangan, termasuk energi, melakukan perjalanan dari Asia Barat Daya, melalui Selat Malaka, ke kawasan industri Asia," tulis Dr. Cristopher Snedden, seorang profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies pada tahun 2016. Dengan demikian, lokasi strategis Sri Lanka di Samudra Hindia tidak hanya menjadikannya penting bagi kawasan itu tetapi juga bagi perdagangan global, yang sebagian besar mengalir melalui jalur pelayaran tepat di selatan Sri Lanka. Angkatan laut yang kuat sangat penting dalam melindungi kepentingan ekonomi.

Dari perspektif maritim, Perang Falkland pada tahun 1982, antara Inggris dan Argentina, merupakan konflik angkatan laut konvensional terakhir yang diketahui, ketika dua angkatan laut saling bertempur di laut. Di era modern, sebagian besar angkatan laut memiliki pengalaman tempur konvensional yang terbatas dalam memukul mundur dan menghancurkan agresor di laut. Akan tetapi, sejak tahun 1982, Angkatan Laut Sri Lanka merupakan satu-satunya angkatan laut di dunia yang terlibat dalam operasi tempur angkatan laut yang memiliki arti penting di kawasan Indo-Pasifik. Operasi-operasi ini dilakukan untuk melawan ancaman kredibel: LTTE. Selama perang saudara di Sri Lanka, yang dimulai pada tahun 1983, LTTE berjuang untuk menciptakan negara Tamil merdeka bernama Tamil Eelam di bagian utara dan timur pulau Sri Lanka. Pertempuran terjadi di darat dan laut, dengan cara konvensional dan nonkonvensional selama 26 tahun. Akhirnya, pada tahun 2009, pemerintah Sri Lanka mengalahkan Macan Tamil.

Selama masa puncak perang itu, LTTE mengerahkan kemampuan angkatan laut yang cukup besar untuk memerangi Angkatan Laut dan pemerintah Sri Lanka. Armada LTTE terdiri atas 4.000 personel yang bekerja di bidang operasi, logistik, komunikasi, intelijen, dan bagian lainnya. Armada itu memiliki perahu serbu cepat berbahan Fiberglass buatan dalam negeri seperti perahu kelas Thrikka berkapasitas empat orang, perahu kelas Suddai berkapasitas enam orang, perahu kelas Muraj, dan perahu kecil kelas Idayan berkapasitas dua orang yang digunakan untuk serangan bunuh diri terhadap target maritim, demikian yang dijelaskan Povlock di Small Wars Journal. Semua perahu itu, kecuali perahu kecil kelas Idayan, dilengkapi dengan satu atau beberapa senapan mesin berat. Perahu kecil kelas Idayan berisi bahan peledak yang dirancang untuk meledak pada saat menabrak target. Perahu-perahu kecil sengaja digunakan karena beberapa alasan taktis yang bagus.

Perahu-perahu kecil sulit dideteksi oleh sebagian besar sensor — perahu ini bergerak tepat di atas permukaan air dan memiliki berbagai macam bentuk. Selain itu, kemudahan memindahkan satu atau beberapa perahu kecil menciptakan fleksibilitas dalam memilih waktu, tempat, dan mode serangan terhadap platform angkatan laut atau komersial. Selain itu, perahu penangkap ikan yang tidak terlihat mencurigakan, perahu pribadi, perahu pesiar, atau perahu cepat kecil lainnya yang dirancang secara khusus dapat dengan mudah dikonversi menjadi perahu bunuh diri yang mematikan untuk membawa bahan peledak guna menimbulkan kerusakan parah. Perahu kecil memiliki

**Pelaut Angkatan Laut Sri Lanka berpatroli di pantai Dehiwala di dekat Kolombo pada Maret 2009, dua bulan sebelum perang saudara berakhir.** REUTERS

**Prajurit Angkatan Laut berjaga di pelabuhan utama Kolombo di Sri Lanka pada April 2018.** REUTERS

keuntungan karena dapat bermanuver di tempat-tempat kecil dengan kecepatan lambat seperti melewati jalur pelayaran yang bercabang-cabang atau di daerah yang biasanya dilalui oleh sejumlah besar kapal. Perahu kecil yang dimuati bahan peledak berkekuatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang luas di lokasi yang paling tidak nyaman dan pada saat yang paling tidak nyaman.

Perahu kecil merupakan alat bantu pilihan yang sempurna dan mematikan dalam menggunakan taktik pengerumunan yang menghancurkan untuk mencapai efek dahsyat di laut. Perahu kecil yang menyamar sebagai perahu penangkap ikan di daerah padat dapat dengan mudah menyerang kapal dagang. Mayoritas perdagangan global dilakukan di samudra, dan satu serangan semacam itu terhadap kapal tangki minyak atau kimia atau bahkan kapal penumpang atau kapal pesiar akan berdampak besar, baik secara politik maupun ekonomi. Organisasi teroris dapat dengan mudah menggunakan perahu-perahu kecil untuk membahayakan perdagangan maritim internasional Sri Lanka dengan merusak atau menenggelamkan kapal-kapal kontainer besar seperti kapal kelas Triple E milik Maersk di ibu kota dan pelabuhan utama Sri Lanka, Colombo. Armada angkatan laut juga dapat menjadi sasaran perahu-perahu kecil di titik keluar masuk rawan, seperti pintu masuk pelabuhan. Penundaan operasi pelabuhan selama beberapa hari saja, apalagi berminggu-minggu, akan sangat menghancurkan.

Efek yang menghancurkan dari perahu kecil bunuh diri LTTE di laut terhadap Angkatan Laut Sri Lanka mendorong perubahan strategi dan doktrin. Laksamana Madya Wasantha Karannagoda dari Angkatan Laut Sri Lanka mengembangkan pendekatan kreatif yang disebutnya "konsep perahu kecil," berdasarkan peralatan baru dan taktik baru, seperti yang ditulis Smith di *Small Wars & Insurgencies*. Pada hakikatnya, taktik baru itu adalah "mengalahkan gerilyawan dengan taktik gerilya," seperti yang dijelaskan Povlock. Taktik baru sangat dibutuhkan untuk memerangi taktik pengerumunan LTTE yang menggunakan perahu kecil, beberapa di antaranya adalah perahu bunuh diri Idayan. Doktrin Angkatan Laut Sri Lanka berkembang untuk memerangi perahu-perahu serbu kecil LTTE dengan perahu-perahu kecilnya sendiri dalam jumlah yang lebih besar, kerumunan dilawan dengan kerumunan. Konsep perahu kecil digunakan untuk melawan taktik pengerumunan dan bunuh diri LTTE dengan perahu patroli pesisir berkecepatan tinggi dengan persenjataan berat, demikian tulis Smith.

Menurut salah satu penulis yang berpartisipasi dalam operasi tempur melawan LTTE, strategi dan pemikiran Angkatan Laut Sri Lanka di balik konsep perahu kecil sangat dipengaruhi oleh teori yang dikembangkan oleh insinyur Inggris selama Perang Dunia I. Hukum kuadrat Lanchester pada dasarnya menyatakan bahwa rasio korban bervariasi secara berbanding terbalik dengan rasio pasukan. Artinya, pasukan yang melebihi jumlah lawan dapat diperkirakan memperoleh lebih sedikit korban daripada lawan yang lebih lemah. Lanchester juga menunjukkan bahwa kemampuan persenjataan modern yang mampu beroperasi pada jarak jauh mengubah sifat pertempuran secara dramatis, dengan pasukan modern yang lebih kuat menjadi dua kali lipat lebih kuat. Teori dan serangkaian prinsip ini mendukung dengan sepenuhnya inisiasi dan pengerahan unit-unit perahu kecil Angkatan Laut Sri Lanka.

Mulai tahun 2006, Angkatan Laut Sri Lanka merekrut perwira dan Pelaut untuk mengoperasionalkan konsep perahu kecil. Dua jenis unit diciptakan — pertama, Skuadron Perahu Khusus (Special Boat Squadron - SBS) dan kemudian Skuadron Perahu Aksi Cepat (Rapid Action Boat Squadron - RABS). Anggota SBS menjalani pelatihan ekstensif, termasuk beberapa pelatihan lanjutan dari Pasukan Khusus Angkatan Laut A.S. (U.S. Navy Seals), Pasukan Khusus Angkatan Darat A.S. (U.S. Green Berets), dan pasukan komando India, demikian tulis Povlock.

Misi mereka adalah menggunakan perahu kecil untuk melakukan pengintaian dan pengawasan di dalam wilayah LTTE. Anggota RABS dilatih untuk mengoperasikan perahu kecil menggunakan taktik pengerumunan, menggunakan hingga 30 perahu selama pertempuran melawan Macan Laut LTTE. Pada akhirnya pemerintah mampu melumpuhkan kekuatan LTTE; serangan terhadap Angkatan Laut Sri Lanka menurun secara stabil dan kemudian menurun secara tajam dari tahun 2006 hingga 2008. Taktik baru dengan menggunakan perahu kecil itu "menghancurleburkan Macan Laut," demikian menurut Povlock. Faktanya, "elemen penting dari kemenangan pemerintah adalah evolusi strategi interdiksi laut yang sukses oleh Angkatan Laut Sri Lanka (Sri Lanka Navy - SLN)," tulis Smith.

**Laksamana Madya Travis Sinniah dari Angkatan Laut Sri Lanka berbicara kepada jurnalis pada Agustus 2017.**

AFP/GETTY IMAGES

## Langkah ke Depan

Angkatan Laut Sri Lanka terus mengevaluasi dan merencanakan peningkatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perjalanan yang ditempuh Sri Lanka dapat menjadi pelajaran, terutama bagi negara-negara dengan angkatan laut yang sedang berkembang yang menghadapi ancaman tradisional dan nontradisional dari laut.

Angkatan Laut Sri Lanka sengaja memilih untuk menyeimbangkan kembali ukuran dan ruang lingkup armada angkatan lautnya dengan membangun armada perahu kecilnya dan memaksimalkan kemampuan angkatan lautnya. Misalnya, konsep menggabungkan perahu yang lebih kecil dengan perahu yang lebih besar memberi Angkatan Laut Sri Lanka kemampuan yang lebih baik untuk melindungi kapal tradisionalnya, seperti fregat dan kapal perang, sembari memberikan kemampuan pertahanan yang tangguh melalui perahu kecil untuk mengatasi serangan nonkonvensional dari serangan teroris di laut.

Harus ada kesadaran yang lebih besar di dalam komunitas perikanan tentang pentingnya peran mereka di laut. Mereka harus lebih waspada dalam mengidentifikasi dan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan atau ilegal. Kelalaian untuk melakukannya harus mendapatkan konsekuensi nyata berdasarkan supremasi hukum. Pemeriksaan dan akreditasi yang tepat bagi nelayan lokal dan kapal penangkap ikan mereka membatasi banyak kegiatan pasar gelap. Seiring dengan tema serupa tentang kesadaran dan kolaborasi, pendidikan dan koordinasi antara Angkatan Laut, Pasukan Penjaga Pantai, dan kepolisian juga dapat ditingkatkan agar setiap dinas memahami kemampuan pihak lain dan, mungkin, berpartisipasi dalam latihan bersama untuk menguji kemampuan terpadu dan bersama terhadap skenario berbasis ancaman.

Menciptakan lebih banyak peluang untuk melakukan dialog bersama juga merupakan kunci bagi tercapainya keamanan. Sri Lanka mengadakan simposium maritim internasional tahunan yang disebut Galle Dialogue, yang menjadi sarana untuk membahas ancaman teroris maritim. Dari perspektif regional Asia Selatan, topik ini harus menjadi bagian dari agenda pada Konferensi Regional Asia Selatan untuk memberikan kesempatan bagi diskusi yang mengarah pada pengaturan bilateral atau multilateral dan perjanjian pembagian sumber daya.

Sri Lanka, seperti negara-negara berkembang lainnya, memiliki peluang untuk terlibat dengan negara-negara mitra seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan bersama, pendidikan, dan pembagian intelijen guna berkolaborasi melawan ancaman teroris global.

Seperti dikatakan oleh ahli strategi militer Tiongkok kuno, Sun Tzu, "Seni perang mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kemungkinan tidak datangnya musuh, tetapi pada kesiapan kita sendiri untuk menerimanya; bukan karena kemungkinan dia tidak menyerang, tetapi lebih pada kenyataan bahwa kita telah membuat posisi kita tidak dapat diserang."

Strategi kontraterorisme berkembang berdasarkan ancaman yang harus dipertimbangkan pemerintah. Meskipun ranah darat telah menjadi tempat kejadian dari banyak peristiwa teroris di masa lalu, ranah maritim mungkin menerima lebih banyak perhatian dari aktor jahat di masa depan. Pengalaman Angkatan Laut Sri Lanka melawan LTTE di laut harus memperkuat kenyataan bahwa bukan jika, tetapi kapan teroris akan menyerang pelabuhan, bandar, jalur perairan, dan bahkan di samudra terbuka. Penggunaan perahu-perahu kecil, meskipun tidak berteknologi tinggi atau mewah, untuk menghadapi ancaman semacam itu harus dikumandangkan pada negara-negara berkembang yang berjuang keras untuk menemukan cara mengubah ukuran, menyesuaikan kembali, dan menyeimbangkan kembali pasukan angkatan laut mereka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi skenario terburuk. □

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pandangan dan pendapat penulis dan tidak mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Kementerian Pertahanan Sri Lanka atau lembaga pemerintah Amerika Serikat mana pun.

# MENINGKATNYA *Kekuatan Tajam*

REZIM OTORITER TIONGKOK DAN RUSIA SEMAKIN MEMANIPULASI, MENGGERTAK, DAN MENGALIHKAN PERHATIAN UNTUK MEMPROMOSIKAN AGENDA MEREKA DI NEGARA-NEGARA DEMOKRATIS

STAF *FORUM*

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia sedang melancarkan bentuk peperangan informasi baru yang semakin bergantung pada apa yang dikenal sebagai "kekuatan tajam" — sebuah istilah yang diciptakan oleh peneliti Christopher Walker dan Jessica Ludwig dalam laporan yang diterbitkan oleh National Endowment for Democracy pada Desember 2017.

Kedua negara otoriter itu telah menghabiskan miliaran dolar selama dekade terakhir ini untuk memengaruhi negara-negara demokrasi dengan cara yang telah berkembang melampaui konsepsi konvensional kampanye propaganda atau prakarsa pesona. Meskipun sebagian besar negara ingin membentuk citra diri mereka di mata dunia, taktik kedua negara ini bersifat memaksa, demikian yang diungkapkan oleh kedua penulis dalam laporan setebal 156 halaman, "Sharp Power: Rising Authoritarian Influence" (Kekuatan Tajam: Bangkitnya Pengaruh Otoriter), yang diterbitkan oleh yayasan dan kelompok cendekiawan yang berbasis di Washington, D.C.

"Apa yang sampai saat ini kita pahami sebagai 'kekuatan lunak' otoriter lebih tepat dikategorikan sebagai 'kekuatan tajam' yang menusuk, menembus, atau menikam lingkungan politik dan informasi di negara-negara sasaran. Dalam kompetisi baru yang sedang berlangsung antara negara-negara otokratis dan demokratis, teknik 'kekuatan tajam' rezim represif harus dilihat sebagai ujung belati mereka — atau sebagai jarum suntik mereka," tulis Walker dan Ludwig. Walker menjabat sebagai wakil presiden bidang studi dan analisis di yayasan itu; Ludwig, seorang petugas riset dan konferensi.

"Pengaruh otoriter ini pada dasarnya bukan tentang daya tarik atau bahkan persuasi; sebaliknya, pengaruh itu berpusat pada pengalihan perhatian dan manipulasi. Rezim otoriter ambisius ini, yang secara sistematis meredam pluralisme politik dan kebebasan berekspresi di dalam negara mereka, semakin berupaya menerapkan prinsip-

prinsip serupa secara internasional untuk mengamankan kepentingan mereka," tulis kedua penulis itu.

"Kekuatan tajam, penggunaan informasi yang bersifat menipu, merupakan jenis kekuatan keras," demikian yang dijelaskan Joseph Nye dalam analisis laporan yang diterbitkan di *Foreign Affairs* pada Januari 2018. Nye, seorang ilmuwan politik A.S. yang terkemuka, memperkenalkan istilah "kekuatan lunak" kepada dunia dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1990. Meskipun RRT, seperti banyak negara, telah menggunakan budaya, visa, hibah, dan investasi untuk memenangkan hati dan pikiran negara lain, kegiatannya telah menjadi lebih subversif dan pervasif.

Dalam wawancara dengan majalah *The Economist* pada tahun 2017, Marie Brady dari University of Canterbury di Selandia Baru menggambarkan kampanye disinformasi agresif RRT sebagai "pertempuran global baru" untuk "memandu, membeli, atau memaksakan pengaruh politik."

Walker dan Ludwig berpendapat bahwa pemerintah dan masyarakat demokratis harus mengkaji kembali cara mereka merespons taktik kekuatan tajam, terutama mengingat volume, sifat, dan kecepatan informasi yang bergerak online dan melalui media sosial. Mereka berpendapat dalam laporan tersebut bahwa negara-negara demokrasi seharusnya tidak hanya "menginokulasi diri mereka sendiri terhadap pengaruh otoriter yang jahat" tetapi juga "mengambil sikap yang jauh lebih tegas atas nama prinsip-prinsip mereka sendiri."

Kedua penulis menganalisis studi kasus dari kegiatan RRT dan Rusia di Argentina dan Peru di Amerika Selatan dan Polandia dan Slovakia di Eropa Tengah untuk laporan tersebut. Mereka juga meninjau bukti dari cara-cara penuh tipu muslihat yang dilakukan kedua rezim itu untuk menyuntikkan narasi politik mereka ke negara-negara demokrasi lainnya, dari Australia dan Selandia Baru hingga Eropa dan Afrika.

"Jika dipandang secara terpisah, upaya pengaruh otoriter di negara-negara tertentu mungkin tampak tidak berbahaya atau tidak efektif. Akan tetapi, ketika aktivitas Rusia dan Tiongkok yang tampaknya tak berhubungan di seluruh dunia digabungkan secara bersama-sama, gambaran yang jauh lebih mengganggu muncul," demikian yang mereka simpulkan.

## MEMANFAATKAN ASIMETRI

Walker dan Ludwig menjelaskan bahwa meskipun RRT dan Rusia menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua negara itu mengeksploitasi keterbukaan negara-negara demokratis, sambil menutup perbatasan nyata dan virtual mereka sendiri terhadap pengaruh eksternal.

RRT, terutama, menggunakan kekuatan tajam untuk meredam penentangan terhadap presentasi rezim itu

**Sebuah spanduk memperlihatkan seniman Belanda Vincent van Gogh di luar Kedutaan Besar Belanda di Kiev, Ukraina, pada Februari 2016. Para aktivis menuntut agar rakyat Belanda mengabaikan propaganda Rusia menjelang Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa di Belanda. Parlemen Belanda akhirnya menyetujui perjanjian itu pada tahun 2017.**
REUTERS

sendiri, secara efektif memanipulasi dan menyensor penyampaian pesan dan perilaku, demikian tulis kedua penulis itu. "Pemerintah Tiongkok sering kali berupaya menampilkan negara itu sebagai pengaruh asing yang ramah atau contoh sukses pembangunan ekonomi tanpa lembaga politik yang demokratis." Selain itu, "tertanam dalam kampanye Tiongkok untuk mempertahankan dan mempromosikan sistem satu partainya sendiri adalah kritik diam-diam terhadap demokrasi sebagai sistem yang tidak efisien, kacau, dan katalis yang buruk untuk pembangunan ekonomi."

RRT telah menyelewengkan banyak wahana konvensional masyarakat demokratis untuk menyampaikan prakarsa kekuatan tajamnya dan membuat rezim partai tunggal tampak lebih cocok bagi negara-negara demokrasi muda. RRT menggunakan pusat-pusat penelitian yang didanai negara, saluran media, penawaran pelatihan bahasa melalui Institut Konfusiusnya, dan pertukaran orang-ke-orang untuk memikat para politisi, jurnalis, akademisi di negara-negara demokrasi muda di Amerika Latin dan di tempat lain untuk mengubah kebijakan dan memengaruhi konstituensi yang lebih luas. Di Australia, misalnya, entitas Tiongkok telah menyumbangkan dana kepada partai-partai politik, kandidat perorangan, dan universitas, membeli ruang di surat kabar untuk mempromosikan pandangan negara, dan meredam perdebatan di kampus-kampus Australia dengan mengendalikan para pelajar Tiongkok, demikian menurut berbagai laporan berita.

Ironisnya, di dalam sektor masyarakat sipil Tiongkok dan Rusia, hal yang tidak diketahui oleh banyak aktor lokal di negara demokrasi baru, rute semacam itu tertutup bagi warganya. "Upaya-upaya ini merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar dari Moskow dan Beijing untuk masuk ke dalam sistem demokrasi guna menawarkan insentif bagi kerja sama dan menetralkan kritik terhadap rezim otoriter mereka," jelas kedua penulis. Selain itu, mereka menemukan bahwa RRT sering kali menekan sekutu lokal, yang biasanya mencakup populasi imigran Tiongkok yang secara historis dimata-matai oleh RRT agar dapat dikendalikan, untuk membungkam suara dan aktor yang menentang.

Kekuatan tajam "berupaya untuk menembus dan menumbangkan politik, media, dan akademisi, secara diam-diam mempromosikan citra positif negara itu, serta secara keliru menyampaikan dan memutarbalikkan informasi untuk meredam perbedaan pendapat dan perdebatan," demikian yang diuraikan Nye dalam analisisnya di *Foreign Affairs*. "Kekuatan tajam Tiongkok memiliki tiga karakteristik yang mencolok — kekuatan itu bersifat pervasif, menumbuhkembangkan penyensoran mandiri, dan sulit untuk memperoleh bukti kuat bahwa upaya itu merupakan karya pemerintah Tiongkok."

## **LIMA LANGKAH PENYAMPAIAN PESAN UTAMA** UNTUK MELAWAN UPAYA PEMAKSAAN TERHADAP NEGARA-NEGARA DEMOKRASI OLEH REZIM TIONGKOK DAN RUSIA

**ATASI KEKURANGAN INFORMASI TENTANG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT) DAN RUSIA.** Di empat negara demokrasi yang diteliti, informasi mengenai sistem politik Tiongkok dan strategi kebijakan luar negerinya cenderung sangat terbatas. Ada beberapa jurnalis, editor, dan profesional kebijakan yang memiliki pemahaman mendalam tentang RRT dan dapat membagikan pengetahuan mereka kepada seluruh masyarakat mereka. Hal yang sama berlaku untuk Rusia di tempat-tempat seperti Amerika Latin, meskipun pengetahuan tentang Rusia saat ini lebih kuat di Eropa Tengah.

**SINGKAP TABIR PENGARUH OTORITER.** Upaya kekuatan tajam RRT dan Rusia sebagian besar bergantung pada penyamaran — menyamarkan proyek-proyek yang diarahkan oleh negara sebagai karya media komersial atau asosiasi akar rumput, misalnya, atau menggunakan aktor lokal sebagai saluran untuk propaganda asing dan alat bantu manipulasi asing. Untuk menangkal upaya penyesatan ini, pengamat di negara-negara demokrasi harus menyoroti upaya ini dan menganalisisnya secara komprehensif.

**INOKULASI MASYARAKAT DEMOKRATIS TERHADAP PENGARUH OTORITER JAHAT.** Begitu sifat dan teknik upaya pengaruh otoriter terungkap, negara-negara demokrasi harus membangun pertahanan internal mereka. Prakarsa otoriter diarahkan untuk memupuk hubungan dengan elit politik, tokoh berpengaruh, dan penjaga gerbang informasi masyarakat demokratis lainnya. Moskow dan Beijing bertujuan untuk masuk ke dalam sistem demokrasi guna mendapatkan pendukung dan menetralkan kritik terhadap rezim otoriter mereka.

**TEGASKAN KEMBALI DUKUNGAN TERHADAP NILAI-NILAI DAN CITA-CITA DEMOKRASI.** Jika salah satu sasaran kekuatan tajam otoriter adalah untuk melegitimasi bentuk pemerintahan yang tidak liberal, maka sasaran itu hanya efektif jika negara-negara demokrasi dan warganya mengabaikan prinsip-prinsip mereka sendiri. Para pemimpin utama di negara-negara demokrasi harus angkat bicara dengan jelas dan konsisten atas nama cita-cita demokrasi dan meletakkan penanda yang jelas mengenai standar perilaku demokratis yang dapat diterima.

**KONSEPKAN KEMBALI 'KEKUATAN LUNAK.'** Akhirnya, jurnalis, analis kelompok cendekiawan, dan elite kebijakan lainnya perlu mengenali upaya pengaruh otoriter dalam ranah gagasan seperti apa adanya: instrumen "kekuatan tajam" korosif dan subversif yang benar-benar merusak masyarakat demokratis yang dijadikan target. Kosakata konseptual yang telah digunakan sejak berakhirnya Perang Dingin tampaknya tidak lagi memadai untuk menggambarkan situasi kontemporer.

Sumber: Christopher Walker dan Jessica Ludwig, "Sharp Power: Rising Authoritarian Influence," National Endowment for Democracy, Desember 2017

**Lotte Mart di Beijing memajang rak-rak kosong beberapa hari setelah perusahaan Korea Selatan Lotte Group setuju untuk menyediakan lahan di Korea Selatan bagian tenggara untuk sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Lotte Duty Free menuduh serangan siber yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok melumpuhkan situs web belanjanya selama lebih dari enam jam beberapa hari setelah kesepakatan itu ditandatangani.** THE ASSOCIATED PRESS

## PENGGABUNGAN ELEMEN KEUANGAN

Para penulis laporan dari National Endowment for Democracy juga menemukan bahwa negara-negara otoriter menggabungkan pengaruh ekonomi dengan kekuatan tajam untuk mendorong agenda politik mereka. "Tiongkok sangat cerdas dalam hal ini, memberikan tekanan dengan intensitas yang berbeda-beda dan melalui saluran tidak langsung yang tidak selalu terlihat dengan jelas kecuali jika seseorang mengkaji aktivitas bisnis Tiongkok bersama dengan upaya pengaruh Beijing lainnya."

Uang sangat berperan dalam prakarsa kekuatan tajam RRT di seluruh Amerika Latin, demikian menurut Juan Carlos Cardenal, seorang peneliti di Center for the Opening and Development of Latin America yang menulis berbagai bab laporan tentang Amerika Latin. Pada akhir tahun 2016, Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji bahwa Tiongkok akan melatih 10.000 orang Amerika Latin paling lambat tahun 2020. Cardenal menulis bahwa keterlibatan orang-ke-orang seperti pelatihan gratis, program pertukaran, dan beasiswa di Tiongkok telah terbukti sangat efektif dalam memenangkan dukungan kelompok elit regional di Amerika Latin.

RRT menggunakan berbagai jenis pengaruh ekonomi di seluruh dunia, demikian menurut Evan Feigenbaum, seorang peneliti senior di Asia Forum of the Carnegie Endowment for International Peace. RRT menggunakan investasi asing langsungnya untuk membentuk aturan dan norma di negara lain guna mendukung Tiongkok. Di Afrika, RRT pada dasarnya telah memaksa berbagai negara untuk mengonversi utang ke Tiongkok menjadi ekuitas, membeli dan mempekerjakan pekerja Tiongkok, mengadopsi standar teknis dan teknik serta aturan pengadaan Tiongkok, demikian tulis Feigenbaum dalam artikel pada Juli 2017 di situs web yayasan itu.

RRT juga menerapkan tekanan ekonomi dengan membatasi akses ke pasar domestiknya. Misalnya, Tiongkok menutup perusahaan Korea Selatan Lotte Group, pembuat permen karet dan raksasa ritel, setelah perusahaan itu memberikan lahan kepada pemerintah Korea Selatan untuk menempatkan baterai rudal pencegat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Reuters melaporkan bahwa dalam beberapa bulan sejak penandatanganan kesepakatan pertukaran lahan itu pada Februari 2017, regulator Tiongkok menutup sebagian besar dari 112 toko Lotte Mart di Tiongkok atas dugaan pelanggaran peraturan kebakaran.

RRT juga dapat menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman. Pada November 2017, Mongolia mengizinkan Dalai Lama untuk mengunjungi ibu kotanya, Ulaanbaatar. Tiongkok meresponsnya dengan menerapkan biaya lintas perbatasan pada ekspor komoditas Mongolia, demikian menurut Feigenbaum. Kemudian pada Januari 2018, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok berharap Mongolia telah "memetik pelajaran" dan tidak akan mengundang Dalai Lama untuk kembali ke negara itu, demikian yang dilaporkan saluran berita berbahasa Inggris di Mongolia, *The UB Post*.

## TAKTIK RUSIA

Sementara itu, pendekatan Rusia terhadap kekuatan tajam secara lebih langsung berupaya untuk merongrong kesehatan dan kredibilitas negara-negara demokratis.

"Ketika Beijing berusaha untuk meningkatkan profilnya dan memperluas kekuasaannya terutama melalui investasi yang agresif, kooptasi, dan keahlian berdagang yang tidak jujur, Moskow berharap untuk melakukan upaya serupa sebagian besar dengan menjatuhkan musuh-musuh demokrasinya, baik secara penampakan atau secara nyata," demikian yang dijelaskan penulis laporan itu.

Rusia memangsa rasa frustrasi dan sinisme masyarakat

**Para pengunjuk rasa di Jerman mengangkat spanduk di luar gedung kanselir pada Januari 2016 yang bertuliskan, "Hari ini anak saya besok anak Anda," setelah media Rusia menyebarkan kisah palsu tentang tiga pria Muslim yang memerkosa seorang gadis Rusia-Jerman di Berlin untuk memancing kerusuhan politik. Kepolisian Jerman dengan cepat menyanggah kisah itu. Rusia juga telah ikut campur dalam politik dan pemilihan umum di A.S. dan Prancis.** AFP/GETTY IMAGES

setempat untuk memprovokasi keresahan dan kebijakan publik yang korup, demikian menurut Jacek Kucharczyk, presiden Institute of Public Affairs, sebuah kelompok cendekiawan di Polandia. Kucharczyk menulis bab tentang polarisasi politik di Polandia untuk laporan yang diterbitkan oleh National Endowment for Democracy.

Rusia menggunakan taktik serupa dengan yang digunakan RRT untuk melemahkan musuh-musuhnya di komunitas internasional. Kucharczyk mengungkapkan bahwa pemerintah Rusia telah berupaya untuk merongrong dukungan Polandia bagi pemerintah demokratis baru Ukraina dengan terus menghidupkan narasi tentang ketegangan bersejarah di antara kedua negara. Pemerintah Rusia juga berusaha untuk menghancurkan rasa memiliki Polandia dan Slovakia terhadap komunitas Eropa dan trans-Atlantik, serta tata kelola demokratis mereka, demikian menurut laporan itu.

Ada "banyak hubungan erat berbahaya antara narasi politik spesifik yang digunakan oleh populis lokal dan propaganda Rusia, serta upaya yang diperhitungkan oleh RRT untuk menampilkan dirinya sebagai kekuatan ultramodern dan murah hati dengan menonjolkan sistem politik otoriter yang menawarkan inkubator yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi daripada demokrasi liberal," tulis Kucharczyk.

Rusia, bahkan melampaui upaya RRT, telah memperluas media negaranya secara internasional dan penyebaran disinformasi ke negara-negara lain, termasuk upayanya untuk ikut campur dalam pemilihan umum di luar negeri. Kucharczyk menjelaskan bahwa di Polandia, misalnya, situs web pihak ketiga sering kali mengutip berita dari media Rusia, sehingga membuatnya lebih kredibel bagi penduduk setempat, yang kecil kemungkinannya akan memercayai sumber Rusia. Pada saat yang sama, rezim otoriter, dan RRT pada khususnya, membatasi akses warga mereka ke internet dan penggunaan platform media sosial serta menyensor berita dan konten online. Dengan cara ini, kedua rezim itu mengeksploitasi keunggulan globalisasi, tetapi menolak prinsip pertukaran bebas dan terbuka dan transparansi di dalam negara mereka.

Selain itu, penargetan RRT dan Rusia atas negara-negara demokrasi yang baru saja terbentuk, yang lebih rentan, sangat meresahkan, mengingat nilai strategis negara-negara ini terhadap demokrasi, demikian yang disimpulkan Walker dan Ludwig.

Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya harus mengadopsi langkah-langkah dan alat bantu baru yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi untuk melawan RRT dan Rusia dalam kampanye internasional mereka untuk mengendalikan informasi dan gagasan. Kedua penulis mengingatkan bahwa jika "negara-negara demokrasi yang kuat tidak bangkit menghadapi tantangan, mereka akan melepaskan peran kepemimpinan mereka, meninggalkan sekutu mereka, dan mengabaikan keamanan jangka panjang mereka sendiri."

"Jika Rusia dan Tiongkok serta rezim otokratis yang memiliki sumber daya kuat lainnya mempertahankan momentum mereka saat ini di masa mendatang, upaya mereka dapat menimbulkan kerusakan yang parah terhadap integritas negara-negara demokrasi muda. Ini pada gilirannya akan memberikan pukulan telak terhadap tatanan internasional berbasis aturan yang telah menopang keamanan dan kemakmuran global," demikian peringatan yang diberikan oleh kedua penulis itu. □

# EKSPANSI STRATEGIS INDIA DI KEPULAUAN PASIFIK

## Di tengah situasi geopolitik yang terus berubah, negara itu mengalihkan perhatiannya ke Pasifik Selatan

BALAJI CHANDRAMOHAN

Ketika orientasi politik-militer India sedang menyesuaikan diri dengan perubahan orientasi geostrategis Amerika Serikat dari Asia-Pasifik ke Indo-Pasifik, kawasan kepulauan Pasifik akan mendapatkan perhatian lebih strategis dari India.

Pertama-tama, orientasi strategis maritim India ditujukan pada kawasan perbatasan Eurasia, yang tercermin dalam upaya India untuk memberikan arti penting strategis yang lebih besar terhadap daerah pesisir di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas (seperti Teluk Benggala, Laut Arab, dan Laut Cina Selatan) . Kawasan kepulauan Pasifik telah lama diabaikan dalam pemikiran strategis maritim India.

Ini akan berubah. Disposisi maritim India tampaknya membayangkan memiliki komando laut di Indo-Pasifik, selain dari mengamankan kepentingannya di daerah pesisir.

Secara geostrategis, kepulauan Pasifik mendapatkan peningkatan perhatian dari India karena kawasan itu menghubungkan Australasia dengan anak benua Amerika Latin. Lebih lanjut, kawasan itu akan menghadapi peningkatan lalu lintas begitu Kemitraan Trans-Pasifik difinalisasi.

Kepulauan Pasifik merupakan bagian dari Asia-Pasifik yang lebih luas dan sekarang di bawah kawasan Indo-Pasifik yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, dengan perubahan nama Komando Pasifik A.S. menjadi Komando Indo-Pasifik A.S., diharapkan bahwa struktur pasukan India — termasuk orientasi strategis maritimnya —- juga akan berubah dengan menyertakan kepulauan Pasifik dan Pasifik Selatan.

Ketika India memperluas jangkauan maritimnya ke kepulauan Pasifik, kawasan itu merupakan bagian penting dari pemikiran dan ekspansi strategis maritim Tiongkok sebagai bagian dari strategi "rangkaian pulau" yang sering kali disebutkannya. Beijing sebagian besar diuntungkan dari hubungan baik dengan Washington selama Perang Dingin, membuka jalan bagi ekspansi politik-militernya di kepulauan Pasifik (yang dimulai dengan diam-diam pada awal tahun 1980-an).

### KEHADIRAN INDIA DI KEPULAUAN PASIFIK

Kehadiran maritim India di kepulauan Pasifik terbatas, karena Armada Timurnya yang bermarkas di Visakhapatnam, India, beroperasi hingga ke Selat Malaka tetapi tidak sampai ke kepulauan Pasifik. Ini dapat berubah jika India mendapatkan armada lain yang berbasis di kepulauan Andaman dan Nicobar yang memiliki lokasi strategis untuk keterlibatan maritim yang lebih besar. Meskipun tidak diungkapkan secara terbuka, pendekatan ambisius India di Indo-Pasifik sebagaimana dijabarkan oleh Dokumen Strategi Keamanan Maritim Angkatan Laut India 2015 hanya dapat dicapai jika India mendapatkan armada lain di kepulauan Andaman dan Nicobar, yang akan meningkatkan keterlibatan militer India dengan Pasifik Selatan.

Saat ini, India tidak memiliki kehadiran militer permanen di Pasifik. Akan tetapi, secara diplomatis India telah menunjukkan ketertarikan dalam urusan Pasifik Selatan dengan berpartisipasi dalam Forum Kepulauan Pasifik setiap tahun sejak tahun 2002. India juga telah mulai memberikan bantuan asing kepada kepulauan di Pasifik Selatan dengan menawarkan pinjaman lunak untuk proyek-proyek pembangunan.

Aspek di atas mendapat peningkatan perhatian selama KTT kedua Forum Kerja Sama India-Kepulauan Pasifik di Jaipur, India, pada Agustus 2015, yang mendorong batas-batas kebijakan Berpaling ke Timur dan Bertindak ke Timur India ke kawasan Pasifik Selatan. Selama KTT itu, 12 dari 14 negara kepulauan Pasifik menjanjikan dukungan mereka untuk keanggotaan permanen India di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (dua lainnya, Kepulauan Cook dan Niue, tidak memiliki suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Sebelumnya, selama perjalanan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Fiji pada November 2014, ruang lingkup dan jangkauan keterlibatan diplomatik India dengan kepulauan Pasifik telah diperdebatkan. Perjalanan itu merupakan titik balik dalam penjangkauan India ke kepulauan Pasifik: Modi mengundang para kepala negara dari 14 negara

# KEPULAUAN PASIFIK

## FORUM KEPULAUAN PASIFIK

Didirikan pada tahun 1971, forum itu beranggotakan 18 negara: Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

## KELOMPOK PELOPOR MELANESIA (MSG)

Didirikan pada tahun 1986, kelompok itu beranggotakan empat negara Melanesia — Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu — serta Front Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Kanaki di Kaledonia Baru (FLNKS).

**Para pemimpin kepulauan Pasifik mengunjungi Benteng Amber di Jaipur, India, selama Forum KTT Kerja Sama India-Kepulauan Pasifik pada Agustus 2015.** THE ASSOCIATED PRESS

kepulauan Pasifik ke Suva, ibu kota Fiji, sebagai bagian dari KTT Kepulauan Indo-Pasifik pertama, sebagian besar mencontoh keterlibatan India dengan negara-negara Afrika melalui KTT Indo-Afrika. KTT itu menghasilkan dibentuknya Forum Kerja Sama India-Kepulauan Pasifik.

Satu aspek penting selama perjalanan Modi adalah ketidakhadiran perwakilan diplomatik India dari Selandia Baru di KTT itu. Hal itu berubah selama kunjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri India V. K. Singh ke Suva pada Mei 2017 sebagai bagian dari Konferensi Pembangunan India dan Kepulauan Pasifik, dengan partisipasi dari komisaris tinggi India untuk Selandia Baru. Misi diplomatik India di Selandia Baru memiliki akreditasi bersamaan untuk tiga kepulauan Pasifik — Kiribati, Nauru, dan Samoa — menjadikannya perpaduan penjangkauan diplomatik terutama untuk Mikronesia dan Polinesia.

India hanya memiliki pos diplomatik permanen di Fiji dan Papua Nugini, keduanya tidak memiliki atase militer.

Akan tetapi, India memiliki atase militer di Cile. Negara Amerika Selatan ini memenuhi syarat sebagai kekuatan Pasifik Selatan, berkat jangkauan maritimnya yang luas di Pasifik Selatan dan Tenggara. Afiliasi militer India di Cile melibatkan kerja sama militer aktif, yang membantu Pasukan Maritim Cile mengembangkan kemampuan amfibi dan logistik.

India juga akan terlibat dengan Indonesia. Bahkan, selama perjalanan Modi baru-baru ini ke Indonesia, India mendukung konsep Visi Poros Maritim Indonesia yang banyak diperdebatkan, yang menyerukan perluasan maritim Jakarta di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia akan mengikutinya dengan mendukung Kebijakan Bertindak ke Timur India yang membentang hingga ke kepulauan Pasifik.

Secara diplomatik, Indonesia juga akan membantu memperluas jangkauan India di kepulauan Pasifik. Indonesia adalah bagian dari Kelompok Pelopor Melanesia (Melanesian Spearhead Group - MSG), yang terdiri dari empat negara Melanesia — Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu — serta Front Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Kanaki di Kaledonia Baru (FLNKS). Pada Juni 2015, Indonesia diakui sebagai anggota mitra kerja MSG.

MSG adalah alternatif dari Forum Kepulauan Pasifik tradisional, tempat keterlibatan India telah meningkat secara ekonomi dan diplomatik selama bertahun-tahun. India diperkirakan akan mendapatkan keanggotaan dalam MSG sebagai langkah taktis untuk melawan ekspansi Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan, terutama di negara-negara Melanesia tempat meningkatnya pengaruh Tiongkok.

Dengan Tiongkok yang dilaporkan sedang mempertimbangkan pendirian pangkalan angkatan laut di Vanuatu, kehadiran maritim India di kepulauan Pasifik dapat disambut oleh negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Prancis. Pangkalan Tiongkok di Vanuatu akan memiliki potensi untuk diubah menjadi "platform intelijen" militer, terutama karena kedekatannya dengan Australia dan Selandia Baru, keduanya merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan bagian dari aliansi intelijen Five Eyes.

Yang menarik, Prancis memiliki pangkalan militer dan wilayah luar negeri di Pasifik Selatan. Paris baru-baru ini menandatangani Perjanjian Pertukaran Logistik dengan New Delhi, serupa dengan Perjanjian Pertukaran Logistik India-A.S. Perjanjian India-Prancis itu menyediakan India akses ke pangkalan militer Prancis di Samudra Hindia barat. Ruang lingkup perjanjian India-Prancis akan diperluas ke Pasifik Selatan, tempat India mungkin diberi kesempatan untuk membangun pangkalan di kepulauan Pasifik.

Kerja sama militer mungkin mencakup pasukan India yang beroperasi bersama rekan-rekan Prancis, Selandia Baru, dan Australia mereka dalam berbagai latihan seperti

**Perdana Menteri India Narendra Modi, kiri, berjabat tangan dengan Perdana Menteri Vanuatu Sato Kilman dalam Forum KTT Kerja Sama India-Kepulauan Pasifik di Jaipur, India, pada Agustus 2015.** THE ASSOCIATED PRESS

**Perdana Menteri India Narendra Modi, kanan, menyambut Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama ke konferensi energi di New Delhi pada Maret 2018.** AFP/GETTY IMAGES

Croix du Sud yang berlangsung setiap dua tahun sekali. Pengembangan lebih lanjut dari keterlibatan India di kepulauan Pasifik akan mencakup India yang membagikan lebih banyak intelijen aktif dari Prancis, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

## *FAKTOR FIJI*

Keterlibatan India yang lebih besar dengan kepulauan Pasifik akan diuji oleh pemilihan umum di Fiji tahun ini. Meskipun Fiji dianggap sebagai negara Melanesia tepat di luar Segitiga Polinesia, budaya dan politiknya dipengaruhi oleh Polinesia. Fiji juga memiliki populasi Indo-Fiji yang signifikan, sekitar 40 persen dari total populasi, yang memiliki pengaruh politik, meskipun kudeta pada tahun 1987 ditujukan terhadap mereka.

Dalam 12 tahun terakhir ini, Fiji telah menempuh jalan panjang secara politis dan ekonomis di bawah kepemimpinan Frank Bainimarama, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2006 dan kemudian mengonsolidasikan kekuasaan sebagai perdana menteri pada tahun 2014 setelah pemilihan umum. Jika Bainimarama mengonsolidasikan kekuasaannya secara lebih lanjut dalam pemilihan umum tahun 2018, Fiji dapat mulai menegaskan pengaruh politisnya melalui keanggotaan di forum regional lainnya, seperti Kelompok Pelopor Polinesia (Polynesian Spearhead Group), selain menegaskan posisinya di MSG.

Bainimarama telah mendukung gagasan bahwa Fiji, dengan lokasinya yang strategis, dapat diubah menjadi Singapuranya Pasifik Selatan — sebagian besar dibantu oleh investasi ekonomi dari luar negeri, terutama dari Tiongkok tetapi juga India. India merupakan bagian dari Kebijakan Berpaling ke Utara Fiji, yang dimulai pada tahun 2006.

Tiongkok telah menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendanai dan melakukan berbagai proyek infrastruktur seperti pengerukan pelabuhan dan pembangunan jalan yang memiliki potensi penggunaan ganda: Proyek itu dapat digunakan untuk tujuan sipil dan militer.

Ketika India mencoba memperluas jangkauannya di kepulauan Pasifik, negara-negara MSG dapat membentuk pasukan keamanan regional yang diberi nama Legiun dengan markas besarnya di Suva. Legiun akan dikelola oleh administrator MSG dan terdiri dari personel militer, kepolisian, pengendalian perbatasan, dan bea cukai. Fiji dan Papua Nugini akan menyumbangkan sebagian besar personel ke unit-unit militer dan kepolisian Legiun. Diharapkan bahwa Legiun akan didukung oleh militer aktif dan bantuan teknis India, terutama setelah pemilihan umum di Fiji pada tahun 2018.

Melalui prakarsa semacam itu, dimensi militer dari upaya diplomatik India di kawasan itu akan mendahului dibentuknya pangkalan militer dan atase militer India (terutama atase angkatan laut) di negara-negara kepulauan Pasifik. India juga dapat memperluas kehadirannya di Pasifik Selatan melalui diasporanya. India memiliki banyak diaspora di Australia, Kaledonia Baru, Fiji, dan Selandia Baru, yang menyediakan saluran terbuka untuk pertukaran informasi di antara negara-negara tetangga di Pasifik Barat Daya dan tanah air India.

Tidak seperti diaspora Tiongkok di Pasifik Selatan, komunitas ekspatriat India memiliki kesetiaan yang beragam dan tidak bersatu dalam mendukung negara India atau partai politik apa pun. Oleh karena itu diaspora India tidak dianggap sebagai sumber spionase atau menjajakan pengaruh dengan cara yang sama seperti diaspora Tiongkok, tanda diterimanya komunitas diaspora ini di antara negara-negara di Pasifik Selatan.

Sebagai kesimpulan, jangkauan India yang meluas di Pasifik Selatan dan kepulauan Pasifik akan menjadi bagian dari jangkauan maritimnya yang semakin luas. India akan meningkatkan ikatan diplomatik, ekonomi, dan budayanya yang ada di kawasan itu sebagai bagian keseluruhan dari penjangkauan strategisnya di Indo-Pasifik dan sekitarnya. □

Balaji Chandramohan merupakan peneliti tamu di Future Directions International. Artikel ini pada awalnya diterbitkan di majalah online The Diplomat pada 13 Juni 2018. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format *FORUM*.

AFP/GETTY IMAGES

MADAGASKAR

# Memelopori PENANGKAPAN IKAN YANG LEBIH AMAN

Banyak rakyat Madagaskar mengandalkan samudra untuk bertahan hidup. Sebagai pulau terbesar keempat di dunia, Madagaskar memiliki garis pantai 5.000 kilometer.

Ketika persediaan ikan global semakin terancam habis, warga Madagaskar selatan telah merintis alternatif penangkapan ikan yang lebih aman untuk melindungi sumber daya alam negara itu.

"Ketika masih kecil, saya pergi memancing dengan ayah saya dan ada banyak ikan," ungkap Clin Ratsimbazafy, yang merupakan bagian dari prakarsa akar rumput untuk menghentikan penangkapan ikan berlebihan.

"Tapi hal itu berubah, dan kami tidak punya apa-apa, sampai kami belajar cara melestarikan sumber daya laut," ungkapnya sambil memperbaiki jalanya di bawah sinar matahari sore di Andavadoaka, sebuah desa di pantai barat daya Madagaskar.

Area laut yang dikelola secara lokal (LMMA) pertama di Madagaskar didirikan pada tahun 2006 dan disebut Velondriake, yang berarti hidup dengan samudra. Upaya itu telah berkembang, menelurkan lebih dari 100 LMMA di pulau itu dan hingga mencapai Fiji dan Kosta Rika.

Pengunjung datang jauh-jauh dari Meksiko untuk mempelajari cadangan gurita Velondriake – daerah yang tertutup bagi penangkapan ikan agar memungkinkan gurita tumbuh hingga mencapai ukuran penuhnya, mengisi kembali persediaan, dan memaksimalkan hasil tangkapan.

"Begitu kami memberi tahu mereka tentang bagaimana menipisnya sumber daya akan berdampak negatif terhadap mereka, mereka menyadari betapa pentingnya melindungi sumber daya yang mereka gunakan setiap hari," ungkap Presiden Velondriake Richard Badouraly.

Melalui kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sekarang mengelola 11 persen garis pantai Malagasi, sering kali menggunakan hukum lingkungan adat yang dikenal sebagai dina, demikian menurut Blue Ventures, kelompok konservasi berbasis di Inggris yang mendukung prakarsa ini.

Velondriake merupakan cagar laut terbesar yang dikelola secara lokal di Samudra Hindia, yang membentang seluas 640 kilometer persegi.

Badouraly berharap masyarakat lain akan mengadopsi pendekatan konservasi akar rumput sebelum spesies yang terancam punah mengalami kepunahan. "Harapan saya untuk masa depan adalah bahwa semua masyarakat akan puas dengan panen laut, dan semuanya akan tumbuh." REUTERS

SWEDIA

# Baja bebas bahan bakar FOSIL

Swedia telah memulai pembangunan pabrik yang akan menguji apakah baja dapat dibuat tanpa membakar bahan bakar fosil.

Perusahaan utilitas Vattenfall – dipimpin oleh direktur pelaksana dan CEO Magnus Hall, ditampilkan dalam foto – telah bekerja sama dengan perusahaan baja SSAB dan perusahaan pertambangan LKAB untuk membangun pabrik percontohan senilai 2,22 triliun rupiah (158 juta dolar A.S.).

Pabrik-pabrik yang ada sekarang menghasilkan sejumlah besar karbon dioksida, gas rumah kaca, ketika batu bara digunakan untuk mengubah besi menjadi baja yang dikeraskan.

Pabrik baru yang sedang dibangun di kota Lulea di sebelah timur laut Swedia paling lambat tahun 2020 itu akan menggunakan hidrogen sebagai pengganti batu bara dan kokas, yang merupakan bahan bakar padat yang dibuat dengan memanaskan batu bara. Usaha patungan perusahaan itu, yang disebut HYBRIT, bertujuan untuk memiliki proses industri paling lambat tahun 2035, demikian ungkap Vattenfall pada Juni 2018.

Vattenfall mengatakan bahwa teknologi itu berpotensi mengurangi emisi karbon dioksida Swedia hingga 10 persen, membantu memenuhi sasaran negara itu berdasarkan kesepakatan iklim Paris. THE ASSOCIATED PRESS

# ANGGOTA PARLEMEN UNI EROPA MENYERUKAN **LARANGAN GLOBAL TERHADAP 'ROBOT PEMBUNUH'**

Uni Eropa mengambil sikap menentang "robot pembunuh" pada pertengahan September 2018 ketika Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyerukan larangan internasional terhadap pengembangan, produksi, dan penggunaan senjata yang membunuh tanpa keputusan menembak yang dibuat oleh manusia.

Persenjataan otonom merupakan mesin yang diprogram untuk memilih dan menyerang target menggunakan kecerdasan buatan, tanpa kendali manusia. Pihak yang menentangnya takut bahwa persenjataan itu bisa menimbulkan bahaya ketika terjadi serangan siber atau karena kesalahan dalam pemrogramannya.

"Saya tahu bahwa ini mungkin terlihat seperti perdebatan tentang masa depan nun jauh di sana atau fiksi ilmiah. Bukan seperti itu," ungkap Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa, dalam debat di Parlemen sehari sebelum pemungutan suara.

Resolusi itu berupaya untuk mencegah pengembangan dan penggunaan persenjataan otonom.

Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Israel, Korea Selatan, Rusia, dan Inggris, berupaya mengembangkan sistem persenjataan otonom, dengan prekursor seperti drone bersenjata, demikian menurut kelompok nirlaba Human Rights Watch.

Kantor berita Rusia TASS melaporkan pada tahun 2017 bahwa pembuat persenjataan Rusia, Kalashnikov, telah mengembangkan senjata otomatis yang mampu "mengidentifikasi target dan membuat keputusan."

Sebagian besar anggota di debat Parlemen Eropa menyetujui resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa penggunaan persenjataan semacam itu merupakan masalah hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Beberapa pihak khawatir bahwa legislasi itu dapat membatasi kemajuan ilmiah di bidang kecerdasan buatan untuk penggunaan sehari-hari.

Kekhawatiran lain yang ditekankan oleh anggota parlemen adalah risiko keamanan yang akan dihadapi blok itu jika melarang penggunaan persenjataan tersebut sementara pihak lain tidak melarangnya.

"Sistem persenjataan otonom harus dilarang secara internasional," ungkap Bodil Valero, juru bicara kebijakan keamanan untuk Kelompok Hijau/EFA Parlemen Uni Eropa. "Kekuasaan untuk memutuskan hidup dan matinya seseorang seharusnya tidak pernah diambil dari tangan manusia dan diberikan kepada mesin."

Resolusi itu meminta Uni Eropa untuk menetapkan posisi bersama sebelum negosiasi internasional yang dijadwalkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2018.

Di tingkat PB.B., 26 pemerintah menuntut pelarangan persenjataan kecerdasan buatan, demikian menurut pernyataan dari kelompok Hijau/EFA.

"Resolusi ini menambah momentum penting menuju langkah lebih lanjut untuk mencegah pengembangan dan penggunaannya," ungkap organisasi perdamaian PAX dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara pada bulan September. Reuters

ILUSTRASI FORUM

# AFRIKA SELATAN MEMERANGI KEKERASAN SENJATA API

Ketika suara tembakan terdengar di salah satu lingkungan paling berbahaya di Afrika Selatan, sebuah teknologi baru mendeteksi lokasi senjata dan segera memberi tahu polisi.

Afrika Selatan merupakan negara pertama di luar Amerika Serikat yang menerapkan teknologi audio detektor tembakan, yang juga digunakan untuk memerangi perburuan satwa liar di sisi lain negara itu di Taman Nasional Kruger.

Penggunaan teknologi itu di daerah Cape Flats yang terkenal dengan kekerasan telah memberikan kontribusi untuk pertama kalinya pada tahun 2018 pada penetapan hukuman dalam kasus penembakan geng. Polisi berharap lebih banyak kasus akan terungkap.

"Sekitar 13 persen tembakan dilaporkan oleh publik. Sekarang kami merespons setiap kejadian, dengan sangat cepat," ungkap Alderman J.P. Smith dari Cape Town, yang memulai penerapan teknologi itu di lingkungan Manenberg dan Hanover Park pada tahun 2016. "Teknologi itu akurat dalam rentang 2 meter hingga 10 meter (6 kaki hingga 33 kaki) dari tempat tembakan."

Smith mengatakan bahwa penemuan senjata ilegal telah melonjak lima kali lipat di daerah-daerah tempat shotspotter digunakan. Teknologi itu juga menyediakan data akurat tentang kekerasan senjata api.

Teknologi itu beroperasi dengan menggunakan sensor akustik, yang ditempatkan pada berbagai tempat di lingkungan sekitar. Cape Town berencana untuk memperluas penggunaannya dari 7 kilometer persegi saat ini menjadi 18 kilometer persegi.

Tingkat pembunuhan Afrika Selatan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Pada September 2018, polisi mengumumkan bahwa angka itu naik sekitar 7 persen, dengan 20.336 orang terbunuh antara April 2017 dan Maret 2018, dibandingkan dengan 19.016 orang pada tahun sebelumnya. Banyak kasus yang terkait dengan kekerasan geng di provinsi Western Cape, yang ibu kotanya adalah Cape Town.

Tingkat pembunuhan nasional sebesar 34 per 100.000 orang melonjak di beberapa bagian Cape Flats menjadi 250 per 100.000 orang, demikian menurut University of Cape Town.

"Kekerasan menghasilkan kekerasan," ungkap kriminolog Guy Lamb dari University of Cape Town. "Sejak tahun 1994 kami memiliki tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan yang tinggi, dan dinamika ini telah menambah tingginya tingkat kejahatan kekerasan."

Seorang warga Manenberg, Shakier Adams, menjelaskan seperti apa kehidupan di Cape Flats.

"Tumbuh besar di sana, Anda benar-benar terjebak dalam baku tembak setiap hari. Anda harus berhati-hati dengan siapa Anda berbicara, ke mana Anda pergi, dengan siapa pun Anda bergaul."

The Associated Press

# EROPA MEMBERI PERUSAHAAN INTERNET 1 JAM *untuk menghapus konten ekstremis*

Otoritas Eropa berencana untuk menjatuhkan hukuman denda besar kepada perusahaan internet seperti Google, Twitter, dan Facebook jika mereka tidak menghapus konten ekstremis dalam waktu satu jam setelah diposting.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan dalam pidato pada September 2018 bahwa komisi itu mengusulkan aturan baru sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan blok itu.

Dia mengatakan bahwa penting untuk menghapus materi dalam waktu satu jam karena periode itu merupakan "masa kritis terjadinya kerusakan terbesar."

Badan eksekutif Uni Eropa (UE) mengatakan bahwa "propaganda yang menyiapkan, menghasut, atau memuliakan tindakan terorisme" harus dihapus. Konten semacam itu akan ditandai oleh otoritas nasional, yang akan mengeluarkan perintah penghapusan kepada perusahaan internet yang menampungnya. Perusahaan-perusahaan itu akan diberi waktu satu jam untuk menghapusnya.

Proposal itu, yang masih membutuhkan persetujuan dari anggota parlemen dan negara-negara anggota Uni Eropa, akan menjadi langkah baru bagi Uni Eropa, yang sampai sekarang telah memungkinkan perusahaan online untuk mengambil pendekatan sukarela guna memerangi konten ekstremis. Aturan satu jam itu merupakan salah satu di antara serangkaian rekomendasi yang dibuat komisi itu pada Maret 2018 untuk memerangi penyebaran konten ekstremis online.

Berdasarkan proposal itu, perusahaan internet harus mengambil tindakan, termasuk memasang sistem otomatis, untuk mencegah konten itu diunggah kembali setelah dihapus untuk pertama kalinya. Perusahaan yang lalai mematuhinya akan menghadapi denda hingga 4 persen dari omzet global tahunan mereka.

Untuk Google, yang memiliki YouTube, denda itu bisa mencapai hingga 61,76 triliun rupiah (4,4 miliar dolar A.S.), berdasarkan pendapatan perusahaan induknya Alphabet Inc. yang mencapai 1,56 kuadriliun rupiah (110,9 miliar dolar A.S.) untuk tahun 2017.

"Kami menyetujui keinginan Komisi Eropa untuk bereaksi cepat terhadap konten teroris dan menjauhkan ekstremisme kekerasan dari platform kami," ungkap Google. "Kami menyambut baik fokus yang diberikan komisi itu untuk upaya ini dan kami akan terus berhubungan erat dengan mereka, negara-negara anggota, dan penegakan hukum dalam masalah penting ini." The Associated Press

# Berseragam Putih

Anggota barisan penjaga kehormatan Pasukan Bela Diri Jepang bersiap untuk menyelenggarakan upacara bagi Laksamana Philip S. Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik A.S., di Kementerian Pertahanan di Tokyo, Jepang, pada 21 Juni 2018. Selama kunjungannya itu, Davidson bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera dan meyakinkan mereka tentang komitmen A.S. terhadap pertahanan Jepang dan denuklirisasi Korea Utara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah, demikian yang dilaporkan Reuters. “Kita perlu memperhatikan dengan cermat langkah-langkah Korea Utara menuju denuklirisasi. Aliansi Jepang-A.S. memainkan peran penting dalam hal ini,” ungkap Onodera.

Foto Dari: **ISSEI KATO** | Reuters

# RELEVAN.
# BERWAWASAN.
# ONLINE.

**www.ipdefenseforum.com**

**ISI YANG BARU DITERBITKAN SETIAP HARI!**

## BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA

*Indo-Pacific Defense FORUM* adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA bagi siapa pun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Pasifik.

**UNTUK BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA:**

www.ipdefenseforum.com/subscribe

surat: *IPD FORUM* Program Manager
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

**MOHON SERTAKAN:**

- Nama
- Pekerjaan
- Gelar atau jabatan
- Alamat surat
- Alamat email

**Mari bergabung dengan kami di Facebook dan Twitter.**